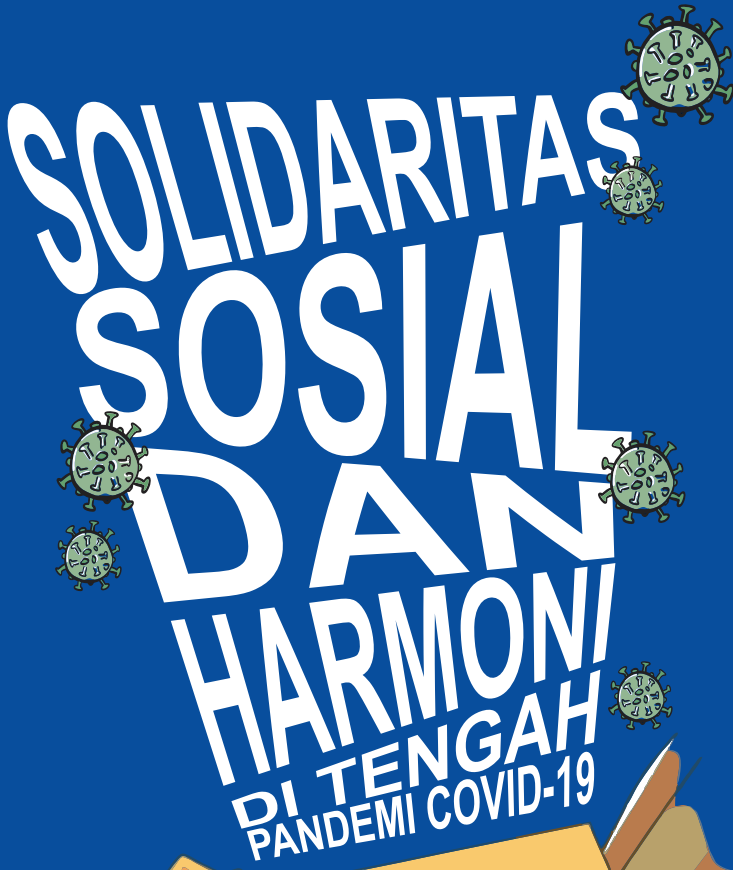


# SOLIDARITAS SOSIAL DAN HARMONI DI TENGAH PANDEMI COVID-19

The title is written in large, white, bold, sans-serif capital letters, slanted upwards from left to right. The text is surrounded by several stylized, green and grey virus-like icons with spikes. Below the text, there is an illustration of two hands, one light brown and one darker brown, holding a yellow cardboard box. The box is partially open, with the top flaps folded down.

Editor:  
Irfan Abubakar  
Idris Hemay





# *Solidaritas Sosial dan Harmoni di Tengah Pandemi Covid-19*

## **Penulis:**

Idris Hemay  
Irfan Abubakar  
Faisal Nurdin Idris  
Muchtadlirin  
Rita Pranawati

## **Editor:**

Irfan Abubakar  
Idris Hemay

## **Penyelarar Bahasa:**

Junaidi Simun

## **Layout dan Cover:**

Hidayat *al-fanmanie'*  
Nuri Farikhatin

## **Penerbit:**

Center for the Study of Religion and Culture (CSRC)  
Pusat Kajian Agama dan Budaya UIN Syarif Hidayatullah Jakarta  
Jl. Kertamukti No. 5 Cirendeui, Ciputat Timur, Banten 15419  
Telp. 021-744 5173 | [www.csrc.or.id](http://www.csrc.or.id) | [csrc@uinjkt.ac.id](mailto:csrc@uinjkt.ac.id)

Penerbitan ini didukung oleh Konrad-Adenauer-Stiftung  
Plaza Amnita 4<sup>th</sup> Floor  
Jl. Tb Simatupang Kav. 10 Jakarta 12310 Indonesia  
Telp. 021-759 09411 | [www.kas.de/indonesian](http://www.kas.de/indonesian) | [info.indonesia@kas.de](mailto:info.indonesia@kas.de)

ISBN: 978-979-3531-40-3

# *Daftar Isi*

Pengantar Direktur CSRC UIN Jakarta | *iii*

Pengantar Direktur KAS Indonesia-Timor Leste | *xix*

## **Bab 1**

### **Solidaritas Sosial, Agama, dan Media Sosial di Masa Pandemi**

*Oleh: Irfan Abubakar & Idris Hemay*

- A. Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi | 4
- B. Kepercayaan kepada Pemerintah dan Polarisasi Politik | 7
- C. Peran Agama dalam Penanggulangan Covid-19 | 11
- D. Solidaritas Lintas Agama di Tengah Pandemi | 15
- E. Media Sosial di Tengah Pandemi: Misinformasi dan Disinformasi | 17

## **Bab 2**

### **Solidaritas Sosial dan Kepercayaan di Masa Pandemi Covid-19**

*Oleh: Faisal Nurdin Idris*

- A. Memahami Solidaritas Sosial dan Kepercayaan Publik di Masa Krisis Covid-19 | 31
- B. Konsepsi Solidaritas Sosial | 38
- C. Konsepsi Kepercayaan Sosial dan Politik dalam Hubungannya dengan Covid-19 | 46
- D. Solidaritas Sosial di Indonesia: Opini, Sikap, dan Praktiknya | 49
- E. Kepercayaan Sosial dan Pandemi Covid-19 | 55
- F. Kepercayaan Politik dalam Penanganan Covid-19 | 59
- G. Penutup | 64

### **Bab 3**

#### **Agama, Solidaritas Sosial, dan Harmoni selama Pandemi**

*Oleh: Muchtadlirin*

- A. Sikap Masyarakat Beragama dalam Menghadapi Pandemi | 77
- B. Harmoni Keagamaan selama Pandemi | 82
- C. Toleransi dan Kekerasan atas Nama Agama | 83
- D. Saling Memahami, Menerima, dan Bersimpati | 91
- E. Penghargaan terhadap HAM dan Ujaran Kebencian | 93
- F. Peran Agama selama Pandemi | 97
- G. Penutup | 112

### **Bab 4**

#### **Disinformasi Pandemi di Media Sosial dan Penanganannya**

*Oleh: Rita Pranawati*

- A. Covid dan Perubahan | 122
- B. Media Sosial di Masa Pandemi | 124
- C. Media Sosial, Hoaks, dan Disinformasi | 128
- D. Pola dan Kecenderungan Menyikapi Informasi Covid-19 | 130
- E. Problematika Disinformasi dan Penegakkan Hukum | 137
- F. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pencegahan Disinformasi Covid-19 | 146
- G. Penutup | 155

### **Bab 5**

#### **Kesimpulan dan Penutup | 173**

*Oleh: Irfan Abubakar & Idris Hemay*

Profil Penulis dan Editor | 179

Tentang CSRC UIN Jakarta | 185

Tentang KAS Indonesia dan Timor-Leste | 189

## *Pengantar*

### **Direktur CSRC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta**

**S**olidaritas menjadi istilah kunci yang pemaknaannya begitu kontekstual di tengah situasi pandemi Covid-19. Hampir di semua lini kehidupan di mana sistem sosial bekerja, kita menangkap gejala meningkatnya kesadaran akan urgensi solidaritas baik antar individu, warga negara, komunitas maupun antar negara. Dengan bertumpu pada rasa saling percaya di antara sesama, kepedulian di masa krisis kesehatan terasa lebih berharga dibanding mengedepankan kepentingan sendiri di masa normal.

Ekspresi solidaritas masa pandemi terbilang unik dan sedikit berbeda dengan solidaritas di masa normal. Jika biasanya solidaritas dijalankan melalui modus interaksi yang mengandaikan pertemuan fisik, kali ini diekspresikan di bawah kondisi yang serba terbatas karena keharusan menjaga jarak. Dalam suasana semacam itu, kita sulit menemui solidaritas yang ditunjukkan dengan kegiatan semisal kunjungan warga kepada keluarga atau koleganya yang sakit. Namun saat bersamaan, kita sering menjumpai kebiasaan mereka yang menaruh makanan di pagar atau pintu rumah warga yang sedang isolasi mandiri.

Pada level komunitas atau organisasi masyarakat sipil, aksi solidaritas menjelma dalam kerja kolektif dengan memaksimalkan kapasitas yang dimiliki masing-masing. Organisasi keagamaan misalnya, banyak berperan membangun literasi soal bagaimana

agama menyikapi pandemi, penekanan mengenai adaptasi kebiasaan baru dalam beribadah, pendirian pusat penanganan Covid-19 di sejumlah daerah, pelibatan sumber daya dan jejaring kelembagaan seperti dokter dan tenaga kesehatan, rumah sakit, sekolah atau lembaga filantropis, termasuk penggalangan dan penyaluran bantuan alat kesehatan, obat-obatan, uang, dan pangan.

Rupanya, keterbatasan akibat pandemi tak lantas menutup pintu kepedulian setiap individu dalam masyarakat untuk saling berbagi. Keganasan virus yang dapat mengancam siapa pun juga tidak serta merta menyuburkan egoisme, dengan membelanjakan seluruh tabungan untuk keperluan aktivitas di dalam rumah, memborong makanan, minuman, vitamin atau masker di supermarket. Sebaliknya, aksi solidaritas justru dipilih sebagai tindakan respon yang dipandang lebih utama ketimbang opsi lainnya.

Secara konseptual, tentu saja terdapat banyak teori yang bisa dijadikan pendekatan untuk menjelaskan fenomena tersebut. Namun dari semua pendekatan itu, ada satu fakta yang tak dapat dikesampingkan bahwa: penyebaran virus beserta dampak penanganannya telah mengganggu bahkan melumpuhkan fungsi sebagian besar elemen dalam sistem sosial. Elemen yang dimaksud ialah subsistem yang tidak terbatas pada sistem kesehatan semata melainkan juga sistem ekonomi, hukum, pendidikan, dan politik. Khusus ekonomi, sektor ini paling terpukul setelah kesehatan di mana banyak masyarakat yang jatuh miskin, kehilangan pekerjaan atau sumber penghasilan.

Ketika sistem sosial mengalami disfungsi, maka secara mekanik, sistem itu—melalui aktor dan perangkat di dalamnya; akan melakukan adaptasi dan memperkuat resiliensi sampai terbentuk ekuilibrium baru. Dalam konteks ini, solidaritas adalah cara sistem sosial mengaktifkan kembali fungsinya, membentuk



kenormalan baru, merekatkan integrasi, dan mempertahankan harmoni. Selama ekuilibrium yang dituju belum tercapai, maka selama itu pula sistem sosial akan terus mengorganisasi diri serta mengarahkan individu terlibat dalam kerja sama.

Walaupun demikian, di tingkat individu, dorongan untuk terlibat dalam kerja sama tidaklah tunggal. Sebagian ada yang berangkat dari kesadaran yang lahir atas kalkulasi rasional di mana seseorang memang harus berkolaborasi agar terbebas dari ancaman virus. Sebagian lagi karena lebih digerakkan oleh motif lain seperti anjuran agama atau kepercayaan, pertimbangan kemanusiaan, budaya, dan sebagainya. Namun apapun motivasinya, kerja sama selalu mensyaratkan satu hal, yakni rasa saling percaya, baik antar sesama anggota masyarakat (kepercayaan sosial) maupun antar masyarakat dengan pemerintah (kepercayaan politik).

Tanpa kepercayaan itu mustahil kerja sama dapat terjalin dengan baik. Mungkin saja pada titik ini sebagian orang masih tetap peduli, misal karena termotivasi ajaran agama agar berbuat ikhlas untuk mendapat balasan surga di akhirat. Tetapi kepedulian semacam itu tidak akan melahirkan kerja sama yang efektif. Sebaliknya, dari rasa saling percaya, kepedulian pada nasib kesehatan bersama akan berkembang menjadi solidaritas organik yang menjelma dalam kerja-kerja kolaboratif.

Bagaimana sebenarnya kondisi atau praktik solidaritas di masa pandemi Covid-19? Apa saja yang memotivasi individu terlibat dalam aksi solidaritas? Sejauhmana tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi dan struktur sosial baik dalam skala mikro, meso maupun makro? Apakah terdapat perbedaan hubungan antara kepercayaan dan tingkat kepatuhan terhadap protokol kesehatan dengan preferensi politik saat Pilres 2019? Sejauhmana mana peran media sosial dimanfaatkan sebagai medium diseminasi dan ruang diskursus seputar pandemi?

Buku ini merupakan hasil survei nasional yang mengetengahkan jawaban atas solidaritas dan harmoni di tengah pandemi Covid-19. Dengan bersumber pada data hasil survei yang dilakukan saat situasi pandemi belum terkendali, sejumlah temuan mengungkap fakta orisinal dan menarik. Analisis temuan yang dikomparasikan dengan beberapa hasil kajian, termasuk kajian di negara lain, turut memperkaya materi serta memperdalam isi buku ini.

Di samping persoalan di atas, buku ini juga menguji efektivitas kebijakan bantuan sosial oleh pemerintah. Sebab sebagaimana dimaklumi, penerapan pembatasan sosial telah diikuti kebijakan refocusing dan realokasi anggaran untuk membiayai berbagai program, antara lain program bantuan sosial. Bantuan yang tepat, terukur, dan adil tidak hanya dapat mengurangi dampak ekonomi Covid-19 melainkan juga menjadi langkah meyakinkan dalam upaya menumbuhkan kepercayaan dan solidaritas sosial.

Secara khusus, buku ini menyajikan temuan penting mengenai peran agama di tengah pandemi Covid-19. Ini diperlukan mengingat masyarakat Indonesia dikenal religius di mana agama seringkali menjadi dasar tindakan, juga kerap mewarnai pertimbangan kebijakan. Di sini pertanyaan yang relevan diajukan adalah: sejauhmana peran agama dalam upaya mengatasi pandemi? Apakah solidaritas yang lahir atas anjuran agama hanya ditujukan pada saudara seagama? Benarkah kondisi keterancaman atau kecemasan karena virus mendorong individu/masyarakat bersikap dan bertindak intoleran? Lalu, bagaimana potret sesungguhnya tingkat harmoni di tengah pandemi?. Deretan pernyataan tersebut dijawab tuntas dalam buku ini.

## Tentang Buku ini

Buku dihadapan pembaca ini merupakan hasil Survei Nasional “Harmoni dan Solidaritas di Tengah Pandemi Covid-19”. Survei dilakukan pada November-Desember 2020 dengan tujuan sebagai berikut: *pertama*, Untuk mendeskripsikan persepsi, sikap dan perilaku publik terhadap harmoni, solidaritas sosial, dan keragaman di Tengah pandemi. *Kedua*, Menganalisis pengaruh faktor-faktor demografis (usia, gender, afiliasi agama, income, tingkat pendidikan) terhadap persepsi, sikap dan perilaku publik mengenai tiga isu tersebut. *Ketiga*, Menganalisis pengaruh kebiasaan mengakses berita-berita di Medsos terhadap persepsi, sikap dan perilaku publik mengenai tiga isu tersebut. Hasil survei kemudian dikembangkan dengan melakukan studi literatur dan wawancara mendalam untuk mengungkap dan menelusuri apakah solidaritas sosial di tengah masyarakat dapat berkontribusi dalam mencegah dan menanggulangi Covid-19. Berdasarkan tema survei di atas, isu-isu utama yang diungkap di dalam studi ini tentang *trust* kepada orang lain, keadaan emosional masyarakat Indonesia, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap penanganan Covid-19 oleh pemerintah dan masyarakat, sikap terhadap pandemi Covid-19, opini dan sikap terhadap solidaritas sosial, opini dan sikap terhadap harmoni dan keragaman selama pandemi Covid-19, opini dan sikap terkait penghormatan terhadap hak-hak warga negara selama Covid-19, dan media habit (*digital culture*).

## Metodologi Survei

Survei ini menggunakan metode kuantitatif dalam pengumpulan data dan analisis data. Berlangsung antara Oktober-Desember 2020, penelitian ini telah berhasil mewawancarai 1000 orang responden terpilih secara acak yang tersebar secara proporsional di 34 Provinsi di Indonesia. Penentuan sampel dalam survei ini dipilih secara acak (*probability sampling*) dengan menggunakan metode *multistage random*

*sampling*. Populasi survei ini adalah penduduk dewasa dengan menggunakan kerangka sampling daftar penduduk pemerintahan Rukun Tetangga dan menggunakan unit analisisnya individu. Teknik pengumpulan data survei menggunakan kuesioner yang dilakukan secara terstruktur (*structured interview*). Situasi pandemi Covid-19 yang masih berlangsung di hampir semua wilayah membuat wawancara tatap muka tidak mudah dilakukan sepenuhnya. Karena itu teknik wawancara tatap muka dikombinasikan dengan wawancara via telepon sesuai dengan kondisi demografi responden. Agar data yang diperoleh dari hasil wawancara dapat dijamin reliabilitas dan validitasnya maka dilakukan *Quality control*. *Quality control* diperlukan mengingat, dalam pelaksanaannya, survei melibatkan banyak orang dari peneliti, koordinator Provinsi, koordinator lapangan, hingga *interviewer*. Prinsip dari *quality control* setidaknya ada dua; *pertama* memastikan data diperoleh secara benar, *kedua* semua elemen (orang) yang terlibat dalam survei memiliki pemahaman yang sama atas tujuan dan instrumen survei. Aspek yang dikontrol antara lain:

Responden yang diwawancarai jumlahnya berimbang dari segi sebaran wilayah kota-desa dan kategori gender dimana perbandingannya mendekati 50%-50%. Daerah tempat tinggal responden juga dilihat sebarannya berdasarkan zona wilayah resiko terpapar Covid-19. Zona wilayah dibagi ke dalam warna. Zona Merah mengacu ke wilayah yang resiko tinggi terdampak, Zona Oranye, resiko sedang, Zona Kuning, resiko rendah, dan Zona Hijau, wilayah tidak terdampak. Survei ini dilakukan lebih dari separuh responden tinggal di wilayah Zona Hijau. Sedangkan responden di wilayah Zona Kuning sekitar 18%, disusul Zona Merah (15%), dan Zona Oranye (8,6%), sisanya menjawab tidak tahu (3,4%). Data yang terkumpul selama survei dianalisis dengan SPSS dan dengan menggunakan analisis: *Pertama*, analisis kecenderungan

atas indikator tertentu. Analisis ini dilakukan dengan cara memperbandingkan proporsi antara satu value dengan value yang lain. *Kedua*, analisis perbandingan antar variabel. Analisis ini dilakukan dengan cara meng-*crostabulasi* dua variabel. Dengan metode analisis ini akan diperoleh informasi perbedaan antara satu variabel dengan variabel yang lain. *Ketiga*, analisis cluster dan *tree analysis*. Dengan metode ini diperoleh informasi apa yang mempengaruhi solidaritas sosial dan harmoni di tengah Covid-19.

Penentuan sampel dalam survei ini dipilih secara acak (*probability sampling*). Metode yang digunakan adalah *multistage random sampling*. Tingkatan (*stage*) mengacu pada batas wilayah atau teritori pemerintahan. Asumsinya batas wilayah atau teritori ini mencerminkan pembeda karakteristik responden dan mencakup keseluruhan populasi serta ketersediaan kerangka sampel yang mutakhir (*up dated*). Penentuan responden dalam survei ini hampir sebangun dengan tingkat atau tahapan pemerintahan secara nasional. Pada tingkat pertama, ditentukan Provinsi yang menjadi wilayah survei. Namun karena sifat survei yang nasional maka secara sengaja seluruh Provinsi menjadi wilayah survei. Tingkat yang kedua adalah memilih secara acak desa/kelurahan/kampung di setiap Provinsi. Pemilihan tingkat kedua ini dilakukan dengan terlebih dahulu memisahkan (*stratify*) antara desa/kelurahan/kampung yang berkarakter perkotaan (*urban*) dan pedesaan (*rural*).

Pada tingkat kedua ini langsung langsung memilih wilayah desa/kelurahan/kampung dengan alasan mereduksi peluang kesalahan sampel (*sampling error*) akibat *stage* yang terlalu panjang. Penentuan responden pada tingkat ketiga adalah memilih secara acak wilayah pemerintahan terendah yakni Rukun Tetangga (RT) atau sejenisnya. Dalam setiap desa/kelurahan/kampung dipilih lima Rukun Tetangga. Pada tingkat keempat dilakukan pemilihan secara acak kepala keluarga (KK) yang terdaftar secara resmi dalam

setiap Rukun Tetangga. Pada tingkat inilah ditemukan kerangka sampel berupa daftar yang mutakhir dan mencakup seluruh kepala keluarga. Tingkat terakhir dalam penentuan sampel adalah memilih secara acak salah satu dari anggota keluarga untuk menjadi responden. Dalam memilih responden dalam keluarga yang terseleksi sebagai sampel digunakan instrumen yang disebut *Kisch Grid*.

### **Besaran Sampel Survei**

Jumlah sampel atau responden dalam survei ini adalah 1000 orang yang tersebar di 100 Desa/Kelurahan di 34 Provinsi di Indonesia. Oleh karena sampel dipilih secara acak, maka secara metodologi diizinkan untuk membuat klaim tingkat presisi hasil surveinya. Dengan jumlah sampel tersebut, *margin of error* survei ini diperkirakan mencapai  $\pm 5\%$  pada tingkat kepercayaan 95%. Ini dapat diartikan jika jumlah responden yang setuju terhadap sebuah pernyataan adalah sebanyak 70%, maka walaupun survei serupa diulang sebanyak 100 kali, 95 kali di antaranya yang setuju terhadap pernyataan tersebut selalu berada pada rentang 65% sampai dengan 75%. Sampel akan didistribusikan secara proporsional menurut jumlah masyarakat/penduduk di sebuah Provinsi. Artinya sampel di masing-masing Provinsi berbeda-beda sesuai dengan banyak kecilnya populasi di Provinsi tersebut. Tabel di bawah ini distribusi sampel berdasarkan Provinsi.

**Tabel 1.**  
Distribusi Sampel Berdasarkan Provinsi

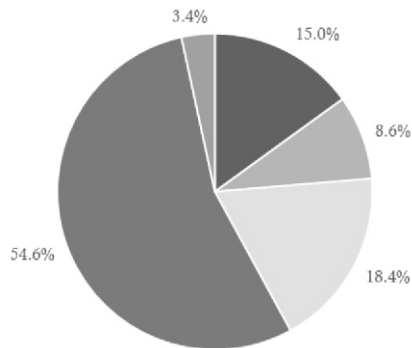
No	Provinsi	Sampel	%	Responden
1	Aceh	5.371.500	2,0%	20
2	Sumatera Utara	14.562.500	5,4%	50
3	Sumatera Barat	5.441.200	2,0%	20
4	Riau	6.971.700	2,6%	20
5	Jambi	3.624.600	1,4%	10
6	Sumatera Selatan	8.470.700	3,2%	30
7	Bengkulu	1.991.800	0,7%	10
8	Lampung	8.447.700	3,2%	30
9	Kep. Bangka Belitung	1.488.800	0,6%	10
10	Kepulauan Riau	2.189.700	0,8%	10
11	DKI Jakarta	10.557.800	3,9%	40
12	Jawa Barat	49.316.700	18,4%	180
13	Jawa Tengah	34.718.200	13,0%	130
14	DI Yogyakarta	3.842.900	1,4%	10
15	Jawa Timur	39.698.600	14,8%	150
16	Banten	12.927.300	4,8%	50
17	Bali	4.336.900	1,6%	10
18	Nusa Tenggara Barat	5.070.400	1,9%	20
19	Nusa Tenggara Timur	5.456.200	2,0%	20
20	Kalimantan Barat	5.069.100	1,9%	20
21	Kalimantan Tengah	2.714.900	1,0%	10
22	Kalimantan Selatan	4.244.100	1,6%	10
23	Kalimantan Timur	3.721.400	1,4%	10
24	Kalimantan Utara	742.200	0,3%	10
25	Sulawesi Utara	2.507.000	0,9%	10
26	Sulawesi Tengah	3.054.000	1,1%	10
27	Sulawesi Selatan	8.851.200	3,3%	30
28	Sulawesi Tenggara	2.704.700	1,0%	10
29	Gorontalo	1.202.600	0,4%	10
30	Sulawesi Barat	1.380.300	0,5%	10
31	Maluku	1.802.900	0,7%	10
32	Maluku Utara	1.255.800	0,5%	10
33	Papua Barat	959.600	0,4%	10
34	Papua	3.379.300	1,3%	10
	Total	268.074.300	100%	1000

### Responden Survei

Seperti yang tampak pada grafik di bawah ini, survei ini dilakukan lebih dari separuh responden tinggal di wilayah Zona Hijau.

Sedangkan responden di wilayah Zona Kuning sekitar 18%, disusul Zona Merah (15%), dan Zona Oranye (8,6%), sisanya menjawab tidak tahu (3,4%). Data yang terkumpul selama survei dianalisis dengan SPSS dan dengan menggunakan analisis regresi untuk melihat tingkat pengaruh antara variabel independen dengan variabel dependen.

**Grafik 1.**  
Daerah Tempat Tinggal Berdasarkan Zona Covid-19

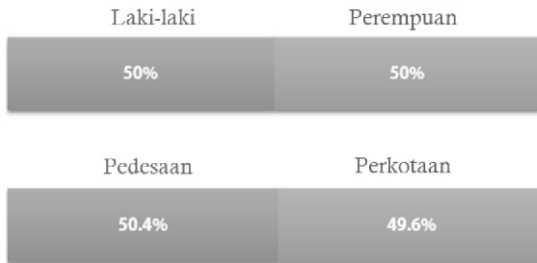


Lingkungan tempat tinggal responden dikategorikan dalam kota dan desa. Tempat tinggal responden yang berada di kota sebanyak 49.6% sedangkan di desa sebanyak 50.4%. Kota dalam penelitian ini adalah lingkungan tempat tinggal responden di kotamadya. Sedangkan desa adalah di wilayah kabupaten. Survei ini menggunakan sample purposive dengan metode *Kisch Grid*. Metode ini digunakan untuk membuat keseimbangan antara responden laki-laki dan perempuan seimbang. Karena itu, setiap nomor kuesioner ganjil ditanyakan kepada responden laki-laki dan kuesioner genap ditanyakan kepada responden perempuan. Survei ini menunjukkan bahwa responden laki-laki 50% sedangkan perempuan 50%. lihat grafik di bawah ini.



### Grafik 2.

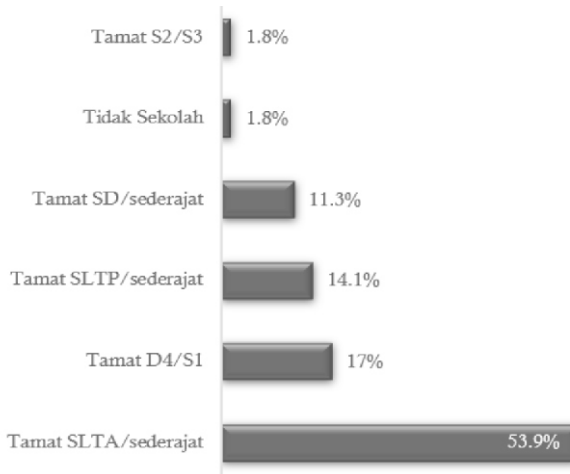
#### Jenis Kelamin dan Wilayah Tinggal Responden



Dilihat dari latar belakang pendidikan, sebaran responden terkecil berasal dari mereka yang tidak mengenyam pendidikan sebanyak 1,8%. Sementara itu jumlah terbanyak adalah mereka yang berpendidikan sekolah lanjutan tingkat atas (SLTA) sebanyak 53,9%. Yang lain berasal dari sekolah dasar (SD) sebanyak 11,3%, sekolah lanjutan tingkat pertama (SLTP) sebanyak 14,1%, diploma 4 /S1 sebanyak 17%, dan pascasarjana (S2/S3) sebanyak 1,8%. lihat grafik di bawah ini.

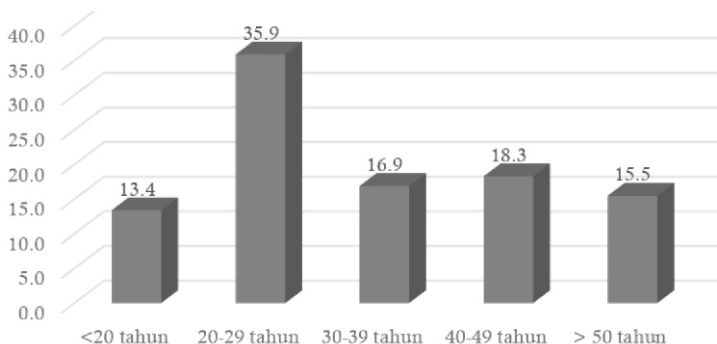
### Grafik 3.

#### Pendidikan Responden



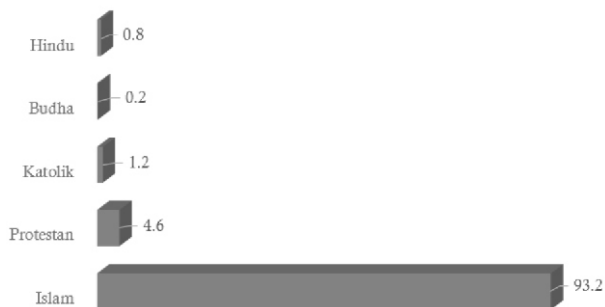
Dari segi usia, survei ini mengelompokkan usia responden dalam lima kategori, yaitu di bawah 20 tahun sebanyak 13,4%, usia dalam rentang 20 sampai dengan 29 tahun sebanyak 35,9%, usia antara 30 tahun sampai dengan 39 tahun sebanyak 16,9%, usia antara 40 tahun sampai dengan 49 tahun sebanyak 18,3%, dan usia 50 tahun ke atas sebanyak 15,5%. lihat grafik di bawah ini.

**Grafik 4.**  
Umur Responden



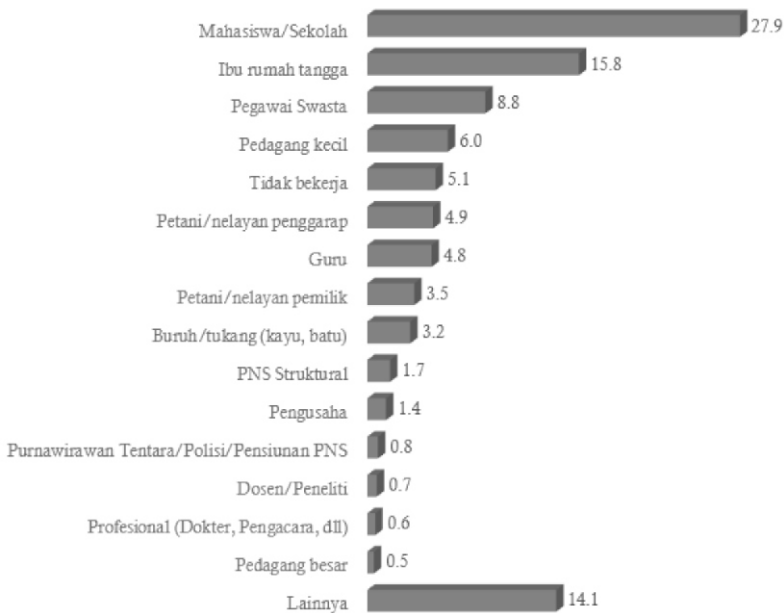
Sebaran responden bila dilihat dari unsur agamanya sebagaimana digambarkan di dalam grafik ini, maka mayoritas berasal dari mereka yang beragama Islam sebanyak 93,2%. Sementara itu yang lain berasal dari 4,6% Protestan, 1,2% Katolik, 0,2% Budha, 0,8% Hindu.

**Grafik 5.**  
Agama Resnonden



Pekerjaan responden terbanyak adalah sebagai Mahasiswa/Sekolah 27,9%, ibu rumah tangga 15,8%. Posisi pegawai swasta sebanyak 8,8%. Sedangkan responden yang bekerja sebagai pedagang kecil 6%, tidak bekerja 5,1%, petani/nelayan penggarap 4,9%, guru 4,8%, petani/nelayan pemilik 3,5%, buruh/tukang (kayu,batu) 3,2%, hanya sebagian kecil saja sebagai PNS 1,7%, pengusaha 1,4% Purnawirawan Tentara/Polisi/Pensiunan PNS 0,8%, Dosen/Peneliti 0,7%, Profesional (Dokter, Pengacara, dll) 0,6, Pedagang besar 0,5, dan Lainnya 14,1%. Lihat grafik di bawah ini:

**Grafik 6.**  
Pekerjaan Responden



## Ucapan Terima Kasih

Buku ini hadir di hadapan pembaca atas kerja sama banyak pihak. Pada kesempatan ini, saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada ketua peneliti, Irfan Abubakar, para peneliti, Muchtadlirin, Rita Pranawati, dan Faisal Nurdin Idris atas kerja kerasnya dalam melakukan survei, penulisan laporan sehingga hasil survei ini dapat disajikan kepada publik yang lebih luas. Tak lupa pula saya utarakan apresiasi saya kepada tim editor, Irfan Abubakar dan Idris Hemay dan tim publikasi yang telah memungkinkan buku ini hadir di hadapan pembaca yang budiman. Demikian pula ucapan terima kasih saya haturkan kepada Prof. Dr. Hj. Amany Lubis, Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, yang mensupport bagi kelancaran dan kesuksesan proyek survei nasional dan penerbitan ini. Kepada Bapak Jan Senkyr, Kepala Perwakilan Konrad-Adenauer-Stiftung di Jakarta, tak ada kata yang dapat saya ucapkan kecuali penghargaan setinggi-tingginya dan rasa terima kasih sedalam dalamnya atas peran dan kontribusinya dalam menyukseskan survei nasional ini, baik melalui pendanaan maupun dorongan moril lainnya yang sangat berharga. Tak lupa, saya ucapkan terimakasih kepada para reviewer dalam seminar dan workshop hasil survei Prof. M. Adlin Sila (Kemenag), Dr. Ida Ruwaida Noor (UI) dan Andy Agung Prihatna (Ahli Survei). Terima kasih juga kepada koordinator publikasi buku ini, Haula Sofiana, proof reader Junaidi Simun, Layout M. Nurhidayat dan Desain Cover, Nuri Farikhatin serta tim manajemen Efrida Yasni, Rheza Chintya, dan Cika Tamara, serta koordinator survei, Kurniyadi, Wahed Mannan dan 50 Interviewer yang melakukan wawancara kepada 1200 responden yang tersebar secara proporsional di 34 Provinsi di Indonesia. Mereka semua bekerja keras tanpa lelah dalam mendukung proses studi hingga penerbitan buku ini berjalan dengan baik.

Akhir kata, terima kasih kepada para pihak yang terlibat dan mensupport dalam pelaksanaan survei hingga penerbitan buku ini di mana dalam situasi yang serba terbatas proses studi dapat terlaksana sesuai yang diharapkan. Hasil studi ini telah membantu perluasan pemahaman kita mengenai hubungan solidaritas sosial dan harmoni dengan penanganan pandemi covid-19.

*Selamat membaca.....!*

Jakarta, November 2021

**Idris Hemay**

*Direktur*



## *Pengantar*

### **Direktur KAS Indonesia-Timor Leste**

**K**onrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia-Timor Leste di Indonesia telah bekerjasama dengan Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta selama dua dekade. Bagi kedua organisasi ini, tujuan kerjasama yang terjalin ialah menjembatani negara Muslim terbesar di dunia dengan dunia Barat.

Menyelaraskan Hak Asasi Manusia yang sangat ditekankan di dunia Barat dengan keunikan budaya serta prinsip-prinsip agama Islam di Indonesia merupakan titik berat dari kerjasama ini. Dengan kata lain, inti dari kerjasama ini meliputi dukungan dalam bidang prinsip-prinsip dasar demokrasi, HAM, toleransi beragama, prinsip-prinsip negara hukum serta kesetaraan gender di tengah-tengah masyarakat Islam Indonesia.

Setelah menjalani kerjasama yang baik selama beberapa tahun, pada tahun 2009 CSRC dan KAS berhasil memulai proyek yang unik, yaitu memberi kesempatan kepada guru-guru pesantren dari berbagai daerah di Indonesia untuk mengikuti pelatihan dan berdiskusi secara intensif mengenai toleransi antar budaya dan antar agama, HAM, pendidikan perdamaian, kontra narasi ekstremis, serta kemungkinan menjalani agamanya beriringan dengan dasar-dasar negara dan masyarakat yang demokratis.

Pada akhir 2020, KAS dan CSRC menyelenggarakan survei nasional "Harmoni dan Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi Covid-19". Survei ini bertujuan untuk memetakan dan mendeskripsikan persepsi, sikap dan perilaku masyarakat secara nasional terhadap harmoni, solidaritas sosial, dan harmoni di tengah pandemi Covid-19. Selain itu, survei ini juga bermaksud melihat apakah demografi dan media sosial menjadi faktor yang berpengaruh terhadap integrasi sosial dan harmoni di tengah pandemi ini.

Kami sangat menghargai kerjasama dengan CSRC. Mengingat survei ini dilakukan saat pandemi Covid-19 masih berlangsung di hampir semua wilayah yang membuat wawancara tatap muka sulit dilakukan sepenuhnya, namun CSRC berhasil melakukannya. Survei menggunakan teknik wawancara tatap muka dikombinasikan dengan wawancara via telepon sesuai dengan kondisi demografi responden.

Hasil temuan survei nasional "Harmoni dan Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi Covid-19" menunjukkan bahwa pandemi Covid-19 tidak mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintah dan tidak menggerus solidaritas mereka terhadap sesama anak bangsa dalam menghadapi krisis pandemi yang multidimensional ini. Namun, selaras dengan nilai gotong royong yang dikenal sebagai kearifan lokal khas Indonesia, survei ini menunjukkan sikap timbal-balik (*reciprocity*) dalam membantu sesama sebagai sikap paling menonjol selama pandemi ini. Begitu pula halnya dengan harmoni keagamaan, pandemi tidak mengurangi sikap toleransi masyarakat kepada kelompok agama yang berbeda, tidak mengurangi sikap anti kekerasan, dan dukungan mereka terhadap HAM dan kebebasan beragama. Berdasarkan hasil temuan dan laporan hasil survei di atas kami sepakat untuk menerbitkan dan mempublikasikan hasil survei tersebut dalam bentuk buku, dengan judul "Harmoni dan Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi Covid-19".



Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Indonesia-Timor Leste mengucapkan terima kasih dan apresiasi tertinggi kepada Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan kepada berbagai pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan survei dan penerbitan buku ini. Serta, tidak lupa kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Kementerian Dalam Negeri RI selaku mitra utama KAS Indonesia yang telah mendukung kerjasama dan kegiatan-kegiatan KAS-CSRC.

Semoga buku ini bisa menjadi salah satu langkah penting dalam mengupayakan masyarakat Indonesia yang hidup damai dalam keragaman, merdeka dalam kebebasan, bermartabat dalam kehidupan demokrasi konstitusional. Harapan penting lainnya, terjalin sikap saling menerima perbedaan identitas dalam menghadapi krisis, dalam hal ini pandemi Covid-19, sehingga solidaritas dan harmoni keagamaan tetap terjalin di Indonesia.

November 2021

**Jan Senkyr**

Direktur KAS untuk Indonesia dan Timor-Leste



*Bab 1*

## **SOLIDARITAS SOSIAL, AGAMA, DAN MEDIA SOSIAL DI MASA PANDEMI**

*Oleh: Irfan Abubakar & Idris Hemay*

**P**andemi Covid-19 telah menjadi salah satu wabah penyakit yang sangat massif dalam sejarah umat manusia —hingga 15 Juli 2021 tercatat 188 juta kasus di seluruh dunia dengan 4,6 juta dinyatakan meninggal.<sup>1</sup> Sejak Covid-19 diumumkan sebagai pandemi oleh WHO pada Maret 2020, pemerintah Indonesia telah mengambil sejumlah langkah penanggulangan. Dalam rangka pencegahan, pemerintah mengampanyekan protokol kesehatan (prokes): jaga jarak sosial, mengenakan masker di tempat umum, cuci tangan, isolasi mandiri, hingga vaksinasi, yang baru berhasil dijalankan di awal tahun 2021. Sedangkan untuk pengendalian, pemerintah menjalankan sejumlah kebijakan, seperti penelusuran kontak, menggalakkan test, pembatasan perjalanan, larangan berkerumun, hingga kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar), yang pada Juli 2021 dilanjutkan dengan kebijakan PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Di tengah upaya penanganan pandemi oleh pemerintah, muncul pertanyaan bagaimana peran dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi

---

<sup>1</sup> Pada saat survei nasional Solidaritas Sosial dan Harmoni di tengah pandemi yang diadakan CSRC UIN Jakarta dan KAS Indonesia dan Timor-Leste selama Bulan Oktober-Nopember 2020, WHO melaporkan per 5 Nopember 2020 47,9 juta orang positif Covid-19 di seluruh dunia dan 1,2 juta jiwa meninggal karenanya (<https://covid19.who.int/> diakses 23 Oktober 2020).

bencana yang karakteristik penanganannya tidak sama dengan bencana-bencana alam lainnya?

Banyak pendapat yang meyakini kebijakan penanganan pandemi oleh pemerintah tidak akan efektif kalau tidak didukung oleh masyarakat. Wujud dukungan masyarakat yang paling utama: menaati protokol kesehatan di tempat umum, seperti mengenakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, serta mengikuti kebijakan-kebijakan pengendalian penyebaran virus. Selain itu, warga ikut meringankan beban anggota masyarakat yang terkena dampak, dengan memberikan bantuan makanan, obat-obatan, vitamin, dan alat-alat kesehatan yang dibutuhkan. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan penanggulangan pandemi menunjukkan adanya kepercayaan kepada pengambil kebijakan dan solidaritas sosial di antara warga masyarakat sendiri.

Namun, selama pandemi berlangsung, kita menyaksikan berbagai gejala terganggunya kepercayaan dan harmoni dalam masyarakat. Disinformasi dan hoaks tentang Covid-19 banyak beredar di media sosial (medsos) (Prastiwi 2021). Disinformasi dan hoaks tersebut *tak pelak* memengaruhi perilaku dan sikap sebagian masyarakat sehingga salah kaprah dan panik. Sebagian warga seperti yang dilaporkan media bertindak melampaui batas memproteksi dirinya sehingga menyulitkan tenaga kesehatan menjalankan tugasnya. Dalam situasi diliputi kepanikan, beberapa anggota keluarga mengambil paksa mayat korban Covid-19 dari rumah sakit; di sejumlah daerah, beberapa warga desa menutup akses tempat pemakaman bagi korban Covid-19 dengan dalih takut terjangkit (Kompas, 2021). Demikian, sementara solidaritas sosial dan harmoni sangat fundamental dalam penanganan bencana berskala luas ini, pemahaman kita mengenai isu-isu tersebut masih samar dan terbatas, khususnya dalam konteks penanganan wabah Covid-19.

Pada awal penyebaran Covid-19 di Indonesia, seputar April-Juni 2020, pemerintah belum menyadari urgensi solidaritas sosial dan harmoni dalam penanganan Covid-19. Alih-alih, informasi penyebaran Covid-19 di Indonesia kala itu tidak diberikan secara akurat; otoritas di bidang kesehatan terkesan terlambat mengantisipasi, walaupun WHO dan pakar virus telah mengingatkan potensi penyebaran Covid-19 di negeri tropis ini (Kompas 2020). Setelah kasus positif pertama kali ditemukan di Depok, informasi tentang kebijakan pengendalian dan protokol kesehatan pun masih simpang siur; sejumlah pemerintah daerah terlihat melakukan kebijakan *lock down* secara sendiri-sendiri, sedangkan sebagian masyarakat masih skeptis dengan keberadaan Covid-19 (CNN Indonesia 2020; Marina 2021).

Baru setelah lewat setahun pandemi, yaitu April-Mei 2021, pemerintah pusat mulai menekankan urgensi solidaritas sosial. Menguatnya kesadaran ini terlebih dipicu oleh kemunculan Varian Delta, sebuah strain virus Corona yg pertama kali ditemukan di India, yang penyebarannya menurut ahli 6 kali lebih cepat dibandingkan dengan varian sebelumnya. Wakil Presiden RI dalam pidatonya pada 22 Mei 2021, menekankan pentingnya solidaritas sosial dalam penanganan wabah Covid-19. Wapres menegaskan, “tanpa bantuan dan solidaritas dari warga negara mustahil hal ini bisa ditangani dengan cepat” (Kominfo 2021).

Di dunia akademik, studi tentang solidaritas sosial dan harmoni dalam menghadapi pandemi Covid-19 mulai dirasakan urgensinya. Diskusi tentang solidaritas sosial dalam menghadapi pandemi mulai digelar di beberapa kampus, meskipun jumlahnya masih sangat terbatas. Beberapa studi menekankan urgensi solidaritas sosial berbasis komunitas dan kearifan lokal dalam penanggulangan pandemi (Misalnya, Probosiwi dan Putri 2021). Di luar negeri, khususnya di Eropa dan Asia, studi-studi menunjukkan solidaritas

sosial berkontribusi dalam mengurangi tingkat keparahan penyebaran virus dan membantu penanganannya. Hal itu mengingatkan kepercayaan sosial dan kepercayaan politik yang menjadi komponen solidaritas sosial berkorelasi dengan ketaatan masyarakat dalam menjalankan protokol kesehatan. (Schrad 2020; Bongoh dan Hwang 2020; Woelfert dan Kunst 2020). Namun, menurut studi lain, kepercayaan sosial (*Social Trust*) dan kepercayaan politik (*Political Trust*) yang berlebihan bisa berdampak kontraproduktif. Pasalnya, dengan kepercayaan sosial dan politik yang terlalu tinggi, sebagian warga mudah mengabaikan inisiatif individual dalam menjalankan proses lantaran terlalu bergantung kepada kemampuan pemerintah atau terlalu optimistik dengan kapasitas masyarakat sendiri (Wong dan Jensen 2020; Min 2020).

#### **A. Solidaritas Sosial di Tengah Pandemi**

Solidaritas sosial di masa pandemi adalah isu utama yang ditelisik dalam buku ini. Tujuannya untuk memahami bagaimana kepercayaan sosial dan politik di masyarakat berperan dalam penanggulangan Covid-19. Para ahli sosiologi modern telah menaruh perhatian pada kepercayaan sosial dan politik karena keduanya berfungsi menciptakan kohesi sosial, integrasi sosial dan stabilitas politik (Newton, Stolle, dan Zmerli 2018). Kepercayaan sosial (*Social Trust*) mengacu kepada sikap dan perilaku anggota masyarakat yang memercayai warga lain, walaupun orang yang dipercaya itu tidak punya hubungan keluarga, bukan teman dekat, dan bukan pula kolega organisasi sosial atau politik. Sedangkan kepercayaan vertikal (*Political Trust*) adalah sikap dan perilaku warga masyarakat yang memercayai dan menaati kebijakan dan peraturan pemerintah. Kedua dimensi kepercayaan tersebut sangat diperlukan agar program pencegahan dan pengendalian pandemi Covid-19 dapat berhasil maksimal. Pada tataran implementasi,

ditemukan bahwa kepercayaan sosial dan politik dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat sehingga lebih adaptif dengan situasi pandemi (Pagliaro dkk. 2021).

Kepercayaan lahir dari sikap moral seseorang bahwa orang lain pada dasarnya tidak bermaksud membahayakan dirinya, dan kalau bisa, berusaha peduli dengan keadaan dirinya (Delhey dan Newton 2005). Meski demikian, kepercayaan dalam tataran praktis tidak selamanya ajeg; pengalaman nyata dalam berinteraksi dengan sesama berpengaruh dalam menentukan kualitas solidaritas sosial. Konflik sosial dan komunal yang berlarut-larut karena pertentangan kepentingan dan prasangka etnik dan agama telah memperlemah solidaritas sosial.

Di sisi lain, semakin intens komunikasi dan kerjasama terjadi di masyarakat, semakin besar kepercayaan sosial dan politik dapat dibangun. Robert Putnam, salah seorang sosiolog yang percaya dengan teori ini, berpendapat bahwa praktik kedermawanan sosial telah berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan di kalangan masyarakat. Menurutnya, lembaga-lembaga keagamaan dan kelompok-kelompok kewargaan dengan berbagai aktivitas filantropinya telah berperan aktif dalam membangun dan merawat solidaritas sosial (Putnam 2001; Putnam, Leonardi, dan Nanetti 1994).

Namun di sini masalahnya, bagaimana meningkatkan kepercayaan sosial dan politik di masa pandemi, sementara warga dan anggota masyarakat diwajibkan menjaga jarak demi mencegah penyebaran virus?. Dilemanya di sini, anggota masyarakat selama ini menempa solidaritas sosial di tengah komunitas melalui kegiatan-kegiatan yang mengharuskan mereka berkumpul dan bertatap muka: dari kegiatan pengajian, mengunjungi saudara atau teman yang sakit, melayat keluarga

yang berduka, menghadiri pesta pernikahan dan khitanan, hingga mengikuti arisan. Semua kegiatan itu disadari telah mempererat silaturahmi atau dalam bahasa sosiologi, meningkatkan solidaritas sosial. Di masa pandemi ini, solidaritas sosial dalam bentuk-bentuk interaksi sosial yang normal seperti itu justru dibatasi karena diyakini berpotensi mempermudah penyebaran Covid-19. Berkaca pada pengalaman solidaritas sosial di masa pandemi, kita patut menilai ulang konsep tradisional solidaritas sosial yang unsurnya bertumpu pada interaksi tatap-muka.

Apakah kepercayaan sosial dan politik dalam masyarakat telah tergerus karena keharusan jaga jarak sosial selama masa pandemi? Menjawab pertanyaan ini kita perlu mempertimbangkan kebiasaan baru di abad ke-21 di mana manusia kontemporer berinteraksi melalui komunikasi digital. Meskipun akses terhadap internet belum menyeluruh di semua warga, dapat dipastikan mayoritas telah menggunakan *Smart Phone* dan bertukar pesan lewat aplikasi WhatsApp yang penggunaannya sangat luas. Jaga jarak sosial tidak serta merta membuat komunikasi terhambat. Dalam kasus di perkotaan, warga masyarakat urban dapat tetap berkumpul dan bertatap-muka dengan kolega kerja, keluarga jauh, atau anggota warga lain melalui aplikasi digital, seperti Zoom. Selain email yang telah relatif dikenal lebih awal, platform media sosial, seperti Facebook, Twitter, Line, Instagram, dan Youtube, telah memberikan para penggunanya pilihan media sosial yang variatif. Pertanyaannya, apakah bentuk baru komunikasi ini dapat menggantikan komunikasi luring (*offline*) sebagai komponen penting bagi terpeliharanya solidaritas sosial?

Salah satu bentuk solidaritas sosial adalah kesukarelaan untuk membantu orang lain atau berderma dengan memberikan



uang, makanan, barang atau bantuan lain (Uslaner 2002). Sebelum masa pandemi, aktivitas kedermawanan sosial merupakan bagian dari tradisi kesukarelaan di semua umat beragama. Umat Islam mengeluarkan zakat, infak, dan sadaqah hampir di setiap kesempatan, namun kegiatan filantropi Islam meningkat kuantitasnya selama bulan Puasa Ramadan (Abubakar dan Bamualim 2006). Di luar konteks keagamaan, masyarakat umumnya memberikan bantuan kepada korban bencana alam.

Setelah munculnya pandemi Covid-19 awal tahun 2020, kegiatan membantu sesama tetap berlangsung walaupun yang terdampak hampir seluruh lapisan masyarakat (Tim Peneliti CSRC UIN Jakarta 2020). Bantuan sosial yang diberikan tidak hanya dalam bentuk uang, tapi juga makanan, obat-obatan, vitamin, dan alat-alat kesehatan. Walaupun minus tatap muka, solidaritas sosial tidak tergerus, tapi menyesuaikan diri dengan situasi pandemi. Kita menyaksikan lewat tayangan TV beberapa warga komunitas RT dan RW mengorganisir pemberian bantuan makanan dan vitamin kepada tetangga yang tengah melakukan isolasi mandiri di rumahnya. Bantuan disangkutkan di pagar rumah untuk menghindari kontak fisik. Itu cerita kedermawanan di tengah komunitas, lain lagi cerita kedermawanan sosial yang dihimpun dan didistribusikan oleh lembaga-lembaga filantropi dan ormas-ormas keagamaan selama pandemi.

## **B. Kepercayaan kepada Pemerintah dan Polarisasi Politik**

Banyak orang yang mengeluhkan bahwa di tengah krisis pandemi Covid-19 yang begitu mematikan, sebagian kelompok masyarakat masih merawat antagonisme politik sisa-sisa kampanye Pilpres 2019. Sikap para pendukung kubu Pilpres disesalkan karena mereka enggan bersatu dan melupakan

perbedaan dan ketegangan politik sebelumnya. Alih-alih, mereka tidak menjadikan pandemi ini sebagai momen berharga untuk meningkatkan solidaritas sosial dan melupakan pengkubuan politik (Suara.com 2020; Sari 2021; Tribunnews 2020; Antara 2021). Pembelahan politik di medsos masih berlanjut dengan mengusung politik identitas keagamaan yang oleh sejumlah pengamat ditengarai mengusung ideologi Islamis vs pluralis (Gustomy 2020). Beberapa orang meyakini bahwa masih kuatnya pengkubuan politik ini telah berimbas pada lambatnya bangsa Indonesia keluar dari krisis kesehatan dan ekonomi akibat pandemi (Cahaya 2021; JPPN 2021).

Polarisasi politik memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan ketaatan orang pada prokes dan kebijakan penanganan Covid-19 oleh pemerintah. Namun, cukup banyak ahli yang meyakini polarisasi politik telah ikut mewarnai kepercayaan politik kepada pemerintah. Dalam survei kepercayaan politik dan solidaritas sosial tahun 2020 lalu ditemukan bahwa warga yang pada Pilpres 2019 tidak memilih Jokowi, cenderung tidak percaya dengan kemampuan pemerintah menangani pandemi dan karenanya tidak percaya dengan kebijakan yang diambilnya (Tim Peneliti CSRC UIN Jakarta 2020). Survei lain juga menunjukkan di daerah-daerah Provinsi yang Gubernurnya berasal dari partai oposisi cenderung membuat kebijakan yang tidak selaras dengan kebijakan pemerintahan pusat (Muhtadi dan Soderborg 2020). Meskipun demikian, harus dikatakan bahwa ketaatan orang pada prokes selama pandemi tidak lantas semata-mata ditentukan oleh dukungan elektoral pada Pilpres 2019.

Studi di beberapa negara lain menunjukkan bahwa kepercayaan politik bukan satu-satunya dan tidak selamanya menentukan ketaatan warga menjalankan prokes. Di Inggris,

misalnya, pada fase awal pandemi, terdapat korelasi antara dukungan kepada pemerintah dengan ketaatan. Mereka yang mendukung pemerintah pada pemilihan elektoral cenderung taat Prokes. Begitu pula sebaliknya, pendukung partai oposisi tidak taat. Namun, setelah berlalunya waktu, di mana masyarakat mulai meningkat kesadarannya akan bahaya Covid-19, makin banyak warga yang menggunakan masker di tempat umum. Namun sikap tersebut bukan didorong oleh meningkatnya kepercayaan kepada pemerintah, melainkan karena meningkatnya kesadaran individual terhadap urgensi prokes (Woelfert dan Kunst 2020). Apakah di Indonesia hal yang sama dapat dibandingkan?. Jawabannya tentu saja bisa, meskipun hingga saat ini belum ada survei yang mengukur perubahan ketaatan dan hubungannya dengan kesadaran pribadi.

Terlepas dari hal di atas, sejumlah pemerhati politik mengkhawatirkan berlarut-larutnya polarisasi politik di Indonesia. Mereka mengingatkan bahwa kondisi ini tidak hanya memperlambat pemulihan kesehatan dan kehidupan ekonomi, tapi juga mengancam agenda konsolidasi demokrasi. Banyak yang menanyakan mengapa hal ini berlarut-larut?. Salah satu jawabnya, sulitnya aktor politik menahan diri dari godaan penggunaan politik identitas sebagai jalan pintas meraih kekuasaan politik. Kebutuhan politik jangka pendek ini menurut peneliti LIPI, Nurhasim, memaksa sejumlah partai dan aktor politik untuk mempolitikasi wacana identitas keagamaan dan etnis melalui propaganda kebencian yang mengusung perbedaan ideologi. Polarisasi politik tidak hanya terjadi di level elit, tapi telah menjalar ke arus bawah di masyarakat (Nurhasim 2021).

Sebagian pengamat menilai polarisasi politik gagal

dimitigasi meskipun pemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf telah berusaha mengurangnya. Namun, pengamat lain menilai sebaliknya. Menurut mereka, pemerintah tidak sepenuhnya gagal; meskipun tidak hilang sama sekali, polarisasi politik justru berhasil dikurangi skalanya. Diajaknya Prabowo Subianto, kontestan Pilpres 2019, dan pasangannya Sandiogo Uno, ke dalam Kabinet Presiden Jokowi, telah berkontribusi menurunkan suhu politik dan mengurangi skala polarisasi di level akar rumput. Andaikata pasangan tersebut masih berdiri sebagai oposisi mungkin polarisasi politik akan berlangsung dengan skala yang lebih massif daripada yang sekarang terjadi.

Bagaimana memahami pelibatan oposisi ke dalam pemerintahan dan hubungannya dengan kepercayaan vertikal atau politik?. Sejumlah Sosiolog menunjukkan ada sejumlah faktor langsung dan tidak langsung yang mendorong kepercayaan kepada pemerintah. Faktor langsung terutama adanya pengakuan dan inklusi disamping komunikasi yang intens dan upaya saling memahami (Portes dan Landolt 1996; Freitag 2003). Sedangkan faktor tidak langsung mencakup kuat tidaknya prasangka dan sentimen berbasis identitas (Hernández-Lagos dan Minor 2020). Dengan pelibatan kedua tokoh politik yang berpengaruh di atas, maka dapatlah diharapkan penguatan faktor inklusi, komunikasi dan saling memahami. Pada gilirannya menguatnya faktor-faktor langsung tersebut dapat mengimbangi faktor prasangka dan sentimen keagamaan yang dapat menggorogoti kepercayaan politik yang diperlukan dalam penanggulangan wabah pandemi ini.

Hingga akhir kuartal kedua tahun 2021, pemerintah terus menggenjot program vaksinasi meskipun dibayang-bayangi oleh adanya isu penolakan, yang menggambarkan

ketidakpercayaan politik. Jumlah warga yang mengikuti vaksinasi terus bertambah, meskipun pergerakan jumlah penerima vaksin masih tergolong lamban. Namun, kelambanan itu lebih banyak disebabkan oleh ketersediaan vaksin daripada karena isu ketidakpercayaan politik. Hingga 16 Agustus 2021 jumlah warga yang telah divaksin Tahap I mencapai 26% dari target vaksin yang berjumlah 208,26 juta jiwa; sedangkan, untuk Tahap II baru mencapai 13,6% (COVID-19 2021b). Namun, menurut *Our World in Data*, jumlah orang Indonesia yang telah divaksin secara penuh per 16 Agustus 2021 baru mencapai 10% atau 20,8 juta jiwa. Secara presentase jumlah itu masih jauh dibandingkan dengan negara jiran, Malaysia, yang per tanggal yang sama, total penerima vaksin penuh (I & II) mencapai 34,6% dari 28,3 juta target vaksin (Ritchie dkk. 2020).

### C. Peran Agama dalam Penanggulangan Covid-19

Di negara-negara Barat yang sekuler, relasi agama dengan pandemi jarang diangkat dalam perdebatan, kecuali dibahas di kalangan elit akademis atau lembaga *civil society* tertentu. Pemerintah dan kalangan politisinya masih melihat dengan bias sekuler di mana kegiatan keagamaan dianggap berpotensi memudahkan penyebaran virus karena tipe kegiatannya mengundang berkumpulnya massa. Bukti yang biasa dijadikan contoh adalah kasus penyebaran virus di Korea Selatan yang bermula dari kegiatan ibadah di sebuah gereja yang jemaatnya mengabaikan Prokes (Karam, Oldfield, dan Walters 2020). Namun dalam kenyataan, tidak bisa dipungkiri jaringan organisasi keagamaan di Eropa dan Amerika, seperti Karitas dan World Vision, termasuk yang paling aktif menggalang dana sumbangan dan menyalurkannya untuk masyarakat. Momen Covid ini telah membuka mata pemerintah Barat akan peran penting agama dan mempertimbangkan untuk kolaborasi (Karam, Oldfield, dan Walters 2020).

Sementara di Indonesia, pemerintah dan politisi lebih positif menilai peran agama, dan sebaliknya lebih berhati-hati dalam menyikapi isu potensi penyebaran Covid melalui aktivitas keagamaan. Selain menjalankan programnya melalui Kementerian Agama RI, pemerintah menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga agama untuk memperoleh dukungan masyarakat bagi suksesnya kebijakan penanggulangan pandemi. Meskipun terbilang lambat, pemerintah telah mengajak MUI dan jaringannya dalam upaya mempercepat pelaksanaan vaksinasi yang melibatkan komunitas keagamaan. Mungkin inisiatif ini diambil karena pemerintah telah menangkap skeptisme sejumlah aktor keagamaan yang mencurigainya melakukan *double standard* dalam pembatasan aktivitas keagamaan: meminta masyarakat beribadah di rumah, tapi melonggarkan kegiatan *shopping* di pasar dan mal, padahal sama-sama mengundang kerumunan massa.

Dari beberapa pemberitaan televisi dan medsos di Indonesia diketahui memang ada sejumlah masjid yang meskipun berada di zona merah tetap menyelenggarakan ibadah salat jumat. Terlepas dari kasus tersebut, pada tataran diskursus, lembaga-lembaga agama telah memainkan peran positif dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Para elit agama telah ikut meningkatkan literasi umat beragama terkait Covid-19 serta mengampanyekan pentingnya menaati prokes dan mematuhi kebijakan pengendalian virus oleh pemerintah. Selain itu, organisasi keagamaan tetap menjalankan peran vitalnya dalam menanamkan penguatan mental spiritual kepada para jamaah dalam menghadapi tekanan psikologis akibat krisis pandemi. Para ulama, pendeta, biksu, dan sebagainya, memiliki kompetensi dalam menjalankan peran ini, meskipun warga masyarakat dapat meminta nasihat psikolog

atau psikiater untuk mengatasi gangguan psikologis selama pandemi.

Di kalangan umat Islam, misalnya, ajaran Takdir telah membantu mereka melewati krisis selama pandemi. Dengan ajaran Takdir mereka meyakini bahwa segala musibah yang menimpa manusia telah menjadi ketentuan Tuhan; tidak mungkin manusia menolak atau menentanginya. Yang bisa dilakukan manusia hanya menerima ketentuan tersebut dengan ikhlas sembari tetap berharap diberikan jalan keluar yang terbaik. Dengan mekanisme psikologis seperti ini umat dapat mengelola stress dengan baik, sementara para muballigh pada dasarnya berfungsi memperkuat sikap mental tersebut.

Salah satu lembaga keagamaan yang berperan dalam penanggulangan krisis pandemi adalah Majelis Ulama Indonesia (MUI). Menurut pimpinannya, selama pandemi MUI telah menjalankan perannya sebagai *khadimul ummah*, pemberi layanan keagamaan kepada umat. Dalam perspektif ini, MUI telah mengeluarkan fatwa-fatwa yang memperjelas kedudukan hukum berbagai isu seputar Covid-19 menurut kacamata Islam (Fiqih). Selama 2020-2021 MUI telah mengeluarkan 13 Fatwa terkait Covid-19, mulai dari kedudukan hukum Test PCR hingga kebolehan menerima suntik vaksin yang didalamnya dicurigai mengandung unsur yang diharamkan dalam Islam (Fatwa MUI 2021b; 2021a). Pendek kata, MUI berperan meningkatkan literasi keagamaan umat mengenai vaksin di tengah situasi ketidakpercayaan sebagian dengan keberadaan Covid-19 dan penolakan mereka menjalankan proses karena alasan keagamaan (Abdul Hakim 2021; Nafis 2021).

Sebagai bangsa yang religius, warga Indonesia menyikapi pandemi Covid-19 selaras dengan keyakinan agamanya.

Namun, survei menunjukkan tidak sedikit warga (28%) yang merespon pandemi ini dengan hanya berpasrah pada Takdir Tuhan tanpa ada usaha untuk menaati prokes (Tim Peneliti CSRC UIN Jakarta 2020). Pada tingkat yang ekstrim model keyakinan fatalistik (Jabariyah) ini telah mendorong beberapa orang, termasuk aktor agama, mendemonstrasikan perilaku abai prokes semata-mata untuk membuktikan klaimnya. Namun, beberapa kasus menunjukkan orang-orang yang fatalistik tersebut pada akhirnya dinyatakan positif Covid-19.

MUI dalam kapasitasnya sebagai pelayan umat (*khadimul ummah*) menyadari adanya ambivalensi dan kadang kontradiksi antara keyakinan agama dan penjelasan sains mengenai fenomena Covid-19. Para ulama di MUI mencoba mengatasi ketegangan antara perspektif teologis vs perspektif sains ini dengan menggunakan bahasa agama agar lebih mudah diterima dengan baik di kalangan umat. Menurut Kyai Cholil Nafis, salah seorang pengurus MUI, sikap keagamaan terbaik dalam merespon Covid-19 adalah berimbang antara percaya pada ketentuan Tuhan dan menjalankan prokes sebagai bentuk ikhtiar manusiawi. Menurutnya, Islam justru melarang sikap pasrah tanpa usaha karena hakikat manusia adalah makhluk yang berada dalam *maqam asbab* (tunduk kepada sebab-akibat); mayoritas manusia tidak berada dalam *maqam tajrid* (terlepas dari sebab-akibat) (Nafis 2021). Kyai Cholil ketika menyebut *maqam tajrid* mungkin merujuk kepada sejumlah figur, yang karena keutamaannya di mata Tuhan, terlepas dari hukum kausalitas, seperti para Nabi dan Waliyullah. Namun keutamaan seperti itu dianugerahkan Tuhan hanya kepada beberapa manusia terpilih saja. Sedangkan manusia umumnya harus tunduk kepada hukum kausalitas.



Selain meningkatkan literasi keagamaan Covid-19 dan memperkuat mental spiritual, lembaga keagamaan juga berperan dalam membantu pengadaan obat-obatan dan alat-alat kesehatan, serta membantu pemulihan dampak ekonomi terutama bagi masyarakat menengah ke bawah. Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama (NU) di antara Ormas keagamaan di Indonesia yang berperan aktif dalam kegiatan di atas. Muhammadiyah secara khusus membentuk pusat krisis pandemi yang diberi nama Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC). Pusat krisis ini diarahkan untuk mengkoordinir semua program penanggulangan Covid yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan jaringannya. Selain itu, MCCC menyediakan panduan-panduan dan SOP dalam pengelolaan pendidikan yang dikelola Muhammadiyah selama pandemi (Latief 2021). Sementara itu, Nahdlatul Ulama, selain membantu penyaluran bantuan alat-alat kesehatan di wilayah-wilayah yang paling membutuhkan, juga menfokuskan kebijakan pelaksanaan prokes di pesantren-pesantren NU yang jumlahnya ribuan (Wardah 2021).

#### **D. Solidaritas Lintas Agama di Tengah Pandemi**

Ada pertanyaan mengusik, apakah momen pandemi ini mendorong umat lintas agama untuk meningkatkan solidaritas dan harmoni keagamaan? Pertanyaan ini perlu dijawab dengan melihat pada dua konteks yang berbeda: konteks kewargaan dan konteks organisasi keagamaan. Pada tataran kewargaan, ditemukan dalam sejumlah survei bahwa publik cenderung memelihara solidaritasnya selama pandemi tanpa melihat identitas keagamaan. Warga di RT/RW membantu tetangganya yang terdampak Covid-19 tanpa melihat apa agamanya (Tim Peneliti CSRC UIN Jakarta 2020). Namun, pada tataran kelembagaan, tidak ada indikasi gerakan yang berarti dalam

mendorong kolaborasi lintas agama untuk mengatasi pandemi. Tidak tampak adanya forum yang diinisiasi para tokoh lintas agama menyampaikan pernyataan bersama guna mendorong pemerintah meningkatkan kinerjanya dalam mengatasi pandemi. Tidak juga tampak gerakan lintas agama yang melakukan kolaborasi dalam mengampanyekan Prokes. Meski demikian, kita diinformasikan bahwa dalam skala terbatas sejumlah Ormas Keagamaan, NU, Budha Suci (Tzu Chi), dan lain lain, telah berkolaborasi dalam penyaluran bantuan alat kesehatan dan sembako kepada kaum miskin (Wardah 2021).

Tampaknya organisasi keagamaan lebih memprioritaskan pelayanan umatnya masing-masing secara langsung daripada melalui kolaborasi lintas agama. Mungkin pertimbangannya, krisis pandemi ini menuntut jaringan organisasi keagamaan bergerak cepat untuk menjangkau umatnya masing-masing, dan sikap responsif itulah yang diharapkan oleh umat kepada mereka. Selain itu, mereka menganggap tidak ada cukup waktu untuk melakukan kerja-kerja kederewanan dalam kerangka lintas agama. Di samping itu, mereka berharap dapat berkolaborasi dengan pemerintah karena memiliki sumber daya yang lebih memadai.

Solidaritas lintas agama dalam penanganan krisis pandemi Covid-19 telah menjadi perhatian para aktivis harmoni keagamaan internasional. Mereka menilai krisis kemanusiaan pandemi ini seharusnya dijadikan sebagai momen dimana umat beragama meningkatkan harmoni keagamaan, toleransi, dan perlindungan terhadap kelompok-kelompok minoritas keagamaan. Namun demikian, pada tataran global, ide di atas masih sebatas harapan belaka. Azza M. Karam, salah satu tokoh lintas agama internasional, menilai sudah saatnya organisasi keagamaan tidak hanya sebatas melayani umatnya,

tapi juga menggalang kolaborasi lintas agama untuk membantu krisis kemanusiaan ini (Karam, Oldfield, dan Walters 2020).

#### **E. Media Sosial di Tengah Pandemi: Misinformasi dan Disinformasi**

Peran media sosial (medsos) di tengah pandemi adalah isu yang tidak bisa dikesampingkan mengingat hampir mustahil kita melepaskan diri dari medsos dalam komunikasi sehari-hari. Di Indonesia sendiri, pengguna medsos hingga tahun 2019 tercatat mencapai 150 juta orang. Menurut riset CupoNation, jumlah tersebut masuk ranking keempat terbesar di dunia setelah India, Amerika Serikat, dan Brazil (Tribunnews.com 2019). Sementara itu, menurut survei baru-baru ini (2020), lima aplikasi medsos yang paling sering diakses di Indonesia secara berturut-turut: WhatsApp, Youtube, Instagram, Facebook, dan Twitter (Tim Peneliti CSRC UIN Jakarta 2020).

Banyak perhatian diberikan kepada pengaruh negatif media sosial dalam kehidupan sosial, politik, dan hari ini, kesehatan publik. Peralunya, kita hampir tidak bisa menghindari informasi yang salah, bohong atau menyesatkan dalam komunikasi sehari-hari di medsos. Memang harus diakui banyak juga hal positif yang diperoleh dengan hadirnya medsos. Antara lain kita dapat menerima informasi secara cepat dan tanpa dibatasi ruang dan waktu. Selain itu, kita juga dapat berpartisipasi membuat, menyampaikan atau membagi informasi ataupun pengetahuan yang bermanfaat kepada kolega, keluarga, atau khalayak. Pendek kata, kita menikmati demokratisasi dalam dunia informasi. Namun, setara dengan manfaatnya, medsos juga berpotensi menghadirkan mudharat lewat beredarnya berita palsu (*fake news*), apakah dalam bentuk misinformasi atau disinformasi yang ternyata tidak mudah dikoreksi atau diklarifikasi.

Wajar kalau banyak orang skeptis dengan medsos karena memang medsos memiliki karakter yang memungkinkan terjadinya misinformasi dan disinformasi. Di satu sisi, aplikasi medsos, seperti Facebook, Twitter, dan Youtube, setiap saat dibanjiri arus bah informasi sehingga sangat berat melakukan penyaringan dan koreksi seperti yang diharapkan (Chadwick dan Vaccari 2019). Di sisi lain, karena karakter medsos sebagai platform publik, setiap orang atau *outlet* dapat membagi informasi tanpa harus bertanggungjawab melakukan pengecekan fakta terlebih dahulu. *Tak pelak*, urusan mengecek berpulang kepada pengguna, apakah info yang diterimanya valid atau hoaks. Di sini masalahnya, dengan jumlah informasi yang *overload* sementara waktu yang dimiliki terbatas mustahil bagi pengguna untuk selalu melakukan pengecekan (Chadwick dan Vaccari 2019).

Studi sikap orang Indonesia terhadap medsos menunjukkan cukup banyak warga yang tidak percaya dengan informasi Covid-19 yang beredar di medsos (55%). Sementara yang percaya juga tidak sedikit (36%), dan sisanya (9%) bersikap netral. Artinya skeptisisme terhadap medsos cukup besar, meskipun potensi untuk menerima hoaks tanpa pengecekan juga tidak kecil. Namun, masalahnya, mayoritas pengguna medsos di Indonesia tidak melakukan pengecekan fakta terhadap informasi Covid-19 yang diterimanya di medsos (68%) sehingga rawan termakan hoaks. Hanya 32% warga yang melakukan pengecekan. Berbanding terbalik dengan sikap terhadap medsos, masyarakat yang percaya kepada media resmi lebih banyak (59%) daripada yang tidak percaya (41%). Media resmi di sini mencakup media cetak, elektronik, dan digital. (Tim Peneliti CSRC UIN Jakarta 2020).

Seperti di belahan bumi yang lain, medsos di Indonesia juga dibanjiri oleh berbagai hoaks, misinformasi dan disinformasi

tentang Covid-19 selama pandemi.<sup>2</sup> Pakar pulmonologi dari UGM mencatat selama pandemi hingga kuartal I 2021, telah beredar sebanyak 23 jenis hoaks tentang Covid-19 mulai dari konspirasi global munculnya Covid-19, cara penyebaran dan pengobatan Covid-19, hingga bahaya vaksinasi bagi kesehatan (Prastiwi 2021). Tidak mudah mengenali motif dari penyebar berita hoaks, misinformasi dan disinformasi di medsos. Namun, sejumlah ahli komunikasi di medsos mengidentifikasi beberapa motif dan memetakannya ke dalam dua kategori. *Pertama*, motif memengaruhi dan membentuk opini publik terhadap sebuah isu. *Kedua*, motif menipu dan membohongi pengguna atau publik demi mendapatkan keuntungan ekonomi dan sosial. Kedua motif tersebut mendorong orang menyebarkan konten yang menyesatkan dan bohong baik dalam bentuk hoaks, teori konspirasi, laporan yang dibuat-buat, dan *headline* yang bombastis (*click-bait headlines*) —(Chadwick dan Vaccari 2019). Bentuk yang terakhir banyak dijumpai di Youtube dimana judul berita dibuat bombastis, jauh dari konten sebenarnya, dengan maksud agar pengguna terpancing melakukan *click*, sehingga dapat menaikkan jumlah *viewer* pemilik akun.

Tidak dipungkiri hoaks tentang Covid-19 yang beredar di medsos sedikit banyak memengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap prokes dan kebijakan pemerintah dalam penanganan Covid-19. Seperti yang disampaikan di muka, banyak masyarakat, terutama di periode awal pandemi, karena

---

<sup>2</sup> Pakar komunikasi medsos membedakan misinformasi dan disinformasi. Misinformasi mengacu kepada konten yang salah atau menyesatkan termasuk hoaks, teori konspirasi, laporan yang dibuat-buat, headline yang bombastis (*click-bait headlines*). Namun konten tersebut tidak sengaja diniatkan untuk menipu dan membohongi pengguna medsos. Tapi sengaja untuk membentuk atau mengubah opini publik terhadap suatu isu. Sementara disinformasi juga sama-sama bentuknya dengan misinformasi, namun bedanya di tujuan menyebarkan. Disinformasi sengaja disebar untuk menipu dan membohongi demi kepentingan pembuat atau penyampai informasi (Chadwick dan Vaccari 2019).

termakan hoaks, misinformasi dan disinformasi, tidak percaya Covid-19, tidak percaya pengobatan di rumah sakit, dan bahkan menyerang tenaga kesehatan. Setelah ditemukan vaksin dan dimulai program vaksinasi, tidak sedikit pula yang percaya begitu saja misinformasi bahwa vaksin dapat menyebabkan kematian bagi penerimanya, sehingga membuat mereka menolak divaksin.

Pemerintah pada dasarnya telah melakukan sejumlah langkah menangkal hoaks dan *fake news* terkait Covid-19 di medsos. Langkah-langkah tersebut ada yang mengambil bentuk kontra hoaks di platform digital di mana pemerintah melalui situs-situs resminya, seperti <http://www.covid19.go.id>, memublikasi daftar hoaks terkait pandemi dan menunjukkan informasi yang sebenarnya. Melalui situs tersebut pemerintah juga membuka layanan *chat* untuk cek *hoax* dan mendorong warga menjadi *hoax buster* atau relawan penangkal hoaks di medsos (COVID-19 2021a). Seorang *hoax buster* dapat menjalankan tugasnya di grup percakapan seperti WA Group, di mana dia akan memeriksa fakta informasi yang masuk pada grup tersebut. Apabila ditemukan hoaks di grup tersebut sang relawan dapat membantu menghindarkan anggota grup termakan hoaks, misinformasi dan disinformasi akibat menerima berita, gambar atau video yang sifatnya palsu atau bohong. Selain melalui pemerintah, media resmi digital seperti Kompas.com, Liputan6.com, Detikcom, Tempo.co, dan banyak media lainnya beraliansi dalam membangun situs untuk cek fakta yang bertujuan menghindarkan masyarakat dari mudharat hoaks yang tersebar melalui media sosial (Mafindo 2019).

Selain itu tokoh-tokoh agama, seperti MUI, juga digandeng untuk membantu membendung hoaks melalui bahasa agama. MUI sendiri bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia

(IDI) melaksanakan program “Salam MUI” yang dilakukan secara daring. Melalui aplikasi “Salam MUI” berbagai hoaks seputar vaksin, misalnya, dapat langsung dijawab. Kalau pertanyaan terkait dengan kesehatan, maka ahli dari IDI akan menjawabnya. Kalau terkait dengan tafsiran agama, maka para ulama di MUI yang akan menjelaskan duduk persoalannya (Khumaidi 2021).

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim, Sudarnoto. 2021. “Peran MUI dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”. Jakarta: Hasil wawancara dengan Irfan Abubakar
- Abubakar, Irfan, dan Chaider S. Bamualim, ed. 2006. *Filantropi Islam dan Keadilan Sosial: Studi tentang Potensi, Tradisi, dan Pemanfaatan Filantropi Islam di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Antara. 2021. “PKS-NasDem sepakat akhiri politik polarisasi demi kualitas demokrasi.” *Antaraneews.com*. 30 April 2021. <https://www.antaraneews.com/berita/2131806/pks-nasdem-sepakat-akhiri-politik-polarisasi-demi-kualitas-demokrasi>.
- Bongoh, dan Sun-Jae Hwang. 2020. “Social Trust in the Midst of Pandemic Crisis: Implications from COVID-19 of South Korea.” *Research in Social Stratification and Mobility* 68 ( Augustus) : 1 0 0 5 2 3 . <https://doi.org/10.1016/j.rssm.2020.100523>.
- Cahya, Bambang Eka. 2021. “Democratization Update of Southeast Asian Countries in the Covid-19 Era.” Dipresentasikan pada Democratization Webinar on Update of Southeast Asian Countries in the Covid-19 Era, 13 April.
- Chadwick, Andrew, dan Cristian Vaccari. 2019. “New O3C Survey Report: News Sharing on UK Social Media: Misinformation, Disinformation & Correction.” *Loughborough University*. 2019. <http://www.lboro.ac.uk/research/online-civic-culture-centre/news-events/articles/o3c-1-survey-report-news-sharing-misinformation/>.



- CNN Indonesia. 2020. “Lockdown Daerah, Simbol Karut-marut Penanganan Corona.” CNN Indonesia. 8 Maret 2020. <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200327161721-20-487625/lockdown-daerah-simbol-karut-marut-penanganan-corona>.
- COVID-19, Website Resmi Penanganan. 2021a. “Awas Hoaks Uni Eropa Hentikan Vaksin COVID-19 Mulai 20 Oktober 2021 - Hoax Buster.” [covid19.go.id](https://covid19.go.id/p/hoax-buster/awas-hoaks-uni-eropa-hentikan-vaksin-covid-19-mulai-20-oktober-2021). 2021. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/awas-hoaks-uni-eropa-hentikan-vaksin-covid-19-mulai-20-oktober-2021>.
- . 2021b. “Data Vaksinasi Covid-19.” [covid19.go.id](https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-16-agustus-2021). Agustus 2021. <https://covid19.go.id/berita/data-vaksinasi-covid-19-update-16-agustus-2021>.
- Delhey, Jan, dan Kenneth Newton. 2005. “Predicting Cross-National Levels of Social Trust: Global Pattern or Nordic Exceptionalism?” *European Sociological Review* 21 (4): 311–27.
- Fatwa MUI. 2021a. “Fatwa MUI: Hukum Penggunaan Vaksin Covid-19 Produk AstraZeneca.” *Majelis Ulama Indonesia (blog)*. 19 Maret 2021. <https://mui.or.id/produk/fatwa/29883/fatwa-mui-hukum-penggunaan-vaksin-covid-19-produk-astrazeneca/>.
- . 2021b. “Fatwa No 23 Tahun 2021: Hukum Tes Swab Untuk Deteksi Covid19 Saat Berpuasa.” *Majelis Ulama Indonesia (blog)*. 11 April 2021. <https://mui.or.id/produk/fatwa/29960/fatwa-no-23-tahun-2021-hukum-tes-swab-untuk-deteksi-covid19-saat-berpuasa/>.
- Freitag, Markus. 2003. “Social Capital in (Dis)Similar Democracies: The Development of Generalized Trust in Japan and

- Switzerland.” *Comparative Political Studies* 36 (8): 936–66.  
<https://doi.org/10.1177/0010414003256116>.
- Gustomy, Rachmad. 2020. “Pandemi ke Infodemi: Polarisasi Politik dalam Wacana Covid-19 Pengguna Twitter.” *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 5 (2): 190–205.  
<https://doi.org/10.14710/jiip.v5i2.8781>.
- Hernández-Lagos, Pablo, dan Dylan Minor. 2020. “Political Identity and Trust.” *Quarterly Journal of Political Science* 15 (3): 337–67.  
<https://doi.org/10.1561/100.00018063>.
- JPPN. 2021. “Mahfuz Kaitkan Terhambatnya Penanganan Covid-19 dengan Pilpres 2019.” [www.jpnn.com](http://www.jpnn.com). 15 Juli 2021.  
<https://www.jpnn.com/news/mahfuz-kaitkan-terhambatnya-penanganan-covid-19-dengan-pilpres-2019>.
- Karam, Azza M., Elizabeth Oldfield, dan James Walters. 2020. “Religious Communities under COVID-19: The First Pandemic of the Postsecular Age?” London School of Economics and Political Science. 25 Juni 2020.  
<https://www.lse.ac.uk/Events/2020/06/202006251430/religious.aspx>.
- Khumaidi, Adib. 2021. “Panduan Kesehatan Masyarakat dalam Menghadapi Pandemi Covid-19 Sesuai Sains dan Syariah.” Dipresentasikan pada Webinar Sosialisasi Gerakan Nasional (Gernas) MUI Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Bali.  
<https://www.youtube.com/watch?v=ZHlzqY6rqII&t=141s>
- Kominfo. “Persaudaraan dan Solidaritas jadi Modal Sosial untuk Keluar dari Pandemi.” [kominfo.go.id](http://kominfo.go.id), 22 Mei 2021.  
<https://www.kominfo.go.id/content/detail/34646/persaudaraan-dan-solidaritas-jadi-modal-sosial-untuk-keluar-dari-pandemi/0/berita>.

- Kompas. 2020a. “Warga Tutup Jalan dan Tolak Pemakaman Jenazah Suspek Covid-19, Camat hingga TNI Polisi Turun Tangan.” Kompas.com. 1 September 2020. <https://regional.kompas.com/read/2020/09/01/09090071/warga-tutup-jalan-dan-tolak-pemakaman-jenazah-suspek-covid-19-camat-hingga>.
- . 2021. “Ambil Paksa Jenazah Pasien Covid-19, Puluhan Warga Datangi Rumah Sakit Halaman all.” Kompas.com. 3 Juli 2021. <https://regional.kompas.com/read/2021/07/03/205603878/ambil-paksa-jenazah-pasien-covid-19-puluhan-warga-datangi-rumah-sakit>.
- Kompas, Kompas Cyber. 2020b. “Pernyataan Kontroversial Menkes Terawan di Awal Pandemi Covid-19 Halaman all.” KOMPAS.com. 29 September 2020. <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/29/16290701/ Pernyataan-kontroversial-menkes-terawan-di-awal-pandemi-covid-19>.
- Latief, Hilman. 2021. “Peran Lazismu dan Muhammadiyah dalam Penanggulangan Pandemi Covid-19”. Jakarta: Hasil wawancara dengan Irfan Abubakar
- Mafindo. 2019. “Cekfakta.” CekFakta. 2019. <https://cekfakta.com/>.
- Marina, Herni. 2021. “Inkonsistensi Kebijakan Pemerintah Pusat Dalam Penanganan Covid-19 Di Indonesia.” *Kemudi: Jurnal Ilmu Pemerintahan* 5 (2).
- Min, Jungwon. 2020. “Does Social Trust Slow down or Speed up the Transmission of COVID-19?” *PLOS ONE* 15 (12): e0244273. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0244273>.
- Muhtadi, Burhanuddin, dan Seth Soderborg. 2020. “Keberpihakan

Politik Mempengaruhi Perilaku Warga Terkait Pandemi Di Wilayah Dengan Konflik Politik Tinggi (Misal Jakarta).” *The Conversation*. 2020. <http://theconversation.com/riset-keberpihakan-politik-mempengaruhi-perilaku-warga-terkait-pandemi-di-wilayah-dengan-konflik-politik-tinggi-misal-jakarta-150877>.

Nafis, Cholil, KH. 2021. “Mengapa Perlu Melayani Umat Saat Pandemi Covid-19.” Dipresentasikan pada Webinar Sosialisasi Gerakan Nasional (Gernas) MUI Penanggulangan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi, Bali. <https://www.youtube.com/watch?v=ZHlqY6rqlI&t=141s>.

Newton, Kenneth, D Stolle, dan Sonja Zmerli. 2018. “Social and political trust.” Dalam *The Oxford Handbook of Social and Political Trust*, disunting oleh Eric M. Uslaner, 37–56. New York, NY: Oxford University Press.

Nurhasim, Moch. 2021. “Demokrasi dan Polarisasi Politik.” *kompas.id*. 26 Februari 2021. <https://www.kompas.id/baca/opini/2021/02/26/demokrasi-dan-polarisasi-politik/>.

Pagliaro, Stefano, Simona Sacchi, Maria Giuseppina Pacilli, Marco Brambilla, Francesca Lionetti, Karim Bettache, Mauro Bianchi, dkk. 2021. “Trust Predicts COVID-19 Prescribed and Discretionary Behavioral Intentions in 23 Countries.” *PLoS ONE* 16 (3) : e0248334. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0248334>.

“Persaudaraan dan Solidaritas jadi Modal Sosial untuk Keluar dari Pandemi.” 2021. [kominfo.go.id](https://www.kominfo.go.id). 22 Mei 2021. <https://www.kominfo.go.id/content/detail/34646/persaudaraan-dan-solidaritas-jadi-modal-sosial-untuk-keluar-dari->

pandemi/0/berita.

Portes, A., dan P. Landolt. 1996. "The Downside of Social Capital." <https://vtechworks.lib.vt.edu/handle/10919/67453>.

Prastiwi, Mahar. 2021. "23 Berita Hoax Seputar Covid-19 dan Penjelasan Pakar Pulmonologi UGM." Static. *Kompas.com*. 25 Maret 2021. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/25/080000171/23-berita-hoax-seputar-covid-19-dan-penjelasan-pakar-pulmonologi-ugm?page=all>.

Probosiwi, Ratih, dan Afrinia Lisditya Putri. 2021. "Jogo Tonggo: Solidaritas Masyarakat di Era Pandemi Covid-19." *SOSIO KONSEPSIA: Jurnal Penelitian dan Pengembangan Kesejahteraan Sosial* 10(2): 177–92.

Putnam, Robert D. 2001. *Bowling Alone*. Simon and Schuster.

Putnam, Robert D., Robert Leonardi, dan Raffaella Y. Nanetti. 1994. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.

Ritchie, Hannah, Esteban Ortiz-Ospina, Diana Beltekian, Edouard Mathieu, Joe Hasell, Bobbie Macdonald, Charlie Giattino, Cameron Appel, Lucas Rodés-Guirao, dan Max Roser. 2020. "Coronavirus Pandemic (COVID-19)." *Our World in Data*, Maret. <https://ourworldindata.org/covid-vaccinations>.

Sari, Haryanti Puspa. 2021. "SBY: Polarisasi Politik dan Sosial di Masyarakat Tak Boleh Dibiarkan." 8 Januari 2021. <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/08/13174591/sby-polarisasi-politik-dan-sosial-di-masyarakat-tak-boleh-dibiarkan>.

Schrad, Mark Lawrence. 2020. "The Secret to Coronavirus Success

Is Trust in Government.” foreignpolicy.com. 15 April 2020.  
<https://foreignpolicy.com/2020/04/15/secret-success-coronavirus-trust-public-policy/>.

“Solidaritas Sosial Untuk Covid-19 Bisa Diwujudkan Dengan Banyak Cara | Universitas Gadjah Mada.” 2021.  
U G M . A c . I d . 1 4 A p r i l 2 0 2 1 .  
<https://www.ugm.ac.id/id/berita/19278-solidaritas-sosial-untuk-covid-19-bisa-diwujudkan-dengan-banyak-cara>.

Suara.com. 2020. “Anita Wahid: Polarisasi Politik di Tengah Pandemi, Pasti Ada.” suara.com. 18 Mei 2020.  
<https://www.suara.com/news/2020/05/18/030000/anita-wahid-polarisasi-politik-di-tengah-pandemi-pasti-ada>.

Tim Peneliti CSRC UIN Jakarta. 2020. “Survei Opini Publik Harmoni dan Solidaritas di Tengah Pandemi Covid-19.” Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan KAS Jerman.

Tribunnews. 2020. “Kata Mahfud MD, Masih Ada Polarisasi Politik Hingga Ancaman Terorisme di Masa Pandemi Covid-19.”  
T r i b u n n e w s . c o m . A g u s t u s 2 0 2 0 .  
<https://www.tribunnews.com/nasional/2020/05/08/kata-mahfud-md-masih-ada-polarisasi-politik-hingga-ancaman-terorisme-di-masa-pandemi-covid-19>.

Tribunnews.com. 2019. “Pengguna Sosial Media di Indonesia Terbesar Keempat di Dunia -.” Tribunnews.com. 19 Juni 2019.  
<https://www.tribunnews.com/techno/2019/06/19/pengguna-sosial-media-di-indonesia-terbesar-keempat-di-dunia>.

Uslaner, Eric M. 2002. *The Moral Foundations of Trust*. Cambridge University Press.

Wardah, C. Nila. 2021. “Perjuangan Satgas NU Melawan Laju Pandemi Covid-19.” NU Online. 21 April 2021.

<https://www.nu.or.id/post/read/128228/perjuangan-satgas-nu-melawan-laju-pandemi-covid-19>.

Woelfert, Frederike S., dan Jonas R. Kunst. 2020. "How Political and Social Trust Can Impact Social Distancing Practices During COVID-19 in Unexpected Ways." *Frontiers in Psychology* 11 ( D e s e m b e r ) : 5 7 2 9 6 6 .  
<https://doi.org/10.3389/fpsyg.2020.572966>.

Wong, Catherine Mei Ling, dan Olivia Jensen. 2020. "The paradox of trust: perceived risk and public compliance during the COVID-19 pandemic in Singapore." *Journal of Risk Research* 2 3 ( 7 – 8 ) : 1 0 2 1 – 3 0 .  
<https://doi.org/10.1080/13669877.2020.1756386>.





*Bab 2*

**SOLIDARITAS SOSIAL DAN KEPERCAYAAN  
DI MASA PANDEMI COVID-19**

*Oleh: Faisal Nurdin Idris*

**A. Memahami Solidaritas Sosial dan Kepercayaan Publik di Masa Krisis Covid-19**

Pada 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia mengumumkan secara resmi untuk pertama kalinya ditemukan dua kasus positif Covid-19 di Indonesia. Pernyataan resmi ini diumumkan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui siaran televisi tentang dua warga negara Indonesia asal Depok, Jawa Barat, yang terinfeksi Covid-19 setelah berinteraksi dengan warga Jepang yang kemudian dinyatakan positif di Malaysia. Namun demikian, menurut epidemiolog Pandu Riono, Covid-19 disinyalir telah masuk ke Indonesia sejak Januari 2020 yang mana hal ini ditandai dengan meningkatnya jumlah pasien yang mengalami gejala Covid-19 di beberapa rumah sakit (CNN Indonesia, 2020; Pranita, 2020). Bahkan Riono mengamati arus penerbangan dari Wuhan – Kota di Cina yang diduga awal terjadinya penyebaran Covid-19 – ke beberapa kota di Indonesia.

Covid-19 sebagai krisis pandemi yang luar biasa menjadi konteks dalam memahami solidaritas sosial dan kepercayaan (*trust*). Krisis Covid-19 dikatakan sebagai kejadian yang hebat setelah Perang Dunia ke II. Wabah Covid-19 sebagai penyakit

menular (*infectious disease*) telah menjadi perhatian serius dunia sejak akhir tahun 2019 ketika kasusnya merebak di Wuhan Cina. Keprihatinan dunia ini di awal tahun 2020 dipicu oleh adanya lonjakan yang dramatis di mana angka mereka yang terinfeksi Covid-19 mengalami peningkatan yang tajam di berbagai belahan dunia, serta begitu cepatnya wabah Covid-19 meluas dari satu area ke area lain dan melintas batas negara. Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) kemudian mengumumkan secara resmi bahwa Covid-19 dikategorikan sebagai pandemi<sup>1</sup> (BBC, 2020, 11 Maret). Di Indonesia, pemerintah secara resmi mengkonfirmasi adanya kasus Covid-19, pada sekitar pertengahan Maret 2020. Perkembangan berikutnya di Indonesia terlihat bahwa angka mereka yang terinfeksi Covid-19 dan jumlah kematian terus mengalami lonjakan yang tinggi.<sup>2</sup>

Karakteristik Covid-19 sebagai penyakit menular –yaitu seseorang dapat dengan mudah terpapar virus melalui udara (pernapasan) atau ketika menyentuh permukaan yang terkontaminasi oleh virus (CDC, 2021) –telah mendorong negara-negara di dunia melahirkan berbagai kebijakan untuk mencegah penyebaran Covid-19. Di sisi lain dalam merespon penyakit menular ini, seperangkat kebijakan pemerintah telah memengaruhi berbagai perubahan sosial dan perilaku di masyarakat. Sejalan dengan kebijakan WHO dan negara-negara lainnya, pemerintah Indonesia sejak awal terjadinya penyebaran Covid-19 di Indonesia hingga kini telah mengingatkan masyarakat agar patuh dan disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) dengan 3M (memakai masker,

---

<sup>1</sup> Pandemi adalah penyakit yang menyebar di banyak negara di seluruh dunia pada waktu yang bersamaan.

<sup>2</sup> Perkembangan terkini terkait Covid-19 di Indonesia dapat diakses melalui situs resmi pemerintah: <https://www.covid19.go.id/>

menjaga jarak, dan mencuci tangan) yang ini dipandang sebagai kunci untuk mencegah penyebaran virus Covid-19 (Kementerian Kominfo, 2020).

Sebagai penyakit menular, wabah Covid-19 memiliki karakteristik yang unik yang memungkinkan respon pemerintah dan publik berbeda dibandingkan dengan respon terhadap krisis lain seperti upaya penanggulangan bencana. Di masa pandemi, tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan menggunakan alat pelindung diri (APD) agar tidak terinfeksi. Masyarakat pun memiliki kekhawatiran tertular ketika menolong mereka yang terpapar Covid-19. Karena keterbatasan fasilitas kesehatan dan tingginya kasus, mereka yang terpapar melakukan isolasi mandiri di rumah yang ini dapat menginfeksi anggota keluarga yang lain di rumah dan tentu dapat menjadi fatal bagi mereka yang rentan terpapar karena adanya penyakit bawaan lain (komorbid).

Di samping itu, kekhasan pandemi virus Corona juga memberikan gambaran umum tentang berbagai isu yang antara lain mencakup memburuknya kondisi ekonomi dan dampak yang ditimbulkannya terhadap pelaku usaha dan pekerja. Selain itu, persoalan kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah dan proses, tumpang tindih kebijakan Covid-19 dan persoalan implementasi kebijakan, pembatasan mobilitas penduduk, serta keharusan jaga jarak fisik sebagai cara untuk menghindari penyebaran virus Corona lebih luas (*social/physical distancing*). Pada tataran komunikasi, masifnya penggunaan komunikasi digital dan daring seperti di dunia pendidikan dan dunia kerja, ketidakjelasan informasi kebijakan dan kurang baiknya komunikasi pemerintah kepada publik dan petugas di lapangan, dibarengi pula berkembangnya misinformasi dan disinformasi di masyarakat. Masalah lain, pada tataran politik, polarisasi

politik ikut memengaruhi penanganan Covid-19. Dan tentu saja pandemi telah menyebabkan gangguan psikis seperti depresi dan kecemasan. Dengan kompleksitas persoalan yang ditimbulkan oleh pandemi, tentu mustahil riset ini dapat menjangkau seluruh persoalan ini, tapi setidaknya ada beberapa isu relevan yang akan diulas.

Yang pada awalnya cenderung dilihat sebagai isu kesehatan, pandemi Covid-19 merambah ke persoalan lain yaitu krisis multidimensional dengan segala kompleksitas yang ditimbulkannya. Imbas yang dipicu dari krisis pandemi Covid-19 terlihat nyata dengan munculnya krisis ekonomi dunia yang ini tidak saja dialami oleh negara ekonomi maju, tetapi juga negara ekonomi berkembang. Di Indonesia, Covid-19 diyakini memberikan dampak serius terhadap terjadinya krisis ekonomi (Rizal, 2020, 11 Agustus). Hal ini ditandai dengan terjadinya resesi ekonomi di mana produk domestik bruto (PDB) mengalami pertumbuhan minus pada kuartal II (-5,32%) dan III (-3,49%) pada 2020, yang kemudian situasi ini memberikan efek domino pada menurunnya secara drastis konsumsi rumah tangga, rendahnya daya beli masyarakat, dan meningkatnya jumlah pengangguran yang menembus angkatan 9,77 juta orang (Fauzia, 2020, 6 November). Sebagian analisis ekonomi juga memprediksi akan adanya efek serius dari krisis ekonomi di Indonesia terhadap penurunan pendapatan yang signifikan di masyarakat kelas menengah dan bawah, sulitnya angkatan kerja baru untuk mengakses pekerjaan, dan potensi peningkatan konflik sosial karena adanya ketimpangan pendapatan yang semakin lebar di tengah menurunnya kondisi ekonomi karena dampak Covid-19 (Bardan, Pink, & Santoso, 2020).

Upaya utama untuk menekan penyebaran virus Corona di Indonesia dan dunia terlihat sama yaitu penerapan pembatasan

(*restrictions*) terhadap mobilitas penduduk dan penerapan protokol kesehatan. Yang menarik perhatian dari kalangan ilmuwan adalah seputar dampak pemberlakuan pembatasan yang diterapkan oleh pemerintah – baik pusat ataupun daerah – terhadap solidaritas sosial dan kepercayaan (sosial dan politik). Pengaruh dari tindakan pemerintah tersebut terhadap perubahan sosial menjadi topik kajian yang tumbuh secara pesat sejak awal wabah Covid-19 di mana situasinya dan kebijakan pemerintah memaksa masyarakat untuk lebih banyak beraktivitas di rumah, serta berinteraksi dan berkomunikasi tidak melalui tatap muka. Dalam literatur modal sosial (*social capital*) yang ada selama ini dan yang mana lingkup kajiannya melihat dinamika sosial di masa sebelum pandemi, aktivitas sosial dan komunikasi tatap muka (*face-to-face communication*) merupakan unsur penting dalam menciptakan kohesi sosial yang merekatkan solidaritas masyarakat (Letki, 2008; Putnam, 2000).

Kebijakan pemerintah melalui pembatasan (*restrictions and/or lockdowns*) terhadap mobilitas masyarakat/penduduk, karantina kesehatan, menjaga jarak dengan orang lain (*social/physical distancing*) yang diterapkan oleh pemerintah<sup>3</sup> dengan segala level pembatasannya dapat dilihat dari dua sisi yang bertolak belakang. Di satu sisi, pembatasan dan menjaga jarak dengan orang lain dilihat memiliki tujuan positif sebagai strategi utama dan upaya pemerintah dalam mencegah, mengurangi dan mengendalikan penyebaran pandemi virus Corona. Sejumlah kajian ilmiah menyimpulkan bahwa pembatasan, seperti karantina dan menjaga jarak dengan orang lain, sebagai langkah-langkah (*measures*) dan pendekatan yang

---

<sup>3</sup> Regulasi utama yang dirujuk pemerintah adalah UU No. 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan.

diberlakukan oleh pemerintah terbukti memiliki hasil positif dan efektif dalam mengendalikan meluasnya pandemi Covid-19 (Alfano & Ercolano, 2020; Lau et al., 2020; Moosa, 2020; WEF, 2020). Di sisi lain, pembatasan dan menjaga jarak dengan orang lain dianggap dapat berbenturan dengan prinsip-prinsip atau norma yang kondusif bagi terciptanya harmoni dan solidaritas sosial seperti dalam bentuk rasa komunitas, keterikatan lingkungan, kepercayaan dan kepedulian terhadap tetangga. Solidaritas sosial mengondisikan adanya interaksi dan hubungan antar individu yang tidak dibatasi, seperti berkunjung ke teman, tetangga atau saudara dan bergaul serta berpergian bersama-sama ke suatu tempat (Letki, 2008; Putnam, 2000). Akan tetapi, aktivitas yang mendorong terciptanya solidaritas sosial tersebut justru harus dibatasi di masa pandemi Covid-19.

Relevansi antara Covid-19 dan kondisi demokrasi juga menjadi sorotan yang mengemuka dalam kajian kekinian. Perhatian dari para ilmuwan tertuju kepada ada atau tidaknya perubahan sikap dan pandangan masyarakat di tengah pandemi terkait dukungan terhadap demokrasi, dilihat dari tren dan perbandingan situasi sebelum dan di saat pandemi Covid-19. Misalnya, Mujani (2020) menyimpulkan bahwa Covid-19 memiliki “pengaruh terhadap komitmen masyarakat terhadap demokrasi, pengaruh yang dimaksud adalah pengaruh negatif.” Namun demikian, temuan Mujani tersebut menunjukkan juga adanya anomali terkait kepercayaan (*trust*) terhadap institusi. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Presiden dan pemerintah dalam menangani krisis Covid-19 terlihat relatif tinggi sekitar lebih dari 70% (Mujani, 2020, 24 Agustus). Kesimpulan Mujani ini menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap presiden di masa pandemi masih relatif stabil dan sama dengan tingkat kepercayaan

terhadap presiden pada periode sebelum pandemi Covid-19 yaitu pada awal 2019 di mana 71.8% publik puas dan percaya dengan kinerja Presiden Joko Widodo (LSI, 2019).

Namun demikian, pengetahuan kita masih sangat kurang dalam memahami kepercayaan sosial dan politik dalam hubungannya dengan pandemi Covid-19 di Indonesia. Sebuah riset terkini (Devine et al., 2021) menyoroti dua hal krusial yaitu *pertama*, apa implikasi ada dan tidaknya kepercayaan (*trust*) terhadap respons kebijakan pemerintah terkait pandemi virus Corona. *Kedua*, yaitu dampak pandemi terhadap kepercayaan. Selain itu, literatur terkini menyoroti faktor apa yang menyebabkan terjaganya kepercayaan kepada pemerintah (Mujani, 2020; Bol, Giani, Blais, Loewen, 2020), sedangkan lainnya menggunakan penjelasan psikologi tentang adanya efek kecemasan dan efek '*rally-round-the-flag*'<sup>4</sup> di balik meningkatnya dukungan terhadap pemerintah (Schraff 2020). Kita juga kurang paham tentang polarisasi politik dan Covid-19, yaitu apakah kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah atau presiden akan otomatis terkonversi dalam kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah? Apakah mereka yang tidak memilih Presiden Joko Widodo pada pemilihan presiden (pilpres) tahun 2019 lalu mematuhi atau tidak mematuhi kebijakan pemerintah dan prokes? Jika mereka yang bukan pendukung presiden di pilpres lalu mematuhi prokes dan kebijakan pemerintah, apakah perilaku itu sebagai kepercayaan terhadap pemerintah atau

---

<sup>4</sup> Efek '*rally-round-the-flag*' atau singkatnya efek reli di dalam ilmu politik menggambarkan adanya kecenderungan publik memberikan dukungan kepada pemerintah di tengah situasi krisis seperti serangan teroris atau perang (Hetherington & Nelson, 2003). Beberapa penjelasan mengenai faktor yang mendorong efek '*rally-round-the-flag*' (ESAIASSON et al., 2020) yaitu: (1) krisis memicu dukungan untuk simbol bangsa seperti president, (2) sikap publik terkait adanya ancaman di mana efek reli dipahami sebagai cara untuk meningkatkan keamanan dalam situasi yang tidak menentu dan terkendali, dan (3) situasi emosional di mana kemarahan dan kecemasan sebagai mekanisme potensial di balik efek reli ini.

lebih pada melindungi diri dan menjaga kesehatan dari paparan virus Corona? Selain itu, kita menghadapi kesenjangan pengetahuan untuk memahami kepercayaan sosial (*social trust*) dalam hubungannya dengan pandemi virus Corona.

Uraian di atas memperlihatkan kurangnya pengetahuan kita tentang praktik solidaritas sosial dan dinamika kepercayaan dalam hubungannya dengan pandemi Covid-19. Pemahaman umum kita mengatakan bahwa menghadapi pandemi Covid-19 memerlukan tindakan kolektif skala besar untuk membendung wabah tersebut. Solidaritas sosial (solidaritas horizontal) – yang terwujud dari kedermawanan sosial, saling membantu, modal sosial, dan kohesi sosial – menjadi kunci dan prasyarat bagi kolaborasi bersama melawan Covid-19. Sejalan dengan ini, tindakan kolektif yang berhasil, bagaimanapun membutuhkan tingkat kepercayaan tertentu kepada lembaga yang mengatur masyarakat. Oleh karena itu, tulisan ini menginvestigasi bagaimana warga memperbarui sikap, pandangan, dan perilaku mereka terkait solidaritas sosial dan kepercayaan sosial dan politik dalam menanggapi krisis pandemi Covid-19.

## **B. Konsepsi Solidaritas Sosial**

Solidaritas sudah menjadi kata yang umum digunakan oleh masyarakat dunia termasuk Indonesia. Mendefinisikan solidaritas bukan hal yang mudah, terlebih ada begitu banyak literatur dari berbagai disiplin ilmu yang telah membicarakan solidaritas. Para ilmuwan mendefinisikan konsep solidaritas secara beragam dan terlihat tidak ada konvensi tunggal tentang konsep tersebut (Kiess & Trenz, 2019). Namun demikian, solidaritas umumnya dipahami sebagai persatuan atau ikatan antara orang-orang yang memiliki minat yang sama, perasaan yang sama, saling mendukung, atau keinginan untuk perubahan



sosial (Scholz, 2013). Solidaritas menyiratkan kesiapan untuk bekerja kolektif dalam bentuk saling membantu (Stjernø, 2004, dikutip dari Kiess & Trenz, 2019). Untuk keperluan studi ini, pemahaman umum ini yang digunakan.

Dalam kajian kontemporer, solidaritas sering dilihat sebagai konsep 'Barat' dan *Eurocentris* yang memiliki akar tradisi pemikiran filosofis Barat dan mengandung nilai netral (dapat menjadi positif dan negatif). Solidaritas dari Barat ini berakar pada tradisi 'Pencerahan' (*Enlightenment*) yang berlandaskan kepada kebebasan dan akal. Ini termasuk juga berkehendak secara bebas (*free-will*), tanggung jawab diri, dan pengambilan keputusan secara otonom. Landasan utama pada kebebasan dan akal ini menempatkan individu sebagai agensi yang mampu berfikir untuk mengambil keputusan dalam hal solidaritas dan juga memiliki kebebasan dalam mengekspresikan dan mempraktikkan solidaritas. Mempertimbangkan relevansi dengan tulisan ini, tipologi solidaritas merujuk kepada kajian Bauder and Juffs (2020) yang mengombinasikan tipologi solidaritas dari dan di luar tradisi 'Pencerahan' yang mencakup: solidaritas yang berpusat pada diri sendiri (*self-centred solidarity*), solidaritas reflektif emosional (*emotional reflexive solidarity*), solidaritas reflektif rasional (*rational reflexive solidarity*), dan solidaritas rekognitif (*recognitive solidarity*).

*Pertama*, solidaritas yang berpusat pada diri sendiri (*self-centred solidarity*) adalah tipe solidaritas yang mengejar kepentingan pribadi atau diri sendiri. Individu mengekspresikan solidaritas satu sama lain didasari oleh pertimbangan untuk mengejar kepentingan mereka sendiri daripada pertimbangan atas norma etika atau moral. *Kedua*, solidaritas reflektif emosional (*emotional reflexive solidarity*) pada dasarnya adalah tipe solidaritas yang berasal dari motivasi pribadi. Prinsip moral

dari solidaritas refleksif emosional didasarkan pada simpati, empati, kasih sayang, dan persahabatan. Berakar dari filosofi David Hume yang menekankan bahwa emosi memandu akal dalam pengambilan keputusan, solidaritas tipe ini dapat ditemui dalam praktik-praktik seperti memberikan bantuan secara sukarela, biasanya dalam bentuk uang, kepada mereka yang membutuhkan dan menawarkan bantuan karena didasari oleh identifikasi emosional dengan mereka yang membutuhkan bantuan. Kategori solidaritas ini juga menganut sisi kemanusiaan dan pemberian bantuan dalam bentuk makanan, pakaian, tempat tinggal dan layanan medis.

*Ketiga*, solidaritas refleksif rasional (*rational reflexive solidarity*) berakar dari filosofi Immanuel Kant tentang keharusan untuk bertindak atas nama masyarakat secara keseluruhan yang sejalan dengan hukum moral yang dapat diterapkan secara universal. Oleh karena itu, solidaritas tipe ini adalah bagian dari ekspresi 'komunitas kita semua' atau bersama yang bertolak belakang dengan perjuangan politik dan komunitas yang terpecah-pecah dan solidaritas atau identitas pembelahan. Dilandasi adanya kewajiban moral universal, praktik solidaritas tipe ini menekankan pada adanya kewajiban internasional untuk menjadi “warga dunia yang baik” (Malkki 2015, 25, dikutip dari Bauder & Juffs, 2020). Di samping itu, solidaritas ini terkait juga dengan keramahan (*hospitality*). *Keempat*, solidaritas rekognitif (*recognitive solidarity*) berakar dari pendekatan *Hegelian* tentang keterikatan sosial dari seorang individu. Solidaritas tipe ini menekankan interaksi sosial dan hubungan sosial, dan bahwa diri individu (*the self*) dibentuk melalui masyarakat secara keseluruhan. Selaras dengan ini, solidaritas jenis ini dibingkai dalam kondisi timbal balik (*reciprocity*). Ilustrasi dari jenis solidaritas resiprokal ini dapat ditemukan dalam pengorganisasian gerakan buruh.

Selain empat tipologi solidaritas yang berasal dari tradisi 'Pencerahan' Barat, ada tipologi yang dikenal dengan solidaritas sebagai loyalitas (*solidarity as loyalty*). Menurut Bauder dan Juffs (2020), solidaritas sebagai loyalitas ini tidak mengacu pada tradisi filosofis “Barat” tentang kebebasan dan akal sebagaimana diulas di atas. Solidaritas sebagai loyalitas berdasar pada pengalaman atau ingatan sejarah, sosial, dan politik bersama. Jenis solidaritas ini berlandaskan hal terkait asal/latar belakang (*origin*) dan afiliasi atau keterikatan (*belonging*) dengan mangacu kepada karakteristik atau ciri tertentu seperti kewarganegaraan, etnis/suku, preferensi politik, hubungan keluarga, agama, dan lain-lain (Kapeller dan Wolkenstein 2013, dikutip dari Bauder & Juffs, 2020). Contoh solidaritas jenis ini terlihat dalam “membantu orang anda sendiri” (Kapeller dan Wolkenstein 2013, 486, dikutip dari Bauder & Juffs, 2020). Diekpresikan dengan perasaan dukungan atau kesetiaan yang kuat, solidaritas sebagai loyalitas atau kesetiaan ini mengistimewakan hubungan dengan orang-orang dalam suatu kelompok sosial tertentu atau identitas kelompok, yang praktiknya dapat mengucilkan atau mengeluarkan (*exclusion*) orang lain. Sehingga jenis solidaritas ini sering kali mereproduksi praktik-praktik inklusif dan eksklusif seperti konstruksi *in-groups* dan *out-groups*. Dengan kata lain, tipologi solidaritas sebagai loyalitas ini dapat mengandung nilai positif dan negatif dalam kontestasi diskursus identitas.

Menurut Bauder and Juffs (2020), meskipun lima jenis dari solidaritas di atas dapat dibedakan secara konseptual, namun hal ini tidak dimaksudkan untuk membuat teori tunggal tentang solidaritas. Lima jenis solidaritas di atas juga tidak dapat dilihat secara terpisah-pisah (*mutually exclusive*). Demikian halnya antara satu tipe dan tipe lainnya dapat terjadi tumpang tindih

atau beririsan secara bersamaan.

Untuk memperkaya diskusi teoritis tentang solidaritas sosial, studi ini melihat penting untuk merujuk kajian klasik dari Emile Durkheim dalam bukunya *The Division of Labor in Society* (1893, dikutip dari Scholz, 2013), di mana ia mengembangkan konsep solidaritas sosial dengan membedakan antara solidaritas mekanis dan solidaritas organik. *Pertama*, yaitu solidaritas mekanis yang menggambarkan kohesi sosial di mana individu dipersatukan atas dasar beberapa kesamaan, kemiripan, atau identitas. Individu sebagian besar terserap oleh kesadaran kolektif yang mana mereka mencari kesamaan atau kesesuaian antar individu. Dengan model seperti itu, masyarakat bertindak secara mekanis. Singkatnya solidaritas mekanis didasarkan pada kemiripan, misalnya kesamaan budaya setiap anggota suatu suku (Osa, 2008). *Kedua*, adalah solidaritas organik yang sebaliknya, adalah bentuk solidaritas yang ditemukan pada masyarakat yang lebih maju (*developed*) yang dicirikan dengan sikap dan praktik individualitas. Anggota individu masyarakat memiliki peran yang berbeda-beda dan masyarakat menunjukkan pembagian kerja yang sangat maju. Masyarakat industri bersatu karena adanya solidaritas organik, berdasarkan adanya saling ketergantungan antar individu yang berbeda, misalnya, adanya keragaman pekerjaan karena diterapkannya pembagian kerja (Osa, 2008).

### ***Solidaritas Sosial, Modal Sosial dan Covid-19***

Satu cara mendiskusikan literatur yang kaya tentang solidaritas sosial dalam hubungannya dengan pandemi virus Corona adalah dengan mengintegrasikan diskusi teoritis tentang modal sosial. Solidaritas sosial dilihat penting sebagai komitmen, ekspresi, sikap dan tindakan bersama-sama dalam menghadapi krisis pandemi. Di awal merebaknya wabah Corona,

Gaztambide-Fernández (2020) mengilustrasikan signifikansi dari solidaritas sosial yang diekspresikan oleh warga dunia baik di level internasional maupun level domestik/lokal yang tidak tersekat dengan batas perbedaan 'kita' dan 'mereka'. Menurut Gaztambide-Fernández, solidaritas bergantung bagaimana kita bersatu dalam menghadapi krisis dan persoalan dunia seperti pandemi. Solidaritas merupakan unsur pergaulan manusia yang menekankan pada ikatan sosial kohesif yang menyatukan individu atau kelompok. Dari kajian Igwe et al., (2020) di masa penguncian pandemi yang mengharuskan masyarakat berada di rumah atau bekerja dari rumah, solidaritas sosial bekerja dalam membantu komunitas mengelola pandemi. Solidaritas sosial ditunjukkan oleh interaksi perilaku individu (kepercayaan/ *trust*, altruisme dan timbal balik/ *reciprocity*) dan tindakan kolektif (praktik pengumpulan sumber daya, berbagi informasi, pemberdayaan perempuan, dan donasi). Di samping itu, dukungan individu dan komunitas ini menjadi modal sosial yang penting dalam pembangunan ekonomi.

Di dalam literatur modal sosial (*social capital*), modal sosial merupakan elemen penting dalam menciptakan solidaritas sosial (Putnam, 2000). Menurut Putnam (1995; 2000; 1993), modal sosial merupakan koneksi sosial, jaringan, norma timbal balik, dan kepercayaan *interpersonal* yang terjadi dalam komunitas. Definisi modal sosial dalam pandangan Makridis dan Wu (2021) mengacu adanya kepercayaan dan hubungan (*relationship*) dalam komunitas. Hal menarik dari studi Putnam (2000) adalah menurunnya aktivitas sosial dan partisipasi atau keterlibatan kewarganegaraan (*civic participation/engagement*) sejalan dengan menurunnya modal sosial.

Konsep modal sosial dibagi menjadi tiga bentuk: *bonding*, *bridging*, dan *linking* (Putnam, 2000; Szreter & Woolcock, 2004).

Modal sosial *bonding* atau yang bersifat mengikat mengacu pada hubungan saling percaya dan kerjasama antara anggota jaringan atau komunitas yang memiliki kesamaan ciri seperti identitas sosial bersama. Modal sosial *bridging* atau bersifat menjembatani, sebaliknya, terdiri dari hubungan saling menghormati dan mutualitas antara orang-orang yang tahu bahwa mereka tidak memiliki kesamaan karakteristik atau ciri tertentu seperti adanya perbedaan sosio-demografis (identitas sosial) dan perbedaan-perbedaan berdasarkan usia, kelompok etnis/ras, kelas, dan lain-lain. Terakhir, modal sosial *linking* atau bersifat menghubungkan, didefinisikan sebagai norma saling menghormati dan jaringan hubungan saling percaya antara orang-orang yang berinteraksi dalam strata yang berbeda dalam relasinya dengan kekuasaan (formal) dan otoritas di masyarakat. Modal sosial *bonding* (hubungan atas karakteristik yang sama) diidentikkan sebagai jaringan sosial yang kuat, tetapi eksklusif. Sebaliknya, modal sosial *bridging* (hubungan atas dasar perbedaan ciri) disebut sebagai jaringan sosial yang lemah, tetapi modal sosial ini dikatakan juga sebagai inklusif. Adapun modal sosial *linking* adalah bentuk relasi antara penguasa dan warga. Perbedaan lainnya dari ketiga bentuk modal sosial ini yaitu jika modal sosial *bonding* dan *bridging* merupakan relasi horizontal, modal sosial *linking*, sebaliknya, adalah hubungan vertikal.

Diskusi teoritis tentang modal sosial yang dihubungkan dengan pandemi Covid-19 menunjukkan adanya situasi yang bertolak belakang antara penguatan modal sosial dan pembatasan serta jaga jarak. Ini merupakan area riset baru yang nampaknya akan berkembang di waktu mendatang. Wabah virus Corona telah mengakibatkan disrupsi dalam kehidupan orang-orang, yang sebagian individu telah mengalami dampak langsung.

Dalam literatur modal sosial sebelum terjadinya pandemi, ada beberapa elemen modal sosial yang justru tidak kondusif dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Misalnya, mengunjungi teman dan tetangga dan pergi bersama teman dan tetangga merupakan elemen dalam kohesi sosial (Letki, 2008). Pandemi juga mengakibatkan menurunnya interaksi langsung tatap muka sebagai konsekuensi dari penerapan pembatasan, mempersempit mobilitas masyarakat dan menjaga jarak. Namun, kepercayaan sosial (*social trust*) terbentuk dari relasi kohesif dari orang-orang berdasarkan seringnya mengadakan interaksi langsung atau tatap muka (Putnam, 2000). Lingkungan sekolah (dengan tatap muka langsung) menjadi sarana yang kondusif untuk membangun modal sosial, yaitu persahabatan, kebiasaan (*habit*) dan solidaritas. Di masa pandemi, terjadi situasi yang kontras di mana tempat pendidikan seperti sekolah tidak lagi beraktivitas seperti biasa dan penyelenggaraan pendidikan pun dilaksanakan dengan daring (*offline*), tidak tatap muka.

Menurut Putnam (2000, 101), “mengunjungi teman dan kenalan telah lama menjadi salah satu praktik sosial terpenting di Amerika”. Putnam juga mendokumentasikan bukti dalam karyanya *Bowling Alone* tentang menurunnya modal sosial di masyarakat Amerika pascaperang. Ia pun berargumen bahwa budaya Amerika yang menekankan individualisme dan bergantungnya ke media massa untuk rekreasi atau hiburan mengakibatkan menurunnya hubungan *bridging* yang heterogen (inklusif), sedangkan secara bersamaan memperkuat sebagian kecil dari hubungan *bonding* yang homogen (eksklusif).

Di masa pandemi dengan penerapan pembatasan dan jaga jarak (*physical distancing*), masyarakat lebih banyak menghabiskan waktu di rumah mereka. Beragam moda dari

komunikasi digital khususnya media sosial, seperti YouTube, Instagram, WhatsApp, dan Twitter, telah memainkan peran sentral. Jika kajian modal sosial sebelum masa pandemi telah banyak menyoroiti modal sosial luring, modal sosial daring, seperti masifnya penyelenggaraan kegiatan dengan webinar yang menggunakan platform Zoom, hingga saat ini belum memperoleh perhatian untuk dikaji lebih dalam.

### **C. Konsepsi Kepercayaan Sosial dan Politik dalam Hubungannya dengan Covid-19**

Sebagaimana solidaritas, konsep kepercayaan (*trust*) merupakan konsep yang diperdebatkan dan ambigu, serta tidak adanya konsensus bersama dalam mendefinisikan konsep atau istilah kepercayaan (Ervasti, Kouvo, & Venetoklis, 2019). Kepercayaan dibagi menjadi tiga bentuk: kepercayaan sosial tertentu (*particular, particularized, interpersonal trust, thick trust*), kepercayaan sosial umum (*general, generalized, trust in unknown others, thin trust*), dan kepercayaan politik (Ken Newton & Zmerli, 2011; Kenneth Newton et al., 2018). Kepercayaan sosial tertentu didasarkan pada pengetahuan dan kontak dekat dengan orang lain yang diperoleh melalui kontak dekat, atau cukup mengetahui tentang orang lain yang ia kenal, yang umumnya merupakan lingkaran keluarga, teman, dan kolega dalam lingkup yang cukup kecil. Kepercayaan sosial tertentu ini disebut juga sebagai kepercayaan dalam kelompok atau *in-groups trust*, yaitu kepercayaan dalam jejaringan pribadi yang dekat, keluarga dan teman terdekat (Hardin 2000; Uslaner 2008, dikutip dari Ervasti et al., 2019). Ringkasnya, kepercayaan sosial tertentu (*particular*) dapat dikembangkan dengan orang-orang yang kita kenal secara pribadi. Sebaliknya, kepercayaan sosial umum mencakup kepercayaan yang lebih luas dengan orang-orang yang tidak selektif dan spesifik. Bersifat inklusif,



kepercayaan sosial umum ini adalah keyakinan bahwa kebanyakan orang dapat dipercaya, walaupun anda tidak mengenal mereka secara pribadi dan bahkan jika mereka tidak seperti anda secara sosial (Uslaner 2000: 573, dikutip dari Ervasti et al., 2019). Contoh dari kepercayaan sosial umum ini mudah dijumpai dalam masyarakat perkotaan yang memerlukan kontak yang sering dengan orang lain yang tidak dikenal, seringkali dengan latar belakang sosial dan identitas yang berbeda.

Bentuk kepercayaan ketiga adalah kepercayaan politik (*political trust*) yang sering juga disebut dengan kepercayaan pada institusi pemerintah (*trust in government institutions, institutional trust*) adalah bentuk kepercayaan terhadap aktor elit dan institusi pemerintah/publik (Ervasti et al., 2019). Kepercayaan sosial sering digunakan untuk merujuk pada aspek horizontal dari kepercayaan, sedangkan kepercayaan politik atau institusional mengacu pada kepercayaan vertikal terhadap institusi publik (Hardin 1999; Warren 1999, dikutip dari Ervasti et al., 2019). Ada enam komponen utama yang menjadi parameter untuk mengukur kepercayaan politik/institusional, yaitu: parlemen, pemerintah (presiden atau perdana menteri), partai politik, sistem peradilan, pelayanan publik, dan polisi (Ken Newton & Zmerli, 2011). Kepercayaan politik antara yang memerintah (*governors*) dan yang diperintah (*governed*) dilihat sebagai hal penting dalam menciptakan *good governance* dan memastikan berjalannya demokrasi. Menurut Warren (1999: 34, dikutip dari Ervasti et al., 2019), sistem politik modern dan rumit sangat bergantung pada kepercayaan warga negara pada organisasi dan badan pemerintah. Untuk melihat kepercayaan (*trust*) publik di masa pandemi Covid-19 di Indonesia, riset survei ini memfokuskan pada dua aspek kepercayaan institusional yaitu

organisasi dan badan pemerintah (institusi politik) dan aktor elit.

Ada beberapa perdebatan dalam literatur tentang kepercayaan di masa krisis khususnya pandemi Covid-19 yang dirangkum sebagai berikut. *Pertama*, krisis virus Corona mengurangi kepercayaan politik/institusional dari masyarakat. Studi terkini di Yunani menemukan bahwa tingkat kepercayaan warga Yunani terhadap institusi politik di Yunani menurun secara substansial. Namun yang mengejutkan, kepercayaan sosial antarpribadi tidak runtuh; sebaliknya, tingkat kepercayaan sosial tetap stabil atau bahkan sedikit meningkat secara bersamaan dengan penurunan kepercayaan politik yang mencolok (Ervasti et al., 2019). *Kedua*, faktor personal dan sosial (*societal*) memengaruhi tinggi rendahnya kepercayaan politik. Beberapa studi menemukan bahwa paparan pandemi, tindakan pembatasan, meningkatnya kasus terinfeksi Covid-19 pada level agregat sosial meningkatkan kepercayaan (Devine et al., 2021). Namun, pengalaman personal dengan terpaparnya Covid-19 yang terjadi pada anggota keluarga dekat yang terinfeksi virus mengindikasikan turunnya kepercayaan.

Literatur ilmu politik juga menunjukkan adanya perdebatan terkait kepercayaan politik/institutional dan pandemi Covid-19. Sebuah studi terkini menemukan bahwa pembatasan atau karantina (*lockdown*) di masa pandemi Covid-19 telah meningkatkan niat memilih untuk partai Perdana Menteri/Presiden yang sedang berkuasa sebagai pemberian *reward* kepada institusi politik dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah (Bol, Giani, Blais, & Loewen, 2020). Jadi, publik cenderung meningkatkan kepercayaan pada pemerintah dan menunjukkan kepuasan terhadap demokrasi. Namun tesis Bol et al. (2020) ini dikoreksi oleh Schraff (2020) yang berargumen bahwa efek kecemasan lah yang menjadi

penentu, bukan efek *lockdown* sebagaimana menurut tesis Bol et al. (2020) yang mendorong peningkatan dukungan publik terhadap institusi karena adanya ancaman pandemi Covid-19. Berangkat dari penjelasan psikologis terhadap respon publik, Schraff (2020) menyimpulkan bahwa intensitas pandemi meningkatkan dukungan publik terhadap institusi politik yang ini dikenal dalam literatur ilmu politik sebagai efek '*rally-round-the-flag*'. Kecemasan kolektif (*collective angst or anxiety*) dalam menghadapi peningkatan yang dramatis dari kasus Covid-19 menekan evaluasi kognitif terhadap institusi publik (*political/institutional trust*) dan ini kemudian mendorong warga untuk mendukung institusi dan badan pemerintah sebagai penyelamat mereka atau disebut dinamika *rally-round-the-flag* (SCHRAFF, 2020).

#### **D. Solidaritas Sosial di Indonesia: Opini, Sikap, dan Praktikny**

Pemerintah pusat mulai memerhatikan pentingnya solidaritas sosial sebagai aksi kolektif bersama dalam merespon pandemi virus Corona dengan menggalakkan kerja gotong-royong dan kegiatan-kegiatan yang melibatkan komponen di masyarakat dengan kesadaran bahwa penanggulangan wabah virus tidak mungkin bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah tanpa melibatkan komponen masyarakat (Kemenkopmk, 2021). Dalam kunjungan ke daerah Yogyakarta, Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy pada Agustus 2021 mengatakan bahwa pemerintah membentuk gerakan solidaritas dan kedermawanan untuk menangani pandemi Covid-19 (Pemerintah Daerah DIY, 2021). Gerakan solidaritas dan kedermawanan ini dimulai dengan percepatan penyaluran perlindungan sosial untuk masyarakat dalam bentuk: Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan untuk usaha kecil dan

subsidi upah, Subsidi Listrik, Kartu Sembako, Subsidi Kuota Internet, Kartu Prakerja, dan Bantuan Beras Bulog.

Dari elemen masyarakat sipil, Muhammadiyah dan Aisyiyah sejak awal wabah telah ikut berkontribusi dalam penanganan Covid-19. Solidaritas dan kedermawanan sosial yang dilakukan oleh Muhammadiyah dan Aisyiyah meliputi antara lain penyaluran bantuan dana melalui LazisMu, pelibatan 83 rumah sakit Muhammadiyah-Aisyiyah dalam menangani pasien Covid-19, pendirian rumah isolasi mandiri di berbagai daerah yang dikomandoi oleh Muhammadiyah Covid19 Command Center (MCCC), pelibatan ribuan dokter dan tenaga kesehatan (nakes) Muhammadiyah (Suara Muhammadiyah, 2021). Nahdlatul Ulama (NU) juga melakukan aksi solidaritas dan kedermawanan sosial sejak awal datangnya virus Corona. Misalnya, NU Care-LAZISNU menyalurkan berbagai bantuan termasuk pengadaan alat pelindung diri (APD), kegiatan penyemprotan disinfektan, dan paket sembako (NU Care-LAZISNU, 2020). Di samping itu, Muhammadiyah dan NU juga bekerjasama dengan masyarakat internasional seperti dengan Australia yang memberikan bantuan sebesar AUD 1 juta kepada Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim (LPBI NU) dan AUD 1,2 juta ke Muhammadiyah Disaster Management Centre (MDMC) (Tempo.co, 2020). Tentu kita tidak mungkin mengulas seluruh praktik-praktik kedermawanan sosial yang telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia baik yang terekspos di media elektronik dan media sosial, ataupun tidak diberitakan.

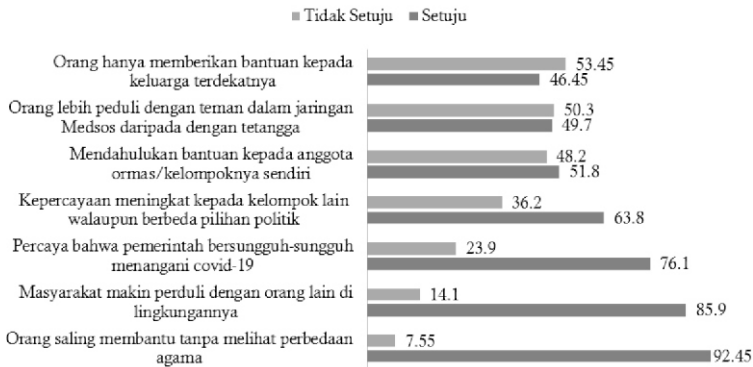
Kajian yang dilakukan oleh LazisMu baru-baru ini tentang dampak sosial ekonomi Covid-19 terhadap perilaku berderma masyarakat menemukan bahwa mayoritas responden mengaku rutin berderma (79,7%) dalam bentuk infaq (67,2%) dan donasi

umum (47,5%). Hal menarik yaitu adanya peningkatan mereka yang telah berdonasi Covid-19 dari 55,3% di survei pada Mei 2020 meningkat menjadi 70,1% di survei Juli 2021. Dalam menghadapi dampak pandemi, masyarakat memiliki beberapa strategi seperti yang terekam dalam survei LazisMu, yaitu menerima bantuan dari pemerintah atau lembaga sosial/zakat (62,3%), meminjam uang kepada pihak ketiga (54,9%), menjual aset atau barang pribadi (52,2%), menggunakan tabungan cadangan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari (40,7%), dan mencari pekerjaan atau penghasilan tambahan (38,9%).

Sebagaimana yang telah diulas dalam diskusi teoritis di atas, pandangan dan sikap masyarakat terhadap solidaritas sosial di tengah pandemi Covid-19 dapat dilihat dari tingkat kepedulian terhadap orang lain dalam sekatan loyalitas kelompok ataupun di luar identitas kelompok. Evaluasi terhadap kepedulian antar individu juga memberikan gambaran mengenai altruisme yaitu keyakinan dan praktik membantu mereka yang membutuhkan tanpa diiringi dengan kepentingan terselubung dan tanpa pamrih. Hasil survei CSRC UIN Jakarta (2020) yang terekam di Grafik 1 menunjukkan bahwa di masa pandemi Covid-19, tingkat kepedulian masyarakat Indonesia untuk membantu tanpa melihat perbedaan agama terlihat sangat tinggi di angka 92.45%, disusul dengan kecenderungan yang tinggi yaitu 85.9% masyarakat setuju bahwa dalam situasi krisis Covid-19 masyarakat makin peduli dengan orang lain di lingkungan sekitarnya. Sebaliknya, responden memberikan reaksi negatif jika bantuan hanya ditujukan kepada keluarga terdekat (tidak setuju, 53.45%), lebih peduli dengan teman-teman di media sosial (medsos) daripada tetangga sekitar (tidak setuju, 50.3%) dan lebih mendahulukan bantuan kepada afiliasi kelompok sendiri (tidak setuju 48.2%). Di samping itu, perbedaan pilihan politik tidak terlalu menghalangi

kepercayaan antar kelompok (setuju, 63.8%). Secara umum, kepercayaan (*trust*) responden terhadap kesungguhan pemerintah dalam menangani Covid-19 terlihat relatif tinggi yaitu di angka 76.1%.

**Grafik 1.**  
Solidaritas Sosial di Masa Pandemi Covid-19 (%)

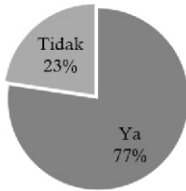


Hal yang menarik adalah dalam situasi ekonomi yang sulit, praktik membantu orang lain yang membutuhkan menunjukkan tren positif. Sebagaimana terungkap di Grafik 2, mayoritas masyarakat Indonesia (sekitar 77%) atau hampir 8 dari 10 orang Indonesia mengakui adanya penurunan pendapatan di masa pandemi Covid-19. Namun demikian di tengah situasi sulit tersebut, mayoritas masyarakat Indonesia (77.2%) menyatakan tetap membantu orang lain yang membutuhkan bantuan, walaupun mereka yang jarang membantu lebih dominan (46.1%) dibandingkan dengan jumlah mereka yang sering membantu dan selalu membantu yang keduanya memiliki total 31%. Jumlah mereka yang tidak pernah membantu orang lain yang membutuhkan tercatat 22.8%.

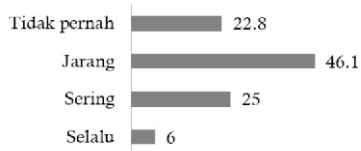
## Grafik 2.

Penurunan Pendapatan dan Pemberian Bantuan kepada Orang Lain

Penurunan pendapatan selama Covid-19



Memberikan bantuan kepada yang membutuhkan/mengalami kesulitan di masa pandemi Covid-19



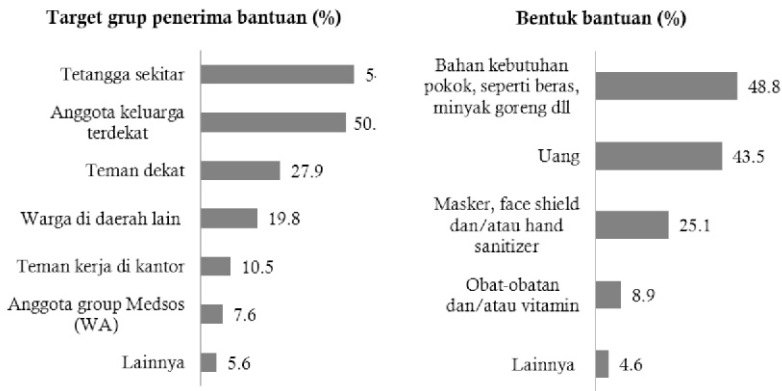
Selanjutnya, dari jumlah mereka yang membantu orang lain di masa pandemi Covid-19 yaitu total 77.2%, Grafik 3 menunjukkan lebih lanjut kepada siapa bantuan itu diberikan dan dalam bentuk apa bantuan itu diberikan. Dengan membolehkan responden untuk memilih dari satu jawaban dan pilihan terbuka, survei ini menemukan bahwa target grup utama penerima bantuan adalah tetangga sekitar (54%) dan anggota keluarga terdekat (50.9%), disusul teman dekat (27.9%), warga di daerah lain yang mengalami musibah (19.8%), dan teman kerja di kantor (10.5%). Anggota grup media sosial seperti WhatsApp Group (WAG) tidak terlalu diprioritaskan untuk menjadi target penerima bantuan, yang ini ditandai dengan kecilnya pilihan responden untuk membantu sesama anggota grup medsos ini (7.6%).

Berkaitan dengan bentuk bantuan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia, Grafik 3 memperlihatkan bahwa bahan kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng dan lain-lain dan uang merupakan bentuk bantuan yang paling favorit dipilih oleh orang Indonesia yang masing-masing merepresentasikan 48.8% dan 43.5% secara berurutan. Di masa pandemi Covid-19,

pemberian masker, *face shield* dan/atau *hand sanitizer* menjadi pilihan ketiga favorit (25.1%). Pemberian dalam bentuk obat-obatan dan/atau vitamin terlihat sangat rendah dengan hanya 8.9 persen.

**Grafik 3.**

Kepada Siapa Bantuan tersebut Diberikan dan Dalam Bentuk Apa?  
(base: mereka yang membantu, 77.2%)



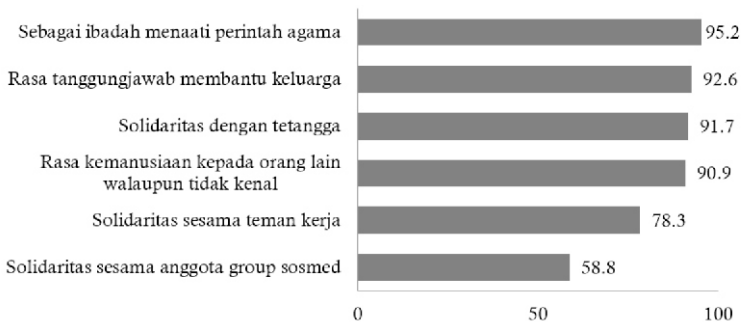
Untuk mengetahui lebih jauh tentang perilaku masyarakat Indonesia dalam pemberian bantuan kepada orang lain yang membutuhkan, survei CSRC UIN Jakarta ini kemudian menggali apa yang memotivasi atau yang mendorong seseorang untuk membantu orang lain. Grafik 4 menunjukkan temuan survei tentang motivasi ini. Agama menjadi faktor pendorong yang tertinggi yang memotivasi seseorang untuk membantu mereka yang membutuhkan bantuan (95.2%), disusul dengan tiga faktor utama lainnya yang berada di atas tingkat 90 persen yaitu rasa tanggung jawab membantu keluarga terdekat (92.6%), solidaritas dengan tetangga atau warga sekitar (91.7%), rasa kemanusiaan kepada orang lain yang tidak dikenal (90.9%). Faktor penting lainnya yang hampir mendekati tingkat 80 persen adalah solidaritas sesama teman kerja (78.3%). Faktor



yang menempati urutan terendah sebagai motivator yang mendorong membantu orang lain adalah solidaritas sesama anggota grup media sosial (58.8%). Tren atas rendahnya solidaritas melalui media sosial ini sejalan dengan temuan di Grafik 3 di mana responden tidak terlalu memprioritaskan untuk membantu anggota sesama grup media sosial. Penjelasan tentang tren ini yaitu karitatif lewat media sosial lebih merupakan fenomena urban, ketimbang umum meskipun penggunaan media sosial cukup merata.

**Grafik 4.**

Motivasi Pemberian Bantuan  
(base: mereka yang membantu, 77.2%)



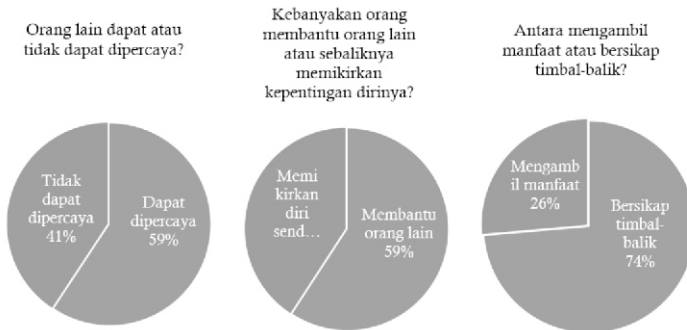
### E. Kepercayaan Sosial dan Pandemi Covid-19

Dalam literatur tentang kepercayaan sosial yang diulas di atas, kepercayaan sosial dapat dilihat dari penilaian kepercayaan terhadap orang lain. Di sini literatur tentang solidaritas dan literatur tentang kepercayaan sosial sama-sama melihat adanya *trade-off* antara mendahulukan membantu orang lain atau mendahulukan kepentingannya, dan antara hanya mengambil manfaat dari orang lain, atau sebaliknya bersikap timbal-balik. Grafik 5 mengilustrasikan pandangan masyarakat Indonesia tentang kepercayaan sosial. Sebagaimana terlihat di Grafik 5,

sekitar enam dari sepuluh masyarakat Indonesia (59%) menilai bahwa orang lain dapat dipercaya, sebaliknya 41 persen mengatakan sebaliknya. Angka ini terlihat kurang lebih sama ketika responden menilai proporsi membantu orang lain (59%) dibandingkan dengan memikirkan diri sendiri (41%). Hasil ini menunjukkan cukup tingginya ketidakpercayaan sosial (*mistrust*) dan adanya sinisme yang relatif tinggi dalam masyarakat. Temuan ini memperlihatkan angka yang sama, yaitu masing-masing 41% dalam ketidakpercayaan terhadap orang lain dan memikirkan diri sendiri (*self-centred interest*), pengertian yang diulas dalam kerangka teoritis di atas. Situasi yang kontras terlihat ketika sebagian besar reponden menilai lebih dominannya sikap timbal-balik (*reciprocity*) dengan proporsi 74% dibandingkan hanya mengambil manfaat dari orang lain yaitu dengan proporsi 26%.

### Grafik 5.

Kepercayaan Sosial atau Interpersonal: Kepercayaan terhadap Orang Lain, antara Membantu Orang Lain atau Memikirkan Diri Sendiri, dan antara Mengambil Manfaat atau Timbal Balik



Seperti yang terlihat di Tabel 1, hasil analisis regresi tentang kepercayaan sosial atau interpersonal menunjukkan bahwa  $H_0$  diterima  $0,000 < 0,05$ . Analisis regresi ini juga memperlihatkan

bahwa kebanyakan orang dapat dipercaya atau sebaliknya kebanyakan orang tidak dapat dipercaya (0,05) dan kebanyakan orang akan mengambil manfaat dari anda kalau ada kesempatan, atau sebaliknya kebanyakan orang bersikap timbal-balik kepada anda apapun situasinya (0,001)

**Tabel 1.**

Hasil Analisis Regresi Kepercayaan terhadap Orang Lain

Model	Coefficients <sup>a</sup>				
	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	34.852	3.723		9.362	.000
1 p16.1 Secara umum, apakah menurut Bapak/Ibu/Sdr/i kebanyakan orang dapat dipercaya atau sebaliknya kebanyakan orang tidak dapat dipercaya?	.429	.218	.064	1.967	.050
p16.2 Menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, apakah kebanyakan orang selalu membantu orang lain, atau sebaliknya kebanyakan orang selalu memikirkan kepentingan dirinya?	.486	.315	.052	1.541	.124
p16.3 Secara umum, apakah menurut Bapak/Ibu/Sdr/i, kebanyakan orang akan mengambil manfaat dari Anda kalau ada kesempatan, atau sebaliknya kebanyakan orang bersikap timbal-balik kepada Anda apapun situasinya?	1.092	.315	.116	3.468	.001

\* Dependent Variable: Institusi Pemerintah

Temuan survei CSRC UIN Jakarta ini menarik untuk dibandingkan dengan hasil riset yang dilakukan oleh Pew Research Center dengan pertanyaan yang sama kepada responden Amerika Serikat yang dirilis pada April 2020.<sup>5</sup> Tabel 2 memperlihatkan perbandingan hasil temuan survei CSRC UIN Jakarta dan Pew Research Center tentang kepercayaan

sosial, juga dikenal sebagai kepercayaan *interpersonal* atau kepercayaan umum. Sebagaimana dalam tabel tersebut, persepsi publik Indonesia mengenai tingkat kepercayaan sosial terlihat lebih tinggi, khususnya persepsi tentang sikap saling membantu dalam masyarakat. Dalam survei Pew Research Center tersebut ditemukan 53% menjawab orang umumnya dapat dipercaya, 44% menjawab orang cenderung berusaha saling membantu atau *reciprocity* (44%), dan 42% orang bersikap tanpa pamrih. Temuan kedua riset tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan sosial umum atau kepercayaan antar pribadi antar/antar individu pada masyarakat Indonesia relatif lebih tinggi di tiga indikator kepercayaan umum dibandingkan dengan tingkat kepercayaan sosial umum pada masyarakat Amerika Serikat. Kajian lanjutan disarankan untuk meneliti antara lain faktor signifikan yang memengaruhi kepercayaan sosial umum, konteks yang dapat memengaruhi tingkat kepercayaan sosial, dan dampak dari tingkat kepercayaan sosial umum.

**Tabel 2:**

Perbandingan Persepsi Kepercayaan Umum di Indonesia dan Amerika Serikat di Masa Covid-19

No	Persepsi tentang Kepercayaan ( <i>Trust</i> )	Indonesia	Amerika Serikat
1.	Orang umumnya dapat dipercaya ( <i>trustworthy</i> )	59%	53%
2.	Orang umumnya bersikap saling membantu ( <i>fair</i> )	74%	44%
3.	Orang umumnya membantu tanpa pamrih ( <i>helpful</i> )	59%	42%

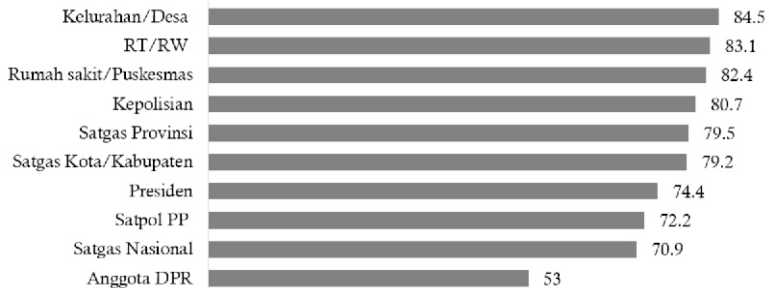
<sup>5</sup> Lihat: <https://www.pewresearch.org/fact-tank/2020/04/06/the-state-of-americans-trust-in-each-other-amid-the-covid-19-pandemic/>

## **F. Kepercayaan Politik dalam Penanganan Covid-19**

Dalam mengevaluasi kepercayaan politik terhadap institusi publik di tengah pandemi Covid-19, survei CSRC UIN Jakarta memadukan tidak hanya variabel yang lazim digunakan dalam literatur ilmu politik tentang kepercayaan politik yaitu kepercayaan warga terhadap organisasi dan institusi pemerintah seperti kepercayaan terhadap presiden, tetapi juga variabel dalam pendekatan Indonesia untuk menangani Covid-19 seperti pembentukan satuan tugas (satgas) Covid-19 daerah. Sebagaimana yang diilustrasikan dalam Grafik 6, institusi di level terdekat dengan masyarakat dan institusi daerah mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari publik Indonesia. Hasil survei ini menunjukkan bahwa semakin dekat institusi dengan masyarakat, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap institusi tersebut. Secara spesifik, institusi yang mendapatkan angka kepercayaan yang tinggi di atas 80 persen dari publik yaitu kelurahan/desa (84.5%), RT/RW (83.1%), dan rumah sakit/puskesmas (82.4%). Secara umum, kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian dalam penanganan Covid-19 terekam tinggi yaitu 80.7%. Satgas provinsi dan satgas kabupaten/kota mendapatkan kepercayaan yang juga tinggi yaitu hampir 80 persen. Evaluasi publik terhadap institusi di level nasional memperlihatkan bahwa 74.4% masyarakat percaya terhadap presiden dalam menangani pandemi Covid-19 dan 70.9% publik percaya terhadap satgas nasional. Hal yang kontras terlihat pada rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota DPR yaitu hanya 53%.

## Grafik 6.

### Kepercayaan terhadap Institusi dalam Penanganan Covid-19 (%)



Walaupun kepercayaan politik dari masyarakat Indonesia kepada pemerintah tinggi seperti yang terekam dalam survei CSRC UIN Jakarta di atas, masyarakat Indonesia dipertontonkan perilaku yang kurang pantas oleh pejabat publik dari pemerintah pusat. Polemik ini terkait dengan pernyataan ke publik oleh Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang mengklaim kemanjuran Ivermectin untuk turunkan Covid-19. Moeldoko mengatakan di bulan Juni 2021 lalu bahwa "Berdasarkan data laporan sementara di lapangan atas hasil distribusi yang dilakukan oleh HKTI di beberapa daerah terhadap penggunaan Ivermectin, di Kota Tangerang, Jakarta Timur, Depok, dan Bekasi menghasilkan tingkat kemanjuran yang hampir di seluruh daerah mendekati 100 persen untuk turunkan Covid-19" (Nugraheny, 2021a). Namun respon yang bertolak belakang dengan klaim Moeldoko, sekitar satu bulan kemudian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) meminta seluruh pihak untuk berhenti mempromosikan Ivermectin sebagai obat bagi pasien Covid-19 (Sari, 2021). PT Harsen Laboratories – produsen Ivermectin – menyampaikan permohonan maaf setelah mendapat teguran dari Badan

Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) terkait pelanggaran PT Harsen terhadap aturan tentang sejumlah syarat Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB) untuk obat Ivermectin dengan merek Ivermax12. Permintaan maaf dari PT Harsen Laboratories juga dilakukan karena sejumlah petinggi perusahaan telah menggiring opini masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsi Ivermectin yang diklaim dapat mengobati Covid-19 (Nugraheny, 2021b).

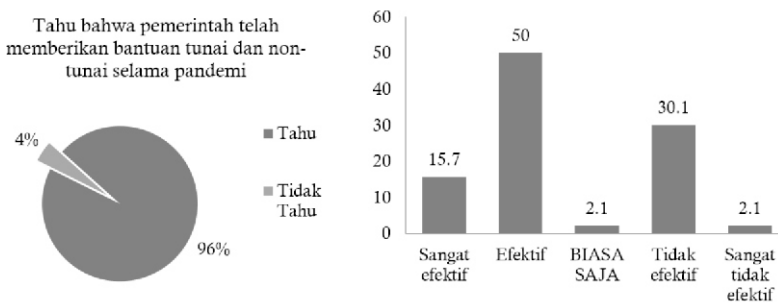
Polarisasi politik dan kepatuhan terhadap kebijakan penanganan Covid-19 juga memunculkan persoalan. Dalam survei panel di Jakarta, Soderborg dan Muhtadi (2020) menemukan bahwa sikap partisan memengaruhi dukungan publik terhadap kebijakan pembatasan. Di Jakarta, pemilih Prabowo menunjukkan kecenderungan mendukung kebijakan Gubernur Anies Baswedan lebih ketat dari kebijakan pembatasan oleh Jokowi yang lebih longgar. Hal yang sama, Deputy II Kantor Staf Presiden mengungkapkan bahwa beberapa provinsi tidak mendistribusikan vaksin Covid-19 ke kabupaten/kota karena adanya perbedaan pilihan politik (Ramadhan, 2021).

Survei CSRC UIN Jakarta juga mengevaluasi apakah publik Indonesia mengetahui bahwa selama pandemi Covid-19 ini pemerintah telah memberikan bantuan kepada sebagian kalangan masyarakat yang membutuhkan berupa bantuan tunai dan non-tunai (seperti sembako, insentif tarif listrik, kuota internet gratis untuk siswa, mahasiswa, dan tenaga pendidik) dan seberapa efektif bantuan pemerintah itu diberikan menurut penilaian publik. Sebagaimana yang terungkap di Grafik 7, hampir seluruh responden mengetahui (96%) bahwa pemerintah telah memberikan bantuan tunai dan non-tunai

selama pandemi Covid-19. Namun ada keragaman dari penilaian publik terhadap efektivitas bantuan pemerintah tersebut, 65.7% publik menilai bahwa bantuan pemerintah itu efektif, sebaliknya proporsi publik yang menilai bahwa bantuan pemerintah tersebut tidak efektif berkisar 32.2%.

**Grafik 7.**

Efektivitas Bantuan Pemerintah (%) (base: tahu bahwa pemerintah telah memberikan bantuan tunai dan non-tunai di masa pandemi Covid-19)



Hasil temuan di Grafik 7 memperlihatkan masih tingginya penilaian masyarakat Indonesia bahwa penyaluran bantuan oleh pemerintah selama ini dinilai tidak efektif. Masukan publik ini (*input*) dapat berguna untuk menjadi catatan evaluasi bagi pemerintah dan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) dalam memperbaiki tata kelola pemberian bantuan kepada masyarakat. Masih tingginya ketidakpercayaan publik terhadap efektivitas bantuan pemerintah beriringan dengan masih tingginya praktik korupsi bahkan yang dilakukan oleh petinggi pemerintahan. Kasus yang mencoreng kepercayaan publik yaitu ditetapkannya Menteri Sosial Juliari Batubara oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada awal Desember 2020 karena diduga terlibat kasus suap bantuan sosial Covid-19

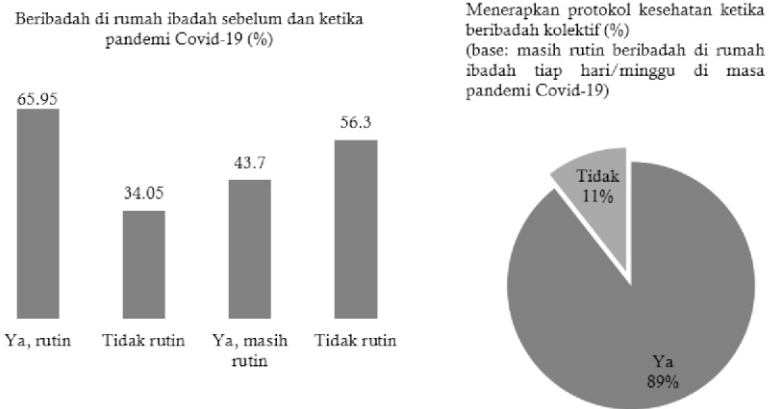


(Aditya, 2020). Kejadian ini tentu menambah daftar buruk ditangkapnya pejabat tinggi pemerintah karena dugaan terlibat praktik korupsi.

Beralih pada opini publik lainnya yang juga mendapatkan perhatian dalam survei ini yaitu beribadah secara kolektif di rumah ibadah di saat pandemi Covid-19 dan kedisiplinan untuk menerapkan protokol kesehatan dalam beribadah secara kolektif. Hasil survei yang terekam di Grafik 8 memperlihatkan tren beribadah di rumah ibadah sebelum dan di masa pandemi Covid-19, lalu sejauh mana mereka yang masih rutin beribadah di rumah ibadah di masa pandemi Covid-19 disiplin menerapkan protokol kesehatan dalam beribadah secara kolektif tersebut. Seperti yang tampak di Grafik 8, ada penurunan tren beribadah rutin ke rumah ibadah sebesar 22.25% antara waktu sebelum pandemi Covid-19 yaitu 65.95% dan di masa pandemi Covid-19 menjadi 43.7%. Sebaliknya ada tren peningkatan pada mereka yang tidak rutin beribadah ke rumah ibadah sebesar 22.25% antara periode sebelum pandemi Covid-19, yaitu 34.05% dan di masa pandemi Covid-19 menjadi 56.3%. Sebagaimana yang ditunjukkan di Grafik 8, hasil survei ini membuktikan bahwa Covid-19 memengaruhi turunnya rutinitas masyarakat Indonesia untuk beribadah ke rumah ibadah. Sebaliknya pandemi Covid-19 juga memengaruhi meningkatnya ketidakrutinan masyarakat untuk beribadah ke rumah ibadah. Selanjutnya, sebagian besar mereka yang masih rutin beribadah ke rumah ibadah yaitu 89% menyatakan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Hanya sedikit dari mereka yang rutin beribadah ke rumah ibadah (11%) tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan. Sikap publik ini dapat ditafsirkan selaras dengan anjuran pemerintah untuk beribadah di rumah saja, meskipun sikap ini tidak serta merta karena kepercayaan politik.

### Grafik 8.

#### Beribadah di Rumah Ibadah di Tengah Pandemi dengan Penerapan Protokol Kesehatan



### G. Penutup

Dari uraian tentang hasil temuan survei ini di atas, ada beberapa kesimpulan penting. Dilihat dari tren umum dalam temuan survei ini yaitu walaupun ada penerapan pembatasan (*restriction*) terhadap masyarakat di masa pandemi Covid-19 dan memburuknya kondisi ekonomi Indonesia, solidaritas sosial masyarakat Indonesia terlihat relatif baik. Temuan ini mengoreksi kekhawatiran sebagian kalangan bahwa kondisi ekonomi Indonesia yang terpuruk dapat mengakibatkan konflik sosial. Kepedulian masyarakat untuk membantu orang lain tanpa melihat perbedaan agama terlihat sangat tinggi (92.45%). Sebaliknya, solidaritas virtual/daring melalui platform media sosial terlihat rendah yang ini terekam dari 50.3% ketidaksetujuan publik untuk peduli kepada teman-teman di medsos.

Publik juga menunjukkan resiliensi untuk tetap membantu

orang lain yang membutuhkan bantuan, walaupun mereka mengalami penurunan pendapatan di saat pandemi Covid-19. Mayoritas masyarakat Indonesia masih membantu orang lain, walaupun di tengah kesulitan ekonomi (77.2%). Relasi dengan lingkungan terdekat, seperti tetangga sekitar dan keluarga terdekat, menjelaskan kepada siapa target grup penerima bantuan dari mereka yang memberikan bantuan di saat pandemi Covid-19. Temuan ini kembali memperlihatkan rapuhnya solidaritas virtual seperti grup media sosial, di mana target grup medsos ini tidak diprioritaskan oleh publik dalam menargetkan kepada siapa bantuan diberikan. Empat faktor pendorong yang tertinggi yang memotivasi seseorang untuk membantu orang lain yang membutuhkan bantuan adalah agama, rasa tanggung jawab membantu keluarga terdekat, solidaritas dengan tetangga atau warga sekitar tempat tinggal, dan rasa kemanusiaan kepada orang lain yang tidak dikenal. Solidaritas virtual melalui media sosial lagi-lagi menempati urutan terendah untuk memotivasi seseorang untuk membantu orang lain yang membutuhkan.

Terkait kepercayaan sosial umum, hampir 6 dari 10 orang Indonesia memercayai orang lain. Sekitar 4 dari 10 orang Indonesia mengekspresikan sikap sinisme publik terhadap mereka yang memikirkan dirinya sendiri dibandingkan membantu orang lain yang terekam dalam survei ini. Namun ada hal relatif positif terkait sikap gotong royong yaitu 74% orang Indonesia menunjukkan sikap saling membantu (*reciprocity*). Studi ini juga menemukan tingginya tingkat kepercayaan politik dari masyarakat terhadap institusi publik dalam menangani pandemi Covid-19 yaitu 7 dari 10 masyarakat Indonesia. Temuan survei CSRC UIN Jakarta ini juga mengindikasikan bahwa semakin dekat institusi dengan warga, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan warga terhadap

institusi tersebut. Ada hal yang kontras yaitu rendahnya kepercayaan publik terhadap anggota DPR RI.

Dari 96% publik yang tahu bahwa pemerintah telah memberikan bantuan tunai dan non-tunai selama pandemi Covid-19, 65.7% publik menilai bahwa bantuan pemerintah itu efektif. Sebaliknya 32.2% masyarakat Indonesia menilai bahwa bantuan pemerintah tersebut tidak efektif. Temuan ini dapat menjadi masukan kepada pemerintah untuk mengevaluasi tata kelola pemberian bantuan sosial khususnya kepada kalangan masyarakat yang secara ekonomi kurang mampu.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aditya, N. R. (2020). *KPK Tetapkan Mensos Juliari Batubara Tersangka Kasus Dugaan Suap Bansos Covid-19*. Kompas.Com. <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/06/02081481/kpk-tetapkan-mensos-juliari-batubara-tersangka-kasus-dugaan-suap-bansos>.
- Alfano, V., & Ercolano, S. (2020). *The Efficacy of Lockdown Against COVID-19: A Cross-Country Panel Analysis*. *Applied Health Economics and Health Policy*, 18, 509–517. <https://doi.org/10.1007/s40258-020-00596-3>.
- Bardan, A. B., Pink, B., & Santoso, Y. I. (2020). *Indonesia resmi resesi, ini 5 dampaknya terhadap masyarakat*. Kontan.Co.Id; PT Grahanusa Mediatama. <https://money.kompas.com/read/2020/11/06/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977-juta?page=all>.
- Bauder, H., & Juffs, L. (2020). *'Solidarity' in the migration and refugee literature: analysis of a concept*. *Journal of Ethnic and Migration Studies*, 46, 46–65. <https://doi.org/10.1080/1369183X.2019.1627862>.
- BBC. (2020). *Coronavirus confirmed as pandemic by World Health Organization*. Bbc.Com. <https://www.bbc.com/news/world-51839944>.
- Bol, D., Giani, M., Blais, A., & Loewen, P. J. (2020). *The effect of COVID-19 lockdowns on political support: Some good news for democracy?* *European Journal of Political Research*. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12401>.
- CDC. (2021). *Scientific Brief: SARS-CoV-2 Transmission*. *Centers for*

*Disease Control and Prevention*, U.S. Department of Health & Human Services. <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/science/science-briefs/sars-cov-2-transmission.html>.

CNN Indonesia. (2020). *UI Ungkap Kronologi Negara Abai Virus Corona Masuk RI Januari*. CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20200420160222-199-495344/ui-ungkap-kronologi-negara-abai-virus-corona-masuk-ri-januari>.

Devine, D., Gaskell, J., Jennings, W., & Stoker, G. (2021). *Trust and the Coronavirus Pandemic: What are the Consequences of and for Trust? An Early Review of the Literature*. *Political Studies Review*, 19, 274–285. <https://doi.org/10.1177/1478929920948684>.

Ervasti, H., Kouvo, A., & Venetoklis, T. (2019). *Social and Institutional Trust in Times of Crisis: Greece, 2002–2011*. *Social Indicators Research*, 141, 1207–1231. <https://doi.org/10.1007/s11205-018-1862-y>.

ESAIASSON, P., SOHLBERG, J., GHERSETTI, M., & JOHANSSON, B. (2020). *How the coronavirus crisis affects citizen trust in institutions and in unknown others: Evidence from ‘the Swedish experiment.’* *European Journal of Political Research*. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12419>.

Fauzia, M. (2020). *Dampak Pandemi: Indonesia Resesi, Pengangguran Tembus 9,77 Juta*. Kompas.Com; PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group).

<https://money.kompas.com/read/2020/11/06/081247126/dampak-pandemi-indonesia-resesi-pengangguran-tembus-977-juta?page=all>.

Gaztambide-Fernández, R. A. (2020). *What is solidarity? During coronavirus and always, it’s more than ‘we’re all in this together.’*

- Theconversation.Com. <https://theconversation.com/what-is-solidarity-during-coronavirus-and-always-its-more-than-were-all-in-this-together-135002>.
- Hetherington, M. J., & Nelson, M. (2003). *Anatomy of a Rally Effect: George W. Bush and the War on Terrorism*. PS: Political Science & Politics, 36, 37–42. <https://doi.org/10.1017/S1049096503001665>.
- Igwe, P. A., Ochinanwata, C., Ochinanwata, N., Adeyeye, J. O., Ikpor, I. M., Nwakpu, S. E., Egbo P., O., Onyishi E., I., Vincent, O., Nwekpa, K. C., Nwakpu, K. O., Adeoye, A. A., Odika, P. O., Fakah, H., Ogunnaike, O. O., & Umemezia, E. I. (2020). *Solidarity and social behaviour: how did this help communities to manage COVID-19 pandemic?* International Journal of Sociology and Social Policy, 40, 1183–1200. <https://doi.org/10.1108/IJSSP-07-2020-0276>.
- Kemenkopmk, R. (2021). *Pemerintah Bangun Gerakan Solidaritas Nasional Penanganan Covid-19*. <https://www.kemenkopmk.go.id/pemerintah-bangun-gerakan-solidaritas-nasional-penanganan-covid-19>.
- Kementerian Kominfo, R. (2020). *Disiplin 3M, Kunci Utama Tekan Penularan Covid-19*. Kementerian Komunikasi Dan Informatika RI. [https://www.kominfo.go.id/content/detail/29899/disiplin-3m-kunci-utama-tekan-penularan-covid-19/0/sorotan\\_media](https://www.kominfo.go.id/content/detail/29899/disiplin-3m-kunci-utama-tekan-penularan-covid-19/0/sorotan_media).
- Kiess, J. M., & Trenz, H.-J. (2019). *Ties of Solidarity and the Political Spectrum: Partisan Cleavages in Reported Solidarity Activity Across Europe*. American Behavioral Scientist, 63, 459–474. <https://doi.org/10.1177/0002764218823839>.
- Letki, N. (2008). *Does Diversity Erode Social Cohesion? Social Capital and Race in British Neighbourhoods*. Political Studies, 56, 99–126.

<https://doi.org/10.1111/j.1467-9248.2007.00692.x>.

LSI. (2019). *Tantangan Intoleransi dan Kebebasan Sipil serta dan Modal Kerja pada Periode Kedua Pemerintahan Joko Widodo*. Lembaga Survei Indonesia (LSI). <http://www.lsi.or.id/riset/447/rilis-survei-lsi-03-november-2019>.

Makridis, C. A., & Wu, C. (2021). How social capital helps communities weather the COVID-19 pandemic. *PLoS One*, 16, e0245135–e0245135.

<https://doi.org/10.1371/journal.pone.0245135>.

Moosa, I. A. (2020). *The effectiveness of social distancing in containing Covid-19*. *Applied Economics*, 52, 6292–6305.

<https://doi.org/10.1080/00036846.2020.1789061>.

Mujani, S. (2020). *Covid-19 Memiliki Pengaruh pada Komitmen Masyarakat pada Demokrasi*. Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC). <https://saifulmujani.com/saiful-mujani-covid-19-memiliki-pengaruh-pada-komitmen-masyarakat-pada-demokrasi/>.

Newton, Ken, & Zmerli, S. (2011). *Three forms of trust and their association*. *European Political Science Review*, 3, 169–200. <https://doi.org/10.1017/S1755773910000330>.

Newton, Kenneth, Stolle, D., & Zmerli, S. (2018). *Social and Political Trust*. In E. M. Uslaner (Ed.), *The Oxford Handbook of Social and Political Trust*. Oxford University Press.

NU Care-LAZISNU. (2020). *Saling Peduli Cegah Corona*. [https://nuicare.id/program/gerakan\\_sejuta\\_masker\\_cegah\\_corona](https://nuicare.id/program/gerakan_sejuta_masker_cegah_corona).

Nugraheny, D. E. (2021a). Moeldoko Klaim Kemanjuran Ivermectin untuk Turunkan Covid-19, Bagaimana Faktanya? K o m p a s . C o m .



- <https://nasional.kompas.com/read/2021/06/28/14343501/moeldoko-klaim-kemanjuran-ivermectin-untuk-turunkan-covid-19-bagaiman>.
- Nugraheny, D. E. (2021b). *Pengacara: Tak Ada Fakta Pak Moeldoko Promosikan Ivermectin*. Kompas.Com.
- <https://nasional.kompas.com/read/2021/07/29/16085461/pengacara-tak-ada-fakta-pak-moeldoko-promosikan-ivermectin>.
- Osa, M. (2008). *Solidarity*. In W. A. Darity Jr. (Ed.), *International Encyclopedia of the Social Sciences* (2nd ed., Vol. 8, pp. 23–25). Macmillan Reference USA.
- Pemerintah Daerah DIY. (2021). *Gerakan Solidaritas dan Kedermawanan dalam Penanganan Covid-19*. <https://corona.jogjaprov.go.id/rilis/berita/105-gerakan-solidaritas-dan-kedermawanan-dalam-penanganan-covid-19>.
- Pranita, E. (2020). *Diumumkan Awal Maret, Ahli: Virus Corona Masuk Indonesia dari Januari*. Kompas.Com.
- <https://www.kompas.com/sains/read/2020/05/11/130600623/diumumkan-awal-maret-ahli--virus-corona-masuk-indonesia-dari-januari?page=all>.
- Putnam, R. D. (1995). *Bowling Alone: America's Declining Social Capital*. *Journal of Democracy*, 6, 65–78. <https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002>.
- Putnam, R. D. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. Simon & Schuster.
- Putnam, R. D., Leonardi, R., & Nanetti, R. Y. (1993). *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton University Press.
- Ramadhan, A. (2021). *Deputi KSP: Banyak Provinsi Tak Distribusikan*

*Vaksin Covid-19 karena Perbedaan Politik.* Kompas.Com.  
<https://nasional.kompas.com/read/2021/08/18/17284081/d-eputi-ksp-banyak-provinsi-tak-distribusikan-vaksin-covid-19-karena>.

Rizal, J. G. (2020). *Pandemi Covid-19, Apa Saja Dampak pada Sektor Ketenagakerjaan Indonesia?* Kompas.Com; PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group).

<https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/11/102500165/pandemi-covid-19-apa-saja-dampak-pada-sektor-ketenagakerjaan-indonesia-?page=all>.

Sari, H. P. (2021).

<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/21/14392261/b-pom-minta-semua-pihak-setop-promosikan-ivermectin-sebagai-obat-covid-19>. Kompas.Com.

<https://nasional.kompas.com/read/2021/07/21/14392261/b-pom-minta-semua-pihak-setop-promosikan-ivermectin-sebagai-obat-covid-19>

Scholz, S. J. (2013). *Solidarity*. In H. LaFollette (Ed.), *International Encyclopedia of Ethics*. Blackwell Publishing Ltd.  
<https://doi.org/10.1002/9781444367072.wbiee737>.

SCHRAFF, D. (2020). *Political trust during the Covid-19 pandemic: Rally around the flag or lockdown effects?* *European Journal of Political Research*. <https://doi.org/10.1111/1475-6765.12425>.

Soderborg, S., & Muhtadi, B. (2020). *Riset: keberpihakan politik mempengaruhi perilaku warga terkait pandemi di wilayah dengan konflik politik tinggi (misal Jakarta)*. Theconversation.Com.  
<https://theconversation.com/riset-keberpihakan-politik-mempengaruhi-perilaku-warga-terkait-pandemi-di-wilayah-dengan-konflik-politik-tinggi-misal-jakarta-150877>.

- Suara Muhammadiyah. (2021). *1 Triliun dari Muhammadiyah, Nggak Pake Pasir!* <https://suaramuhammadiyah.id/2021/08/04/1-triliun-dari-muhammadiyah-nggak-pake-pasir/>.
- Szreter, S., & Woolcock, M. (2004). *Health by association? Social capital, social theory, and the political economy of public health*. *International Journal of Epidemiology*, 33(4), 650–667. <https://doi.org/10.1093/ije/dyh013>.
- Tempo.co. (2020). *Australia Salurkan Dana Bantuan Covid-19 ke NU dan Muhammadiyah*. <https://dunia.tempo.co/read/1362744/australia-salurkan-dana-bantuan-covid-19-ke-nu-dan-muhammadiyah/full&view=ok>.
- WEF. (2020). *Why lockdowns can halt the spread of COVID-19*. World Economic Forum . <https://www.weforum.org/agenda/2020/03/why-lockdowns-work-epidemics-coronavirus-covid19/>



### *Bab 3*

## **AGAMA, SOLIDARITAS SOSIAL DAN HARMONI SELAMA PANDEMI**

*Oleh: Muchtadlirin*

**D**alam menghadapi Pandemi Covid-19 peran agama menjadi layaknya pisau bermata dua. Di satu sisi nilai-nilai agama yang dianut seringkali berbenturan dengan upaya-upaya dalam memutus mata rantai Covid-19. Sebaliknya agama juga mampu menempatkan diri sebagai bagian penting dalam memotong mata rantai penyebaran virus. Berbagai berita di media berkali-kali menampilkan gesekan-gesekan baik antar sesama umat beragama atau antara umat dengan petugas pemerintah karena perbedaan cara pandang terhadap pandemi. Karenanya agama sempat dituding sebagai bagian dari masalah dalam penanganan pandemi. Situasi demikian hampir terjadi di banyak negara. Di Amerika Serikat, Jemaat Slavia Gereja Besar California Amerika Serikat sempat dianggap sebagai pusat penyebaran virus, di Malaysia 513 orang dinyatakan positif Covid-19 pasca pertemuan keagamaan, di Blitar dan di Pati muncul kluster masjid, dan di Bandung 226 Jemaat Gereja Bethel Bandung juga sempat dinyatakan positif Covid-19. Selain itu, masih banyak lagi kasus kluster keagamaan di tanah air.

Gesekan dan konflik pun tak jarang bersumber dari tempat ibadah. Peraturan yang tertuang dalam protokol kesehatan (prokes) dianggap tidak sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai agama yang harus ditegakkan. Tengoklah bagaimana misalnya praktik menjaga

jarak menjadi bermasalah saat berhadapan dengan ajaran untuk merapatkan barisan (*shaf*) dalam salat berjamaah di masjid. Tak hanya sampai di situ, prosesi peribadatan lewat daring (*online*) juga sempat mengundang polemik di jagat maya. Demikian pula dengan praktik mengenakan masker pun tak kalah serunya telah membuat konflik antara jamaah yang tetap menggunakan masker saat beribadah ke masjid namun pihak takmir (pengurus) masjid justru memerintahkan untuk mengikuti aturan masjid yang justru melarang penggunaan masker. Vidio pendek seorang jamaah di sebuah masjid meminta untuk melepas masker sempat viral. Peristiwa itu dikonfirmasi benar terjadi di Kota Bekasi pada Mei 2021.

Benturan antara sains dengan agama juga muncul saat isu vaksinasi menyeruak. Dipertentangkannya vaksin dengan agama bukan hal yang baru terjadi, melainkan telah lama terjadi. Pada tahun 1796, seorang ilmuwan bernama Edward Jenner mulai mengembangkan sistem vaksin. Namun, saat itu para rohaniawan Kristen menyebutnya telah melawan kehendak Tuhan. Sampai kini berbagai kasus penolakan vaksin atas alasan agama juga tak sedikit ditemui dan ini tidak hanya terjadi di tanah air. Diberitakan (Republika, 16 September 2021) ribuan pegawai Departemen Kepolisian Los Angeles menolak divaksin atas alasan agama. Bahkan kecenderungan yang sama makin meningkat di beberapa negara bagian Amerika Serikat pasca Presiden Joe Biden mewajibkan vaksin bagi para pekerja Amerika. Dengan kata lain agama dijadikan tameng untuk menolak vaksin. Dalam Islam penolakan seringkali ditunjukkan dengan lahirnya fatwa haram dari otoritas agama.

Kasus-kasus itu menjadi gambaran bagaimana sejatinya agama dan instrumen yang ada di dalamnya juga memiliki pengaruh penting dalam upaya-upaya penanganan pandemi. Keberadaan

perspektif keagamaan yang justru mendukung penanganan pandemi juga tak kalah masifnya. Keberadaan otoritas keagamaan dan institusi keagamaan juga turut mengambil peran yang signifikan dalam menekan laju penyebaran virus Corona dan dalam memitigasi Pandemi. Narasi-narasi yang ditampilkan adalah narasi positif yang mengajak masyarakat beragama ikut terjun dan terlibat dalam penanganan Pandemi, minimal menerapkan prokes pada dirinya sendiri baik di dalam maupun di luar rumah saat bersosialisasi khususnya di tempat ibadah. Bagian ini akan mengulas isu-isu terkait peran agama dan keberagamaan masyarakat serta bagaimana pula relasi antar agama di saat Pandemi.

#### **A. Sikap Masyarakat Beragama dalam Menghadapi Pandemi**

Kebijakan pemerintah dalam menghadapi Pandemi Covid-19 bisa dikatakan terus beradaptasi dengan situasi dan tingkat keterpaparan masyarakat. Sampai tulisan ini dibuat, sudah dua kali Indonesia mengalami puncak keterpaparan yang seringkali juga disebut sebagai Gelombang Covid-19 berdasarkan lonjakan kasus yang terjadi, bahkan WHO mengingatkan ancaman Gelombang Ketiga Covid-19 (detik.com). Berbagai kebijakan dan peraturan pun dibungkus dengan istilah yang berubah-ubah. Terhitung sudah lima kali istilah kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi mengalami perubahan, yaitu PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) berdasarkan Permenkes No. 9 Tahun 2020 yang kemudian berubah menjadi PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Jawa-Bali. Istilah PPKM yang pertama ini diberlakukan dari 11-25 Januari 2021 sebagai respon atas lonjakan kasus Covid-19 pasca libur Natal dan Tahun Baru setelah sebelumnya Pemerintah DKI Jakarta menggunakan istilah PSBB Transisi. *Kedua*, mulai dari 9 Februari 2021

pemerintah menggunakan istilah PPKM Skala Mikro. *Ketiga*, mulai pertengahan Juni 2021 pemerintah melakukan Penebalan PPKM Skala Mikro lewat Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 14 Tahun 2021. *Keempat*, pasca libur Lebaran 2021 dan ditemukannya varian Virus Delta pemerintah memberlakukan PPKM Darurat yang dianggap lebih ketat dan berakhir pada 20 Juli 2021. *Kelima*, pada 25 Juli 2021 PPKM Darurat berubah menjadi PPKM Level 3-4 disesuaikan dengan rekomendasi WHO dengan memilah wilayah sesuai level kasusnya. Namun semuanya dilakukan demi tujuan yang sama, yaitu membatasi kegiatan masyarakat untuk mencegah penularan virus (tempo.co).

Pembatasan kegiatan masyarakat yang diikuti dengan protokol kesehatan ketat pun tak ayal juga menyasar tempat ibadah lewat Peraturan Menteri Kesehatan No. 9 Tahun 2020. Dari perspektif hak asasi manusia (HAM) pembatasan dalam mengekspresikan keberagaman masyarakat oleh pemerintah dapat dibenarkan selama dalam rangka melindungi antara lain kesehatan atau moral masyarakat. Kegiatan keagamaan oleh pemeluk agama itu sendiri memang termasuk *forum internum* yang tidak dapat diintervensi atau dibatasi oleh siapapun termasuk oleh negara, namun manifestasi dari keberagaman dalam kehidupan publik adalah bagian dari *forum externum* yang sifatnya berbeda dengan forum internum. Kebebasan menjalankan agama dapat diatur atau dibatasi oleh ketentuan hukum. Maka pembatasan praktik ibadah yang melibatkan jumlah banyak pun dapat dibenarkan. Tidak hanya di Indonesia yang menerapkan aturan beribadah di rumah dan menghindari tempat peribadatan, namun juga negara-negara lain di dunia turut menerapkan protokol kesehatan ketat selama pandemi khususnya di saat kasus Covid-19 mencapai titik tinggi dan



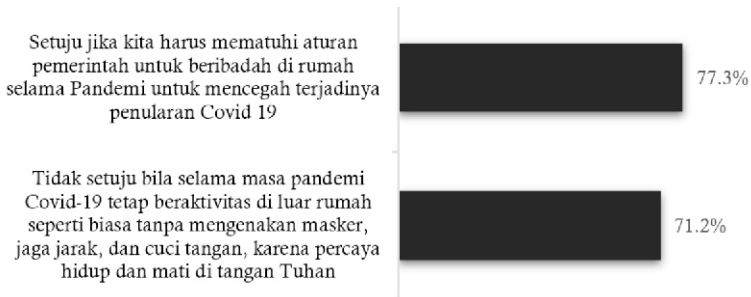
mengkhawatirkan. Misalnya, ditutupnya Masjidil Haram dan pembatalan ibadah haji di Arab Saudi, penutupan sejumlah kuil-kuil di India, dan pelarangan upacara pemakaman termasuk gereja-gereja Katolik di Roma.

Pembatasan praktik ibadah di Indonesia bukan tanpa tantangan dan kontroversi. Banyak memang yang mendukung penutupan masjid dan tempat-tempat peribadatan lain, namun tak sedikit pula yang menolaknya diiringi berbagai argumentasi khususnya dengan dalil-dalil normatifnya. Tidak hanya itu, pandangan politik juga dianggap memengaruhi cara pandang terhadap peraturan ini khususnya peta politik pemilihan presiden (pilpres) 2019. Tidak sedikit ulama dan juga tokoh politik yang keras mengkritisi kebijakan ini. Haikal Hasan dan Abdul Somad sebagai yang dianggap tokoh agama pun terang-terangan menolak penutupan masjid. Bahkan politisi PKS, Refrizal sampai menyindir dengan mengatakan, “Apa tidak takut Allah murka?” (pikiran-rakyat.com). Narasi bahwa ini adalah upaya rezim yang anti agama untuk mendzalimi umat Islam pun ikut berseliweran di ruang-ruang publik khususnya media sosial. Argumentasi lain yang juga muncul adalah ketidakpercayaan pada Covid-19 dan munculnya anggapan bahwa Allah SWT akan melindungi umat Islam selama berada di dalam masjid. Walaupun demikian Majelis Ulama Indonesia (MUI) sendiri dalam menyikapi kontrol terhadap peribadatan di masa pandemi justru mengeluarkan fatwa yang sejalan dengan kebijakan pemerintah. Misalnya saja Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ibadah dalam Situasi Terjadi Wabah Covid-19 yang diikuti dengan Surat Edaran (SE) Menteri Agama No. 16 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Luar Wilayah

Pemberlakuan PPKM Darurat serta SE Menteri Agama No. 17 Tahun 2021 tentang Peniadaan Sementara Peribadatan di Tempat Ibadah, Malam Takbiran, Salat Idul Adha, dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kurban Tahun 1442 H/2021 M di Wilayah PPKM Darurat.

**Grafik 1.**

Sikap Terhadap Aturan Pemerintah



Grafik 1 di atas menunjukkan bahwa penerimaan justru mengungguli penolakan. Kebanyakan masyarakat Indonesia (77,3%) justru sepakat dengan adanya aturan pemerintah untuk menjalankan ibadah di rumah selama pandemi demi mencegah terjadinya penularan Covid-19. Sebaliknya mereka menolak sikap dan perilaku masyarakat yang tetap beraktivitas di luar rumah seperti biasa dengan mengabaikan proses, misalnya mengenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan. Bahkan mereka tidak sepakat adanya alasan untuk perilaku yang demikian karena percaya dengan takdir serta hidup dan mati di tangan Tuhan. Artinya, ada kecenderungan yang stabil di antara dua variabel tersebut untuk mematuhi aturan pemerintah yang bisa dikatakan sampai mencapai 3/4 masyarakat Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan hanya 1/4 saja yang tampaknya mengalami apa yang diistilahkan oleh psikolog

sebagai bias kognitif yang seringkali mendorong orang untuk bertindak irasional.<sup>1</sup> Mereka tidak mengindahkan aturan pemerintah dengan merasa lebih mengerti kondisi pandemi, padahal sejatinya itu adalah kesalahan. Penolakan karena alasan agama pun dapat dibaca sebagai bias kognitif dimana hidup mati diyakini semata-mata ada di tangan Tuhan. Karenanya, menurut mereka kita justru seharusnya takut kepada Tuhan bukan kepada virus corona. Situasi ini juga dapat dikatakan sebagai bias kognitif dalam beragama sehingga memunculkan dogmatisasi dalam beragama yang ditandai dengan banyaknya umat beragama merasa paling benar dan akhirnya menyalahkan individu lainnya, bahkan menghakiminya sebagai sesat ataupun kafir (Buana, 2020). Maka tak mengherankan bilamana ditemukan misalnya di sebuah masjid di Kota Bekasi seorang jamaah yang mengenakan masker justru diusir keluar masjid karena masjid tersebut justru melarang pemakaian masker di masjid. Pengurus masjid merasa yakin jika masjid terlindung dari sebaran virus Covid-19.

Sejatinya kebijakan yang membatasi penggunaan tempat ibadah oleh jamaah seperti ini sebenarnya juga berdasar pada berbagai argumentasi syariat yang kuat dalam Islam, namun faktanya penolakan tetap saja ada dan tidak hanya terjadi di Indonesia. Di negara-negara Arab pun penolakan cukup gencar disuarakan khususnya yang berasal dari oposisi pemerintah yang berkuasa. Mereka menuding pemerintah hendak meniadakan syiar agama Islam berupa salat wajib lima waktu. Di Yordania misalnya, Ikhwanul Muslimin dan sebagian

---

<sup>1</sup> Bias kognitif adalah kesalahan sistematis dalam berpikir yang memengaruhi keputusan dan penilaian yang dibuat seseorang.

Islamis menolak kebijakan penutupan masjid. Namun otoritas Yordania lewat Menteri Waqafnya, Mohammad Khalaile, tegas mengatakan siap menanggung pertanggungjawaban di hadapan Allah SWT dan merasa terhormat jika sejarah mengabadikan namanya yang menutup masjid agar wabah tidak menyebar di tengah-tengah manusia. Pernyataannya ditutup dengan pertanyaan retorik, apakah logis negara seperti Yordania akan memerangi agama dan menutup masjid dengan cara seperti ini? (republika.co.id). Maka sejatinya penolakan yang terjadi lebih kental nuansa politisnya tinimbang perspektif religiusnya. Fakta ini setidaknya terkonfirmasi lewat hasil uji tabulasi silang antara variabel pilihan presiden saat pilpres 2019 dengan tingkat persetujuan mematuhi aturan pemerintah untuk beribadah di rumah saja. Ditemukan bahwa ada hubungan yang signifikan antar dua variabel tersebut (H1 diterima) dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,5 yaitu 0,000 baik pada nilai p-value Phi Crammer's V maupun Pearson Chi-Square. Tingkat persetujuan para pemilih Joko Widodo-Ma'ruf Amin separuh lebih besar daripada para pemilih Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk mematuhi aturan ini.

## **B. Harmoni Keagamaan selama Pandemi**

Harmoni keagamaan di sini mengacu kepada kerukunan antar umat beragama dan mewakili pendapat masyarakat mengenai interaksi dan interelasi antar umat beragama di Indonesia. Harmoni umat beragama biasanya dicirikan oleh adanya hubungan bertetangga yang damai (*peaceful coexistence*), pengakuan dan penerimaan, toleransi dan simpati, kerja sama, kesetaraan, keadilan serta orientasi kepada masalah bersama. Sementara solidaritas sosial menekankan kemauan warga untuk mengenyampingkan kepentingan pribadinya demi kepentingan bersama, harmoni sosial dibuktikan dengan

komitmen untuk saling menghargai, menerima, dan bekerjasama antara kelompok sosial yang berbeda demi mencapai kehidupan yang harmonis dan damai. Kedua konsep ini dinilai saling berhubungan, dimana solidaritas sosial yang tidak membeda-bedakan identitas kelompok dapat memperkuat harmoni yang berkesinambungan (Cheung dan Ma 2011).

Survei persepsi publik menunjukkan harmoni keagamaan selama masa pandemi masih diwarnai oleh perbedaan pendapat dalam menyikapi sejumlah isu kontekstual (CSRC UIN Jakarta 2020). Pada tataran normatif, publik umumnya menilai orang di sekitarnya hidup rukun, dapat menerima tetangga walaupun beda agama, serta berusaha toleran terhadap perbedaan. Mereka juga sepakat pentingnya mengatasi konflik secara damai, menghormati HAM dan keyakinan agama lain, serta mendukung penanganan ujaran kebencian. Namun ketika norma-norma itu diletakkan dalam konteks interseksi politik, agama dan budaya, mereka berbeda pendapat. Misalnya, dalam menilai penggunaan kekerasan atas nama agama, sebagian besar menolak penggunaan kekerasan apapun dalihnya, sedangkan sebagian kecil dapat menerimanya asal untuk membela kesucian agama. Dalam hal kebebasan kaum minoritas, tidak sedikit yang mengabaikan pentingnya perlindungan hak dan kebebasan mereka oleh negara. Dalam hal politik, masih cukup banyak responden yang tidak dapat menerima pemimpin beda agama. Sedangkan dalam ranah kebudayaan, simpati di kalangan umat beragama masih cukup kental, di tengah resiko disharmoni yang ditandai oleh menguatnya konservatisme agama.

### **C. Toleransi dan Kekerasan atas Nama Agama**

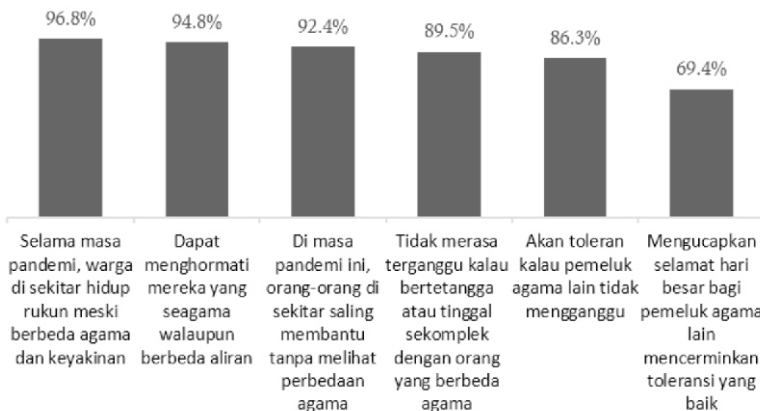
Pengamatan umum menunjukkan kerukunan umat beragama selama pandemi ini masih terjaga dengan baik. Menteri Agama

(Menag) RI saat itu, Fachrul Razi, pada 14 Juli 2020, mengutarakan sisi positif dari Pandemi Covid-19 terpeliharanya kerukunan umat beragama. Survei ini mengonfirmasi pendapat tersebut khususnya dalam hal hidup bertetangga dengan warga yang berbeda agama. Grafik 2 menunjukkan hampir semua responden (96,8%) mengakui bila di lingkungannya warga hidup rukun, dan sebanyak 89,5% tidak merasa terganggu dengan tetangga yang berbeda agama. Sementara itu 86,3% mengaku akan bersikap toleran kepada pemeluk agama lain asal tidak saling mengganggu. Data terakhir ini juga mengonfirmasi hasil penelitian Balai Litbang (Balitbang) Agama Jakarta (2019) bahwa masyarakat umumnya menghormati perbedaan agama dan keyakinan di lingkungannya. Dengan demikian, data pada Grafik 2 di bawah ini menunjukkan persepsi masyarakat yang masih menilai harmoni masyarakat selama pandemi masih positif dengan bukti persentase rerata di atas 90%. Harmoni sosial yang terjadi di dalam masyarakat seringkali juga ditandai salah satunya dengan solidaritas yang ikut berkembang secara signifikan. Salah satu yang dapat dirujuk adalah data survei ini yang memberikan bukti bahwa di masa pandemi 92,4% masyarakat saling membantu tanpa melihat perbedaan agama. Sederhananya harmoni ekuivalen dengan solidaritas yang tumbuh di masyarakat. Walaupun dengan kompleksitas dan keragaman masyarakat saat ini nyatanya solidaritas organik juga tetap bertahan selama pandemi. Dalam solidaritas, kepercayaan, dan keagamaan yang dianggap Emile Durkheim sebagai bagian paling dalam dari jiwa manusia yang berada di luar diri manusia sebagai individu tetap berjalan pada jalur kerja sama antar individu dan hubungan bermasyarakat (Muhni 1994). Identitas keagamaan, khususnya, untuk sementara tidak lagi menjadi pertimbangan penting dalam memberikan bantuan

kepada orang lain selama pandemi. Lewat *tree analysis* (analisis pohon) juga ditemukan bahwa sikap membantu masyarakat perkotaan lebih inklusif dibandingkan dengan pedesaan walaupun perbandingannya tak terlalu signifikan. Namun pengalaman dan realitas kemajemukan masyarakat perkotaan yang lebih mendorong berkembangnya solidaritas organik memberikan dampak positif dalam hal semangat membantu tanpa melihat identitas primordial.

**Grafik 2.**

Tingkat Kerukunan Umat Beragama



Data tentang persepsi toleransi di atas bagaimanapun mempertegas temuan Jeremy Menchik (Menchik, 2015) yang menyatakan toleransi komunal tampak dominan di kalangan Ormas Islam di Indonesia. Menurut Menchik, toleransi komunal merujuk kepada sikap toleransi beragama yang menempatkan nilai-nilai komunal di atas nilai-nilai kewargaan sebagai acuan toleransi. Toleransi komunal mengandung konotasi pembatasan toleransi hanya pada wilayah interaksi sosial (*Mu'amalah*), dan tidak mengintervensi wilayah

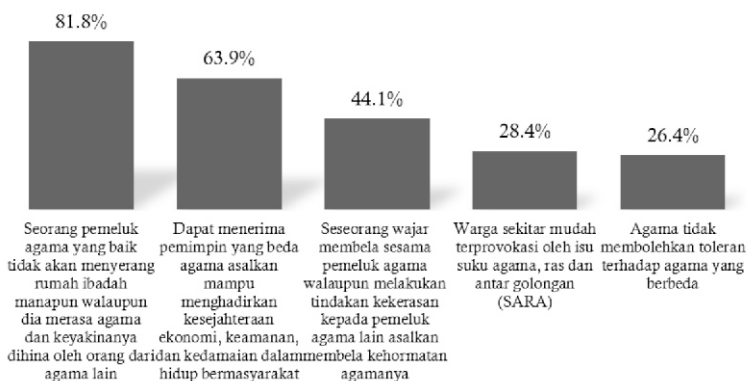
keyakinan. Dalam praktiknya, pembatasan toleransi ini bermakna luas mulai dari aktivitas yang dianggap menistakan agama hingga kegiatan pembangunan rumah ibadah di wilayah mayoritas (Bamualim, Latief, dan Abubakar 2018). Meskipun secara konstitusional kegiatan pendirian rumah ibadah dijamin oleh UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 29), pelaksanaannya tetap mengindahkan persetujuan dari warga setempat. Mengabaikan hal itu akan dinilai mengganggu identitas komunal warga setempat. Toleransi komunal, meskipun diakui khas Indonesia, dalam praktiknya rentan terhadap potensi konflik. Kasus-kasus penolakan pembangunan rumah ibadah yang acap terjadi di sejumlah komunitas muslim, menjelaskan isu toleransi komunal (Panggabean dan Ali-Fauzi, 2015). Komitmen sebagian masyarakat pada identitas komunalnya acap dimanfaatkan oleh aktor-aktor garis keras untuk memprovokasi konflik dengan mengaktivasi prasangka komunal. Masih rentannya warga terhadap provokasi komunal dikonfirmasi oleh hasil riset ini. Grafik 3 menunjukkan tidak sedikit (28,4%) masyarakat yang mengakui bahwa warga di sekitarnya masih mudah terprovokasi oleh isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

Pertalian toleransi dengan loyalitas pada identitas komunal tercermin dari respons masyarakat terhadap isu-isu kekerasan atas nama agama. Meskipun secara umum menunjukkan sikap harmonis dan toleran, mereka cukup banyak yang membenarkan aksi kekerasan dengan dalih membela martabat agama. Grafik 3 menunjukkan 44,1% masyarakat menganggap suatu hal yang wajar melakukan kekerasan kepada pemeluk agama lain demi membela kehormatan agamanya. Namun sebagian lagi menunjukkan sikap ambivalensi, dimana jauh lebih banyak (81,8%) yang menyatakan tidak setuju dengan



penyerangan terhadap rumah ibadah agama lain walaupun atas nama membela kehormatan agama. Ambivalensi tersebut menunjukkan ambiguitas di sebagian masyarakat tentang bagaimana pembelaan tersebut seharusnya dilakukan. Namun, terlepas dari sikap ambivalensi tersebut, ada 26,4% masyarakat yang memang meyakini agamanya tidak mengajarkan toleransi terhadap agama yang berbeda.

**Grafik 3.**  
Potensi Intoleransi

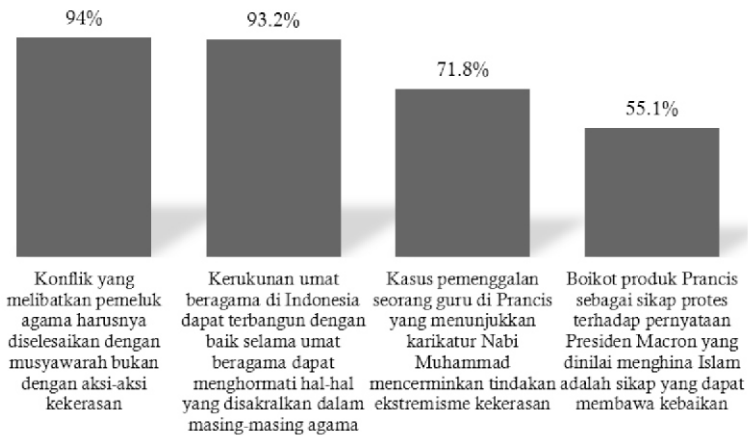


Respons masyarakat terhadap aksi kekerasan atas nama agama menunjukkan dualitas pemaknaan antara pemaknaan normatif dan pemaknaan kontekstual. Secara normatif masyarakat sepakat menunjukkan sikap anti kekerasan, namun secara kontekstual mereka berbeda pendapat. Ketika ditanya bagaimana seharusnya konflik antar umat beragama diselesaikan, 94% menjawab harus diselesaikan dengan musyawarah dan bukan dengan kekerasan. Namun, ketika diminta menyikapi kasus pemeggalan kepala Samuel Paty (47 tahun), seorang guru sejarah di Prancis, oleh Abdoullakh Anzorov (18 tahun), seorang remaja asal Kosovo, mereka berselisih pandang. 71,8% menganggap perbuatan Anzorov

sebagai tindakan ekstremisme kekerasan (*violent extremism*), meskipun dilakukan dengan dalih membela kemuliaan simbol agama. Namun, sisanya (29%) tidak mempersoalkannya sehingga dapat ditafsirkan mereka menilai aksi tersebut sebagai bentuk pembelaan yang sah terhadap agama. Dalam konteks ini, mayoritas memaknai peristiwa kekerasan di atas sejalan dengan pemahaman normatifnya. Sedangkan selebihnya memaknainya sesuai konteks dan melepaskannya dari pemaknaan normatif yang nir-kekerasan.

**Grafik 4.**

**Menyikapi Konflik Bernuansa Keagamaan**



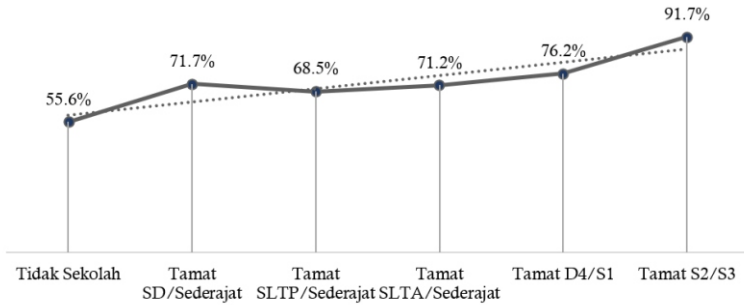
Perbedaan persepsi tentang penggunaan kekerasan atas nama agama erat kaitannya dengan pemahaman masyarakat mengenai konteks konflik dan penyelesaiannya. Bagi sebagian kecil masyarakat situasi konflik tertentu tidak bisa diselesaikan dengan cara-cara damai, tapi harus dijawab dengan kekerasan. Dalam Islam, meskipun tidak mewakili pandangan mayoritas, kelompok garis keras atau kelompok radikal meyakini aksi

kekerasan seperti itu justru harus dilakukan guna merespons perilaku orang yang dianggap menista Nabi Muhammad sebagai simbol kesucian dalam Islam. Dalam keyakinan mereka, membunuh orang yang dinilai menista Nabi Muhammad, seperti yang ditunjukkan oleh Fatwa Mati Imam Khomeini atas Salman Rushdi, adalah bagian dari jihad suci dan bukan kejahatan kemanusiaan. Di mata mereka pendekatan damai, seperti musyawarah, tidak bisa diterapkan dalam kasus di atas karena tindakan menunjukkan gambar Nabi Muhammad bagi mereka merupakan simbolisasi penghinaan dan permusuhan Barat terhadap Islam. Sedangkan bagi mayoritas muslim, seperti yang ditunjukkan oleh sekitar 3/4 responden, membunuh apalagi dengan memenggal kepala orang atas nama membela kesucian agama sekalipun tetaplah sebuah tindakan ekstrim. Tindakan kekerasan seperti itu tidak akan mengubah cara pandang kebanyakan masyarakat Prancis yang dikenal liberal dimana perbuatan Samuel Paty dipandang bagian dari kebebasan berekspresi yang dilindungi negara.

Perbedaan pemahaman tentang konteks konflik dan penggunaan cara-cara kekerasan atas nama agama berhubungan erat dengan tingkat pendidikan responden. Grafik 5 menunjukkan semakin tinggi pendidikan responden, semakin tegas menolak cara-cara kekerasan untuk merespon konflik seperti yang dilakukan oleh Anzorov. Mereka yang tidak berpendidikan paling sedikit menilai kasus pemenggalan sebagai tindakan ekstremisme kekerasan, yaitu 55,6%. Sebaliknya, mereka yang berpendidikan pascasarjana (S2 atau S3) paling banyak menilai tindakan tersebut ekstremisme kekerasan.

### Grafik 5.

Hubungan Level Pendidikan dengan Persepsi Terhadap Kasus Pemenggalan Guru di Prancis Sebagai Tindakan Ekstremisme Kekerasan



Sementara dalam hal menyikapi penggunaan cara-cara kekerasan merespon konflik perbedaan persepsi cukup senjang (71,8% : 29,2%), dalam hal penggunaan cara-cara damai, seperti boikot produk, perbedaannya lebih terpolarisasi. Ketika ditanya apakah boikot produk Prancis cara yang efektif dalam memprotes pernyataan Presiden Macron yang dinilai menghina Islam, 55% menilainya efektif sebagaimana ditunjukkan oleh Grafik 4. Sedangkan selebihnya (45%) menganggapnya kontraproduktif. Pertanyaan tentang boikot produk ini masih dalam rangkaian isu kekerasan yang dibahas di atas. Seperti yang dimuat dalam banyak pemberitaan, Presiden Prancis, Emmanuel Macron, memberikan pernyataan publik menyikapi kasus pemenggalan kepala warganya oleh seorang remaja muslim. Dalam pernyataan tersebut, Macron menyebut aksi kekerasan atas nama agama yang menimpa warganya di Prancis berlangsung dalam sebuah situasi dimana Islam sebagai agama tengah mengalami krisis secara global. Pernyataan Presiden Macron sontak menuai berbagai reaksi dari sejumlah pemimpin

dunia Islam, termasuk Presiden RI. Presiden Jokowi sendiri menyesalkan pernyataan Presiden Macron dan menolak pengaitan aksi terorisme dengan agama manapun, termasuk dengan Islam. Sementara itu, sejumlah tokoh Islam di Indonesia menyerukan boikot produk Prancis di Indonesia sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Presiden Macron tersebut (wartaekonomi.co.id).

#### **D. Saling Memahami, Menerima, dan Bersimpati**

Meskipun menolak aksi kekerasan atas nama agama, masyarakat Indonesia umumnya menilai penunjukan gambar Nabi Muhammad kepada khalayak seperti yang dilakukan oleh Majalah Charlie Hebdo sebelum kasus Samuel Paty di atas sebagai bentuk penghinaan atau setidaknya insensitif terhadap keyakinan umat Islam. Selaras dengan persepsi tersebut, mayoritas responden (93%), sebagaimana ditunjukkan di Grafik 4, meyakini bahwa kerukunan antar umat beragama di Indonesia mensyaratkan saling pengertian, sehingga perbuatan seperti menunjukkan kartun Nabi Muhammad ke khalayak alih-alih dapat mendorong keretakan. Karena itu setiap umat beragama dituntut mengembangkan literasi keagamaan untuk memahami mana yang dinilai sakral oleh umat beragama dan mana yang profan. Pengabaian atau meremehkan hal tersebut bisa berakibat pada tindakan-tindakan yang dinilai melecehkan atau menistakan agama lain.

Dalam sejumlah literatur tentang harmoni antar umat beragama, adanya sikap saling menerima antar warga yang berbeda identitas mengindikasikan berjalannya harmoni keagamaan yang baik (Cheung dan Ma, 2011). Namun, masyarakat yang plural acap menghadapi tantangan politik identitas yang berkontribusi memperlemah harmoni sosial. Dalam politik identitas, warga menentukan pilihan politik

berdasarkan kesamaan identitas agama dan akan cenderung menolak pemimpin yang berbeda agama. Pemerhati politik mengkhawatirkan menguatnya gejala penggunaan politik identitas di sejumlah daerah dapat memperlemah kualitas demokrasi (Ju Lan, 2013). Namun demikian, survei ini menunjukkan dalam skala nasional masih cukup banyak (64%) warga yang dapat menerima pemimpin beda agama, meskipun jumlah yang menolak pun tidak sedikit (36%). Data tersebut mengindikasikan hampir 2/3 warga menunjukkan dukungan terhadap harmoni sosial. Namun lebih dari 1/3 warga berpotensi menimbulkan disharmoni, terutama apabila penolakan terhadap pemimpin beda agama tersebut dinyatakan secara publik. Beberapa studi menunjukkan penolakan terhadap pemimpin beda agama di Indonesia didasarkan pada prasangka bahwa pemimpin tersebut akan bertindak diskriminatif terhadap warga yang beda agama (Bamualim, Latief, dan Abubakar, 2018). Isu penolakan pemimpin beda agama dalam Pilgub DKI selama kampanye tahun 2017 dan penggunaan isu yang sama selama kampanye Pilpres 2019 dinilai telah menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat (Abubakar, 2020).

Selain interseksi agama dan politik, interseksi agama dan budaya menjadi konteks yang menentukan pemahaman masyarakat terhadap kerukunan umat beragama. Sementara bagian terbesar menganggap penting toleransi, tidak sedikit yang menolak mengucapkan selamat hari besar agama lain karena alasan melanggar komitmen agama. Padahal, aktivitas mengucapkan selamat menunjukkan adanya simpati, sebuah elemen kerukunan yang fundamental. Survei ini menunjukkan 69,4% masyarakat menilai mengucapkan selamat hari besar agama lain mencerminkan toleransi yang baik, sedangkan

sisanya (30,6%) menolak pandangan itu (lihat Grafik 2). Jumlah 69,4% mengindikasikan simpati antar umat beragama dalam wilayah kebudayaan masih cukup kuat, meskipun hampir 1/3 menunjukkan tanda-tanda sebaliknya. Sejumlah pengamatan menilai terjadi peningkatan konservatisme agama di kalangan anak muda muslim, salah satunya ditandai oleh keyakinan bahwa mengucapkan selamat Natal adalah pelanggaran akidah. Dalam konteks ini, bagi 30,6% responden di atas, mengucapkan selamat Natal, misalnya, bukan sekadar praktik kebudayaan, melainkan isu agama (Bamualim, Latief, dan Abubakar, 2018). Sementara tidak mudah menarik garis tegas antara agama dan kebudayaan, meningkatnya konservatisme agama di sebagian kalangan telah memperkecil ruang-ruang kewargaan (*civic engagement*) yang netral bagi pembangunan kerukunan umat beragama.

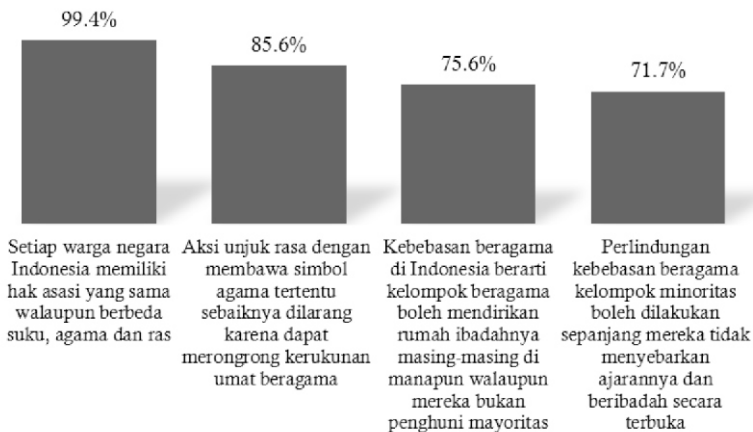
#### **E. Penghargaan terhadap HAM dan Ujaran Kebencian**

Komponen kerukunan yang tidak kalah pentingnya adalah terwujudnya kesetaraan dan keadilan dalam masyarakat. Pada level konstitusi dan hukum, perlindungan dan pemenuhan hak-hak dasar warga tanpa diskriminasi telah dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 (Pasal 28a-28J) dan sejumlah UU dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan. Survei ini menunjukkan pada tataran normatif, publik sepenuhnya (99,4%) setuju bahwa setiap warga negara Indonesia memiliki hak asasi yang sama walaupun berbeda suku, agama, dan ras (lihat Grafik 7). Namun ketika HAM diletakkan dalam konteks perlindungan hak-hak kelompok minoritas, persepsi masyarakat bercabang. 71,7% setuju bahwa kebebasan beragama kelompok minoritas, seperti Syiah dan Ahmadiyah, boleh dilindungi sepanjang mereka tidak menyebarkan

ajarannya dan beribadah secara terbuka. Selebihnya cukup banyak (28,3%) menolak perlindungan hak-hak kedua kelompok tersebut. Sejumlah studi menunjukkan propaganda anti Syiah dan Ahmadiyah selama ini telah mendorong bukan saja penolakan terhadap ajarannya, melainkan juga penyebaran ujaran kebencian dan bahkan persekusi terhadap para pengikutnya (Panggabean dan Ali-Fauzi, 2015; Abubakar dan dkk., 2016). Sementara dalam konteks pembangunan rumah ibadah kelompok minoritas di lokasi mayoritas, 75,6% setuju hal tersebut mencerminkan adanya kebebasan beragama, namun terdapat jumlah yang tidak kecil menolak ide tersebut. Kasus-kasus penolakan dan bahkan perusakan rumah ibadah beberapa tahun terakhir oleh kelompok militan masih cukup sering terjadi dan menunjukkan kebebasan beragama masih bermasalah (Panggabean dan Ali-Fauzi, 2015; Abubakar dan dkk, 2016).

**Grafik 6.**

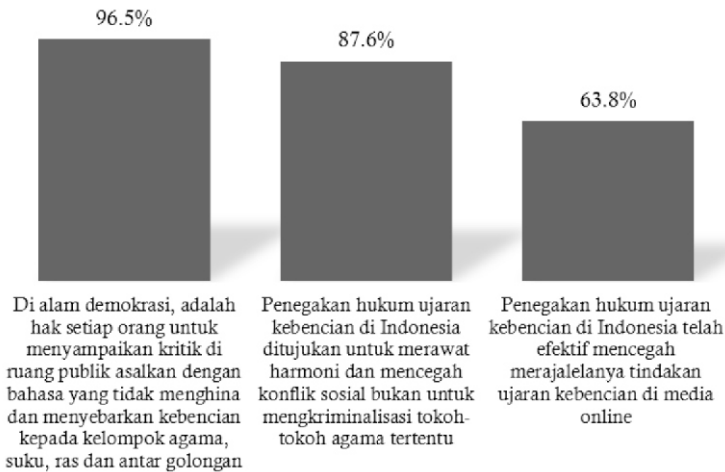
Penghormatan Hak-hak Warga Negara





Sejumlah studi menunjukkan bahwa aksi-aksi penyerangan dan persekusi terhadap pengikut aliran minoritas oleh kelompok garis keras dan massa awam karena mereka terpengaruh oleh provokasi kebencian. Dalam banyak kasus, polisi tidak mengambil tindakan hukum terhadap penyebar ujaran kebencian dan hanya melakukan tindakan kepolisian pada pihak-pihak yang terlibat dalam aksi kekerasan (Panggabean dan Ali-Fauzi, 2015; Abubakar dan dkk., 2016; Abubakar, 2020). Untuk memberikan kepastian hukum kepada polisi, Kapolri mengeluarkan Surat Edaran (SE) No SE-6-X-2015 tentang Penanganan Ujaran Kebencian sebagai panduan internal aparat kepolisian. Setelah keluarnya SE tersebut polisi telah melakukan sejumlah tindakan hukum terhadap para pelaku penyebar ujaran kebencian yang dilaporkan oleh masyarakat. Menyikapi penegakan hukum atas ujaran kebencian, mayoritas publik dalam survei ini (87,6%) mendukung langkah kepolisian tersebut dan menilai penegakan hukum ujaran kebencian di Indonesia ditujukan untuk merawat harmoni dan mencegah konflik sosial. Mereka juga menolak anggapan sebagian pihak bahwa tindakan tersebut untuk mengkriminalisasi tokoh-tokoh agama tertentu. Namun ketika diminta menilai efektivitas penegakan hukum ujaran kebencian di media online, hanya 63,8% responden (lihat Grafik 7) menilai cukup efektif untuk mencegah penyebaran *hate speech* yang masif di media online.

**Grafik 7.**  
Ujaran Kebencian



Pada tataran normatif publik mendambakan harmoni sosial terjadi dalam interaksi dan komunikasi di media sosial. Hal ini ditunjukkan oleh adanya dukungan yang nyaris penuh (96,5%) terhadap hak dan kebebasan warga untuk menyampaikan pendapat dan kritik di muka umum, namun dengan cara yang santun. Seperti ditunjukkan oleh Grafik 7 di atas, mereka juga sepakat menolak penggunaan bahasa yang bernada menghina dan provokatif meskipun atas dalil kebebasan berpendapat. Selain menolak provokasi kebencian, seperti yang ditunjukkan dalam Grafik 6 di atas, masyarakat juga umumnya (85,6%) menghendaki agar simbol-simbol agama tertentu tidak dibawa ke dalam aksi unjuk rasa. Ini menunjukkan publik mulai mengkhawatirkan penggunaan simbol-simbol agama dalam aksi unjuk rasa dapat mengganggu harmoni sosial. Pengamatan menunjukkan aksi-aksi unjuk rasa dengan membawa simbol-simbol agama acap disertai dengan

ujaran yang memprovokasi kebencian kepada kelompok identitas yang berbeda. Sedangkan penggunaan simbol agama itu sendiri dalam aksi unjuk rasa dapat dinilai sebagai unjuk kekuasaan secara simbolik (*symbolic power*). Secara psikologis representasi kuasa simbolik dapat menghadirkan rasa takut dan memunculkan antipati di kelompok lain yang berbeda, dan hal itu beresiko menggerus unsur utama kerukunan umat beragama, yaitu simpati (Bourdieu, 1989).

#### **F. Peran Agama selama Pandemi**

Ada dua pilihan untuk beragama selama pandemi, berdamai dengan situasi yang menuntut untuk berubah atau menentangnya dengan tetap bertahan dengan dogma dan ritual keagamaan yang dianut. Tokoh Islam Indonesia, Nasaruddin Umar, menyebutnya sebagai kelompok berilmu dan satu kelompok lain yang hanya menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan. Orang yang berilmu seperti ulama kelihatan tenang dan tidak terlihat panik sama sekali ketika ada himbauan untuk tidak melaksanakan shalat Jum'at, shalat rawatib, shalat tarawih atau shalat Id secara berjamaah di masjid atau lapangan. Menurutnya, mereka paham fleksibilitas hukum Islam, menyelami sejarah *tasyri'* (legislasi Islam), dan mengkaji penerapan dalil-dalil baik naqli maupun *'aqli* dalam suasana tertentu (Saenong dkk., 2020).

Dari data yang sudah ditampilkan sebelumnya tampak ada kecenderungan mayoritas yang relatif adaptif dan mau berkompromi dengan pandemi yang mendatangkan kebaruan-kebaruan dalam praktik peribadatnya. Namun masih adanya kelompok yang justru menggunakan tameng agama untuk menolak kebijakan pengetatan prokes khususnya dalam hal peribadatan juga memunculkan masalah tersendiri. Semangat beragama ternyata telah menempatkan kesehatan dan

keselamatan manusia yang lebih luas (*maslahat*) bukan di level prioritas. Bahkan di awal Corona merebak perhelatan akbar diadakan oleh sebuah kelompok keagamaan di Gowa, Sulawesi Selatan. Jamaah dikarantina di dalam masjid pun sempat terjadi di bilangan Jakarta Barat. Yang jelas aktivitas-aktivitas yang melibatkan pengerahan massa banyak telah berlawanan dengan semangat prokes yang mengatur pembatasan-pembatasan kegiatan sosial, menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Semua menjadi serba di rumah, dari mulai tinggal di rumah, kerja di rumah, belajar di rumah, sampai dengan ibadah pun di rumah. Pakar Studi Keagamaan, M. Amin Abdullah, menganggap bahwa mereka adalah pengikut ajaran agama yang keras dari semua agama dengan menganggap virus Corona sebagai kutukan Tuhan bagi manusia yang tidak lagi mengenal Tuhan atau tatanan kehidupan yang tidak lagi mengikuti dan mengindahkan ajaran-ajaran agama; Avatar bagi kaum non-vegetarian dalam agama Hindu. Menurut mereka, orang yang beriman pasti imun dari wabah virus Corona karena diselamatkan oleh Allah atau diselamatkan oleh darah Yesus. Tampaknya hubungan antara agama (yang lebih bersifat dogmatik) dan ilmu (prokes yang lebih didasarkan pada hasil pengamatan ilmiah) sampai di tataran ini masih menggunakan paradigma konflik dan independensi dalam kerangka Ian G. Barbour. Agama dianggap kehilangan kontak dan relevansinya dengan kehidupan sekitar (Abdullah, 2020). Dari sini memunculkan tanda tanya apakah agama memiliki peran dalam ikut memitigasi wabah pandemi.

Sejatinya agama dinilai mampu juga beradaptasi dengan kondisi sekitar yang disebut M. Amin Abdullah sebagai corak hubungan yang bersifat dialogis, integratif-interkoneksi. Ilmu keagamaan harus bisa berdialog dengan disiplin ilmu-ilmu

alam, sosial, dan humaniora. Agama tidak hanya berada dalam tempurung yang berkuat dengan kemegahan dirinya dan mengenyampingkan kebenaran-kebenaran lain di luar dirinya. Kehadiran agama justru dalam rangka bersentuhan dengan pengalaman-pengalaman lain yang dialami manusia. Perkembangan dan perubahan sosial kemanusiaan tentunya juga berdampak luar biasa dan mengubah pola berpikir dan pandangan keagamaan (*religious world view*) baik di lingkungan umat Islam maupun umat beragama yang lain. Namun sayangnya era pandemi seperti sekarang ini masih sering dijumpai pemahaman dan keyakinan bahwa (pengetahuan) agama Islam diyakini dan dianggap sebagai absolut, tidak dapat diubah, dan transenden –walaupun tidak begitu banyak– sehingga tidak dapat berubah, rigid, kaku, dan tidak mungkin bisa dikompromikan dengan konteks dan situasi pandemi. Padahal agama tidak mungkin dapat bertahan dan berjalan di tempat dan kaku jika tidak ingin berbenturan atau digilas oleh ilmu pengetahuan modern. Namun nyatanya dalam kacamata Nidhal Guessoum, ilmuwan muslim asal Aljazair, prinsip-prinsip dasar agama semakin hari semakin tampak aneh, tertinggal, dan kadaluwarsa (Abdullah, 2020).

Bisa dikatakan hanya 1/4 masyarakat saja yang memiliki kecenderungan konflikual dan antagonis dalam menyikapi pandemi sebagaimana digambarkan pada Grafik 1. Selebihnya masih menganut paradigma dialogis. Mereka masih percaya dengan aturan pembatasan aktivitas keagamaan yang ditetapkan oleh pemerintah mulai dari 3M (mencuci tangan, menggunakan masker, dan menjaga jarak) sampai dengan 5M (3M ditambah dengan menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas). Dalam agama Islam sendiri, para ulama sudah memberikan pondasi dialogis dan interkoneksi antara

pengetahuan keagamaan dengan persoalan-persoalan keumatan. Dalam posisi ini agama memainkan peran kunci dalam proses edukasi dan memberikan kesadaran kepada masyarakat tentang pentingnya kesehatan dan menyelamatkan umat dari bencana wabah. Dalam proses penentuan sebuah hukum (*istinbath*) para ulama ahli hukum Islam telah meletakkan kaidah-kaidah yang dapat digunakan dalam menghadapi berbagai situasi dan kondisi darurat. Misalnya saja ajaran yang semula wajib atau larangan dapat berubah statusnya menjadi boleh. Kaidah *la dharar wala dhirar* (jangan membahayakan diri sendiri dan orang lain) menjadi salah satu prinsip dialogis yang ditawarkan Islam agar tidak bertentangan dengan kemaslahatan. Bahkan prinsip syariat dalam Islam justru mengedepankan menjaga keselamatan jiwa (*hifzh an-nafs*) dalam *adh-dharuriyat al-khams* (lima pokok substansi ajaran agama).

Pemegang otoritas agama adalah para ulama yang di Indonesia biasa disebut kyai, ustaz, atau dengan panggilan lokal di masing-masing daerah. Mereka harus dipercaya untuk mendapatkan peran kunci dalam memitigasi wabah mengingat adaptasi baru juga menysar prosesi peribadatan masyarakat, misalnya ibadah di rumah saja di saat kasus melonjak atau menjaga jarak di saat shalat bagi umat Islam dan lain sebagainya. Pada konteks ini peran tokoh agama, yang disebut Azyumardi Azra sebagai seseorang yang memiliki keahlian dalam bidang agama (Azra 2002), menjadi penting karena merekalah yang memiliki otoritas untuk menjelaskan kepada umat di tengah-tengah derasnya arus informasi asimetrik dan hoaks di media sosial, seperti masjid steril dari virus karena dijaga Tuhan, shalat berjamaah di masjid harus tetap menjaga dan merapatkan *shaf* (barisan) dan lain sebagainya. Tidak

sampai di situ dorongan untuk vaksinasi juga bisa makin efektif bilamana tokoh agama dilibatkan mengingat kasus vaksin berkali-kali dikaitkan dengan status kehalalannya. Hal ini terjadi juga didorong oleh disinformasi yang banyak diterima masyarakat. Di sinilah tokoh agama menjadi aktor penting dalam penilaian sekaligus meluruskan informasi yang berkembang karena pola hubungan patron klien tokoh agama dengan masyarakat pun sampai sekarang masih eksis dengan dibalut ikatan emosi keagamaan yang kuat. Mereka menjadi sumber penyelesaian masalah masyarakat (Turmudi, 2004). Hal ini juga diperkuat oleh sebuah penelitian yang menemukan bahwa peran tokoh agama dari penduduk mayoritas beragama Islam dan Kristen serta Katolik sangat memengaruhi perilaku dan tatanan pencegahan penularan dan penyebaran Covid-19 di masyarakat (Muchammadun, 2021).

Tokoh agama adalah figur sentral dalam komunitas beragama. Mereka bisa menjadi *role model* yang efektif dalam memberikan edukasi kepada masyarakat dengan memberikan contoh perilaku positif dalam mengantisipasi dan mengatasi penyebaran Covid-19. Apa yang diperlihatkan misalnya oleh Gus Baha (panggilan untuk KH. A. Bahauddin Nursalim) atau Gus Mus (KH. A. Mustofa Bisri) yang ikut program vaksinasi pemerintah memberikan pesan yang dalam bagi masyarakat bahwa tidak ada masalah dengan vaksinasi sehingga masyarakat tak ragu lagi mengikuti figur teladan mereka. Kharisma yang dimiliki tokoh agama memiliki daya tarik kuat bagi masyarakat dimana perilaku, baik tindakan maupun ucapannya, dapat dengan mudah tersebar dan diterima oleh masyarakat. Inilah yang disebut Peter L. Berger bahwa tokoh agama adalah agen sosialisasi yang perilakunya dapat mengubah dinamika sosial keagamaan, politik, dan kultur.

Mereka mampu memahami nilai-nilai keagamaan dan kemudian disosialisasikan kepada masyarakat (Muchammadun, 2021). Pada tahapan ini maka ulama sekaligus telah mengedukasi masyarakat bagaimana seharusnya menghadapi pandemi. Mereka bisa menjadi jangkar antara pemerintah dan masyarakat baik lewat perilaku maupun ucapannya. Posisi mereka sebagai komunikator dapat dilibatkan sebagai agen yang dapat menyosialisasikan program-program pencegahan dan penanggulangan pandemi. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kementerian Agama RI yang menyebut 97% masyarakat meyakini bahwa keyakinan atau keberagamaan dapat membantu dalam menghadapi Covid-19 dan dampaknya.

Dalam kelompok agama selain Islam peran tokoh agama juga menunjukkan signifikansinya di masa pandemi. Muchammadun dkk (2021) dalam penelitiannya menceritakan bagaimana pemberdayaan masyarakat dan tindakan aksi yang dimotori oleh tokoh agama Nasrani di Manado. Peribadatan tidak lagi dilakukan dengan cara biasa dengan pembatasan durasi waktu ibadah. Bahkan usia pun dibatasi untuk masuk gereja maupun pembatasan jumlah jemaat dalam jadwal waktu yang ditentukan. Penyampaian ibadah pun dilakukan secara *live streaming* yang muncul sebagai adaptasi pencegahan pandemi Covid-19. Mekanisme *rapid test* dan swab juga diterapkan hampir di semua tempat ibadah pemeluk agama Kristen dan Katolik. Untuk memperluas jangkauan *rapid test* dan pembekalan pengetahuan mengantisipasi penularan Covid-19 di wilayah masing-masing, para tokoh agama ini langsung turun ke masyarakat. Kegiatan sosialisasi, komunikasi dan edukasi masyarakat yang dilakukan secara langsung ini dampaknya



dirasakan positif dan membuat masyarakat meningkat kesadarannya akan dampak dan bahaya Covid-19. Tak kalah pentingnya, disamping mensyiarkan keagamaan, pengetahuan hidup sehat, para pemimpin dan tokoh agama Kristen dan Katolik yang ada di Kota Manado, juga membantu meringankan beban ekonomi yang dihadapi masyarakat. Kegiatan langsung yang berupa program desa membangun melalui relawan desa tanggap Covid-19 dari program Kemendes dengan slogan “Membangun dari Bawah dan Pinggiran Bersama dengan Tokoh Agama”. Penyaluran bantuan dana Desa juga dilakukan di tempat-tempat ibadah (Muchammadun, 2021).

### ***Peran Institusi Keagamaan dalam Mitigasi Pandemi Covid-19***

Institusi keagamaan yang dianggap paling otoritatif di Indonesia adalah MUI atau Majelis Ulama Indonesia yang didirikan pada 26 Juli 1975. MUI menyatakan dirinya sebagai wadah musyawarah para ulama, zu'ama, dan cendekiawan muslim untuk membimbing, membina, dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia (mui.or.id). Dalam kerangka ini maka MUI adalah tempat berkumpulnya tokoh agama yang telah menempatkan dirinya sebagai organisasi yang otoritatif khususnya dalam mengeluarkan fatwa sehingga di dalamnya ada satu komisi khusus yang membidangi fatwa. MUI dianggap responsif dan cekatan dalam merespon pandemi. Selama pandemi menurut salah satu Ketua MUI, Sudarnoto Abdul Hakim, MUI telah mengeluarkan sebanyak 13 produk fatwa tentang Covid-19 dan penanganannya yang berhubungan dengan hukum Islam, peribadatan, dan kultur Islam. Fatwa-fatwa tersebut misalnya mencakup antara lain tentang hukum melakukan Swab PCR selama berpuasa Ramadhan, hukum mengikuti vaksinasi, hukum beribadah di masjid bagi jamaah

yang berada di zona merah, dan lain sebagainya. Di samping mengeluarkan produk hukum berupa fatwa, MUI juga melakukan sosialisasi fatwa dengan memanfaatkan jalur struktural MUI di tingkat kabupaten agar fatwa sampai kepada masyarakat. Di samping itu sosialisasi juga dilakukan melalui kampanye media dengan menggunakan infografis maupun meme dan kerja sama dengan jaringan MUI di ormas-ormas Islam seperti Muhammadiyah dan NU.

Hal lain yang juga dilakukan oleh MUI adalah melakukan edukasi, himbauan, dan mitigasi ketegangan di masyarakat. Misalnya antara tenaga medis dengan masyarakat yang berbeda pendapat dalam pemulasaran jenazah. Masyarakat menilai penerapan prokes dalam pemulasaran jenazah tidak manusiawi, sedangkan rumah sakit menilainya sebagai salah satu upaya mencegah penyebaran dan penularan virus. MUI berperan menenangkan kedua belah pihak khususnya memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya prokes demi menjaga keselamatan jiwa yang hidup. Contoh lainnya, MUI mencoba menenangkan umat yang gelisah karena kebijakan penutupan masjid oleh pemerintah. Di satu sisi MUI mendukung penerapan prokes yang ketat di masjid sekaligus menghimbau pula agar umat beribadah di rumah, namun MUI juga meminta pemerintah untuk menjadikan masjid sebagai pusat penanggulangan Covid-19 di komunitas (Hakim, 2021). Bahkan MUI memiliki program Gerakan Nasional (Gernas) untuk menanggulangi pandemi dan pemulihan ekonomi yang dimulai pada Mei 2021 (Hakim, 2021) untuk merespons meningkatnya penyebaran Covid-19 pada Gelombang Kedua (*second wave*) dan dampaknya yang sampai pada level sosial dan ekonomi. Lewat Gernas MUI tidak hanya sebatas meningkatkan literasi keagamaan umat namun juga ikut

menggerakkan penanggulangan ekonomi, khususnya krisis pangan akibat pandemi yang melanda masyarakat miskin. Karenanya, MUI menjalin kerja sama dengan ormas Islam dan filantropi Islam, terutama Aksi Cepat Tanggap (ACT) dalam rangka memperkuat sektor UMKM (Hakim, 2021).

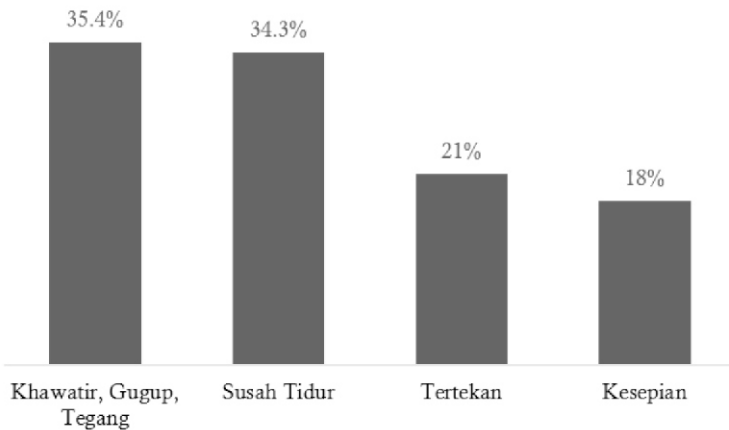
Prinsip “*al-wiqayah khairun minal inayah*” (tindakan preventif lebih utama daripada kuratif) juga dianut oleh MUI dalam gerakan ini dengan berupaya menyeimbangkan aspek fisik dan mental dengan penerapan Prokes dan Promes (Protokol Mental Spiritual). Di sinilah kekhasan yang dimiliki oleh MUI dengan menambahkan Promes dengan menggalakkan ketahanan ruhaniah dengan bersabar dan bertawakkal menyerahkan diri kepada Allah di atas prinsip Allah-lah yang menyembuhkan penyakit. Ketenangan adalah sebagian dari obat dan panik (*wahm*) adalah separuh penyakit. Gernas memberikan layanan “Salam MUI” sebagai layanan informasi terkait Covid-19 sehingga masyarakat dapat memperoleh informasi dari pihak yang otoritatif dalam agama (Cholil Nafis, 2021).

Layanan mental yang diusung oleh MUI sejalan dengan kondisi mental masyarakat selama pandemi baik kognitif, perilaku maupun emosional yang menurut survei ini cukup mengkhawatirkan di samping juga telah meningkatkan keberagaman sampai 81% sesuai hasil survei Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan Kemenag. Bahkan Gugus Tugas Covid-19 di pertengahan tahun 2020 menyampaikan bahwa 80% persoalan Covid-19 adalah persoalan psikologis dan sisanya adalah persoalan kesehatan fisik (Winurini, 2020). Dalam survei ini (Tim Peneliti CSRC UIN Jakarta 2020) ditemukan bahwa dalam seminggu terakhir (di rentang bulan Oktober 2020) sekitar 1/3 masyarakat Indonesia mengalami

gangguan psikologis. Sebagaimana digambarkan oleh Grafik 8 di bawah, 35,4% responden merasakan situasi kecemasan, gugup, dan tegang. Sementara jumlah yang hampir sama (34,3%) mengalami indikasi *stress* berupa susah tidur. Adapun jumlah yang merasa tertekan dan kesepian lebih sedikit, yaitu masing-masing 21% dan 18%.

**Grafik 8.**

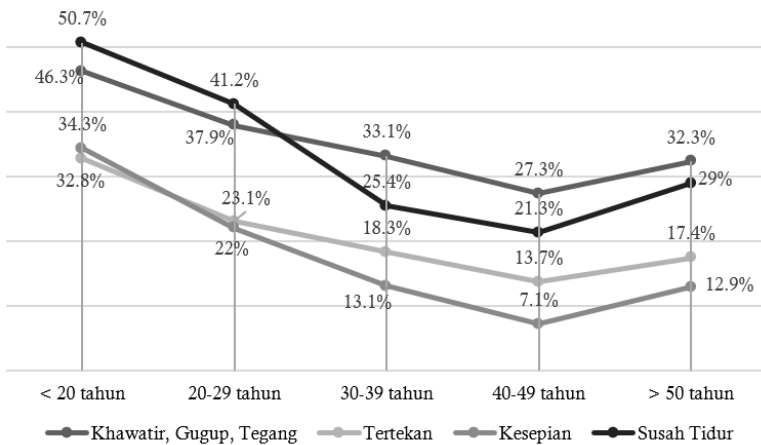
Kondisi Psikologis Masyarakat Indonesia selama Oktober 2020



Kondisi psikologis tersebut ternyata memiliki korelasi dengan wilayah tempat tinggal responden yang meliputi pedesaan dan perkotaan serta usianya berdasarkan hasil uji tabulasi silang. Muncul perbedaan dalam sebagian besar indikator dampak psikologis kecuali dalam hal rasa kesepian. Masyarakat perkotaan lebih banyak yang merasakan kondisi-kondisi psikologis tersebut dibandingkan dengan warga pedesaan. Dengan kata lain, warga perkotaan lebih terdampak secara psikologis daripada warga pedesaan. Dari segi usia, masyarakat yang berusia di bawah 20 tahun paling banyak mengalami kondisi khawatir, gugup, tegang, tertekan, kesepian,

dan susah tidur. Tabel di bawah menunjukkan *trend* makin tua usia responden makin sedikit yang mengalami kondisi psikologis ini, meskipun jumlah penderita gangguan psikologis kembali meningkat di responden usia 50 tahun. Temuan ini selaras dengan laporan PDSKJI (Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia) yang juga menyebutkan masalah psikologis terbanyak justru ditemukan pada kelompok usia 17-29 tahun dan kembali ditemukan tinggi pada kelompok usia di atas 60 tahun.

**Grafik 9.**  
Hubungan Usia dengan Kondisi Psikologis



Tak ketinggalan organisasi masyarakat (ormas) berbasis keagamaan pun turut juga merespon Pandemi Covid-19. Dua ormas Islam terbesar di Indonesia pun turut dalam upaya-upaya mitigasi wabah Covid-19. Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah sama-sama mendukung upaya pemerintah walaupun tidak seluruhnya tertuang dalam fatwa, masing-masing pimpinan dan tokoh agama telah menunjukkan sikap

organisasinya kepada masyarakat (Aula, 2020). Menurut Sudarnoto, Muhammadiyah sendiri banyak berperan dalam membantu penanganan Covid-19 melalui rumah sakit Muhammadiyah dan juga kampus-kampus Muhammadiyah yang untuk sementara waktu diubah fungsinya sebagai tempat isolasi (isolasi mandiri) masyarakat miskin. Upaya ini dinilai dapat menekan kasus penyebaran virus di kelompok masyarakat miskin. Muhammadiyah juga dapat dikatakan sebagai ormas Islam yang sangat responsif terhadap isu-isu sosial kemanusiaan, termasuk penyebaran Covid-19. Ini dibuktikan pada Maret 2020 manakala Covid-19 diyakini menyebar di Indonesia, Muhammadiyah melalui Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah telah mengeluarkan Surat Edaran (SE) tertanggal 24 Maret 2020 tentang Tuntunan Ibadah dalam Kondisi Covid-19 yang berisikan tuntunan ibadah di tengah wabah Covid-19 berdasarkan keputusan dari Fatwa Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Aksi ini dilanjutkan Muhammadiyah dengan membentuk Muhammadiyah Covid Command Center (MCCC) dua divisi di bawahnya, yaitu Muhammadiyah Disaster Management Center (MDMC) dan Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) yang membawahi rumah sakit dan klinik. Pada fase ini Muhammadiyah menyikapi Covid-19 sebagai bencana alam biasa dan belum memosisikannya sebagai bencana kemanusiaan. Namun setelah dampak kemanusiaan pandemi kian meningkat, barulah Muhammadiyah menilai pandemi sebagai bencana kemanusiaan. Sikap ini ditandai dengan dikeluarkannya SK (Surat Keputusan) baru dengan memasukkan 2 divisi baru pada Agustus 2020, yaitu Majelis Pemberdayaan Masyarakat (MPM) dan LAZISMU sebagai mesin penggalangan dana sekaligus penyalurannya. Bahkan Mukhtamar Muhammadiyah yang awalnya diagendakan pada

Agustus 2020 pun diundur hingga Tahun 2022 sebagai salah satu kontribusi dalam menekan laju penyebaran virus. MCCC memiliki peran yang vital di tubuh Muhammadiyah dalam mengkoordinir semua program penanggulangan Covid-19 yang mencakup pencegahan, pengobatan dan penanggulangan dampak pandemi. Pada aspek pencegahan dan penyadaran, MCCC mengkoordinir sosialisasi Fatwa Tarjih Muhammadiyah kepada jaringan di berbagai kabupaten tentang Covid-19. Selain itu, MCCC juga menyediakan panduan-panduan dan SOP dalam pengelolaan pendidikan selama pandemi. SOP ini menjadi standar pegangan sekolah dan pesantren Muhammadiyah di Indonesia selama pandemi (Latif, 2021).

Bantuan karitatif Muhammadiyah dipercayakan ke LAZISMU yang telah menyalurkan ratusan ribu paket kebutuhan pokok selama PSBB berlangsung. Bantuan ini diberikan kepada para guru honorer di 5.000 sekolah binaan Muhammadiyah yang dinilai rentan terkena imbas ekonomi dari pandemi. Selain itu LAZISMU juga memberikan bantuan APD (alat pelindung diri) dan ventilator kepada sejumlah rumah sakit dan klinik kecil. Bantuan pendidikan juga diberikan kepada pesantren dan sekolah-sekolah jaringan Muhammadiyah sekaligus beasiswa untuk pelajar dan mahasiswa tidak mampu berupa Beasiswa Mentari untuk pelajar dan Sang Surya untuk mahasiswa. Untuk memberikan jaring pengaman ekonomi, LAZISMU menjalankan konsep *solidarity buying* (sebagai antitesis dari *panic buying*) dimana mereka membeli 2.400 ekor ayam para peternak binaan yang selanjutnya dimasukkan dalam paket bantuan makanan. Terhitung selama tahun 2020-2021 LAZISMU telah menyalurkan 200 Milyar untuk bantuan sosialnya.

Apa yang sudah dilakukan LAZISMU sudah lebih dari sekedar karitatif, tapi menjadi semacam *mutual aid* (gotong royong) yang berbasis kelembagaan. *Mutual Aid* tidak saja berfungsi mengatasi kebutuhan kaum miskin tapi juga berfungsi memperkuat resiliensi komunitas yang terkena dampak tanpa mereka kehilangan kemampuan untuk membantu dirinya sendiri. Di tengah pandemi Covid-19 LAZISMU berhasil mengerahkan kekuatan kolektif dan kebersamaan informal yang akrab dan ramah untuk saling membantu satu sama lain di tengah kesulitan. Di banyak negara, *mutual aid* kini dianggap sebagai *new source of civic energy* (sumber daya energi baru masyarakat madani) yang harus didukung agar bisa menjadi upaya alternatif bagi pemulihan pasca Covid-19. Sebagian ahli menyebut gerakan *mutual aid* semacam ini sebagai bagian dari filantropi atau kegiatan amal atau *charity*. Namun ada pula yang membedakannya dimana *charity* diartikan sebagai gagasan sekelompok orang yang memiliki aset atau kekayaan dan menggunakan aset tersebut untuk membantu orang atau kelompok lain yang membutuhkan bantuan. Sementara *mutual aid* adalah menciptakan struktur-struktur di dalam masyarakat dimana orang-orang di dalamnya saling membantu satu sama lain. Dengan kata lain, orang-orang di dalam kelompok itu berperan sebagai pemberi bantuan sekaligus penerima bantuan. Fenomena *mutual aid* di masa Pandemi Covid-19 ini disebut Rhodri Davies sebagai demonstrasi “kekuatan komunitas” (Davies, 2020).

Tak terlalu jauh berbeda dengan Muhammadiyah, NU juga membentuk Satgas Covid-19 dari tingkat daerah hingga nasional. Peran dari Lembaga Amil Zakat dan Shodaqoh NU (LAZISNU) dimaksimalkan dalam proses pengumpulan dan penyaluran bantuan kepada masyarakat yang terdampak.



Menjelang Idul Fitri Ketua Umum PBNU juga menyerukan kepada masyarakat untuk menyegerakan dalam membayarkan Zakat –baik zakat fitrah maupun zakat mal– di awal Ramadhan, hal tersebut karena jumlah masyarakat yang terdampak pandemi Covid-19 meningkat dan membutuhkan bantuan logistik secepatnya. PBNU juga ikut menyalurkan bantuan dalam bentuk sembako kepada masyarakat yang diperuntukkan bagi masyarakat yang terkena dampak sosial-ekonomi Covid-19 di DKI Jakarta, Cirebon, Kuningan, Majalengka, dan luar Jawa. Pendistribusian yang dilakukan pada 14 Mei 2020 ini difokuskan pada fakir miskin, lansia, difabel, guru mengaji, marbot masjid dan kelompok lain yang terdampak Covid-19. Dalam hal ini PBNU mendapatkan mandat dari Kompas TV yang mendonasikan dana 2 Miliar Rupiah hasil Konser Amal dari Rumah Didi Kempot. Kegiatan penyaluran bantuan pada tingkat daerah diklaim jauh lebih masif dan sporadis, mengingat NU sangat kuat di masyarakat akar rumput (Aula 2020). Dari segi pendidikan pun NU yang terkenal dengan pola pendidikan pesantrennya turut mengadvokasi pengaturan ulang kegiatan pendidikan di pesantren-pesantren yang tetap mengadakan kegiatan pengajaran. Pembelajaran di asrama pun disesuaikan dengan prokes termasuk misalnya jumlah santri dalam satu kamar dikurangi (Hakim, 2021). Dalam hal peribadatan, Lembaga Takmir Masjid (LTM) PBNU juga ikut mengeluarkan panduan terkait Protokol Panduan Salat Berjamaah dan Salat Jum'at di masjid dan mushalla. Panduan tersebut berisi tiga bagian utama, meliputi: persiapan jamaah dari rumah, saat jamaah tiba di masjid atau mushalla, dan upaya takmir masjid dan mushalla. Di dalam panduan dijelaskan terkait protokol kesehatan yang harus dipatuhi oleh jamaah dan takmir, sebagai bagian dari mencegah penyebaran Covid-19 di lingkungan tempat ibadah (Aula, 2020).

Tidak hanya organisasi yang berbasis satu agama tertentu saja yang memiliki kepedulian dan perhatian dengan merebaknya kasus paparan Covid-19. Antar agama juga saling berkolaborasi bahu-membahu memberikan bantuan dalam penanganan pandemi walaupun masih terbilang minor. Jaringan Lintas Iman Tanggap Covid-19 (JIC) menjadi salah satu contoh bagaimana Covid-19 tidak hanya melahirkan kepedulian dan solidaritas namun juga ikut menumbuhkan harmoni di masyarakat. JIC telah menyalurkan bantuan senilai lebih dari Rp 1,5 miliar di 53 titik di 14 kabupaten/kota di DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sepanjang April-Mei 2020 kepada 5.587 warga yang membutuhkan sekaligus merangkul berbagai kelompok agama dan menyuarakan persatuan di tengah wabah. Jaringan ini terdiri atas 20 organisasi Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, Konghucu, Baha'i, dan sejumlah komunitas pemuda, yang telah lama bekerja dalam isu toleransi dan perdamaian. Mereka adalah Indonesian Conference on Religion and Peace (ICRP), Pemuda Muhammadiyah, Muhammadiyah Covid-19 Command Center, NU Peduli, GP Ansor, PGI, GEMABUDHI, PERMABUDHI, MBI-KBI, serta Komisi HAK KWI, Majelis Luhur Kepercayaan terhadap Tuhan YME Indonesia (MLKI), JKMC, BAKKAT, PHDI, Puskor Hindunesia, MATAKIN, Majelis Rohani Nasional Bahai Indonesia, Yayasan Sosial Guru Nanak, Temu Kebangsaan Orang Muda, Jaringan Gusdurian, dan Kafkaf Foundation ([voaindonesia.com](http://voaindonesia.com)).

## **E. Penutup**

Selama pandemi, agama dihadapkan pada kenyataan yang menuntutnya mampu beradaptasi dengan kebijakan dan peraturan yang membatasi mobilitas dan berkerumunnya manusia. Mayoritas masyarakat beragama menunjukkan

kesanggupan beradaptasi dengan situasi pandemi dan kebijakan pembatasan sebagai konsekuensinya. Cara pandang seperti ini ditunjukkan oleh otoritas agama baik individu maupun institusi di Indonesia mulai dari MUI sampai dengan ormas-ormas keagamaan. Para tokoh agama pun telah berusaha mengajak pengikutnya untuk bisa adaptif dengan realitas pandemi, meskipun masih ada sedikit kelompok yang terus mempertahankan dan menjaga independensi pandangan keagamaannya. Mayoritas masyarakat yang taat beragama menunjukkan kepatuhan menjalankan prokes, mulai dari memakai masker, mencuci tangan, hingga menghindari kerumunan. Termasuk menerapkan aturan menjaga jarak dalam menjalankan praktik peribadatan berjamaah.

Fakta lain yang ditemukan adalah pada umumnya publik masih menilai positif relasi antar agama di tengah pandemi. Mereka memandang bahwa masyarakat di sekitarnya tetap hidup rukun, menerima perbedaan agama, dan terus berusaha toleran terhadap perbedaan tersebut. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan namun justru menjadi warna dan kekuatan bersama dalam menghadapi pandemi. Mereka sepakat pentingnya mengatasi konflik secara damai, menghormati HAM, dan keyakinan agama lain, serta mendukung penanganan ujaran kebencian. Hanya sebagian kecil saja yang gamang saat norma-norma ini diletakkan dalam konteks interseksi politik, agama dan budaya. Misalnya, masih ada sebagian kecil yang menerima penggunaan kekerasan untuk membela kesucian agama, di saat sebagian besar yang lain tegas menolak penggunaan kekerasan apapun dalihnya. Harus diakui pluralitas masyarakat dihadapkan pada tantangan politik identitas yang berkontribusi pada melemahnya harmoni sosial khususnya antar umat beragama. Sikap saling menerima

perbedaan identitas dapat menjadi indikasi baiknya jalinan harmoni keagamaan. Maka agama harus dikembalikan kepada fithrah kehadirannya untuk menyelesaikan masalah-masalah kemanusiaan dan bukan justru memperkeruhnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin. 2020. “*Mendialogkan Nalar Agama dan Sains Modern di Tengah Pandemi Covid-19.*” *Maarif*. Vol. 15, No. 1.
- Abubakar, Irfan. 2020. “*Penanganan Ujaran kebencian di Indonesia dan Tantangan Sosial Politik.*” dalam Alamsyah M.Djafar *Meredam Kebencian: Satu Dekade Pemantauan Siar Kebencian Keagamaan di Indonesia*. Jakarta: Wahid Foundation.
- Abubakar, Irfan, dkk. 2016. *Laporan Penelitian Ujaran Kebencian (Hate Speech) dan Penanganannya Oleh Polri dan Pemerintah Daerah (Pemda) di Indonesia*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta dan The Asia Foundation.
- Aula, Siti Khadijah Nurul. 2020. “*Peran Tokoh Agama dalam Memutus Rantai Pandemi Covid-19 di Media Online Indonesia*”. *Living Islam: Journal of Islamic Discourses*. Vol. 3. No. 1. 2020.
- Bamualim, Chaider S., Hilman Latief, dan Irfan Abubakar. 2018. *Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*. Jakarta: CSRC UIN Jakarta.
- Bourdieu, Pierre. 1989. “*Social Space and Symbolic Power.*” *Sociological Theory* 7 (1): 14. <https://doi.org/10.2307/202060>.
- Buana, Dana Riksa. 2020. “*Analisis Perilaku Masyarakat Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Virus Corona (Covid-19) dan Kiat Menjaga Kesejahteraan Jiwa*”. *Salam: Jurnal Sosial & Budaya Syar-i*. Vol. 7. No. 3.
- Cheung, Chau-kiu, dan Stephen Kan Ma. 2011. “*Coupling Social Solidarity and Social Harmony in Hong Kong.*” *Social Indicators*

Research 103 (1): 145–67. <https://doi.org/10.1007/s11205-010-9702-8>.

Davies, Rhodri. “*Mutual Admiration: Charity, Philanthropy & Mutual Aid Post-COVID*”. <https://www.cafonline.org/about-us/blog-home/giving-thought/the-role-of-giving/charity-philanthropy-and-mutual-aid-post-covid>. Diakses pada 24 September 2021.

<https://mui.or.id/>, diakses pada 24 September 2021.

<https://republika.co.id/berita/qzif8o459/ribuan-pekerja-as-tolak-vaksin-covid-19-atas-alasan-agama>, diakses pada 24 September 2021.

<https://grafis.tempo.co/read/2747/gonta-ganti-istilah-kebijakan-pemerintah-atasi-covid-19-dari-psbb-sampai-ppkm>, diakses pada 24 September 2021.

<https://www.voaindonesia.com/a/organisasi-lintas-agama-salurkan-bantuan-covid-1-5-miliar-lebih/5437459.html>. Diakses pada 24 September 2021.

Ju Lan, Thung. 2013. “*Heterogeneity, Politics of Ethnicity, and Multiculturalism: What Is a Viable Framework for Indonesia?*” *Wacana: Journal of the Humanities of Indonesia* 13 (2). <http://journal.ui.ac.id/index.php/wacana/article/view/2552>

Menchik, Jeremy M. 2015. “*Tolerance without Liberalism: Islamic Institutions and Political Violence in Twentieth Century Indonesia*.” Cambridge University Press.

Muchammadun dkk. 2021. “*Peran Tokoh Agama dalam Menangani Penyebaran Covid-19*”. *Religious: Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*. Vol. 5. No. 1.

Nashrullah, Nashih. 2021. “*Penutupan Masjid Masa PPKM Darurat dan Diksi Zalmi Umat*”. <https://www.republika.co.id/berita/qvrq98318/penutupan->

- masjid-masa-ppkm-darurat-dan-diksi-zalimi-umat. Diakses pada 24 September 2021.
- Panggabean, Rizal, dan Ihsan Ali-Fauzi. 2015. *Policing Religious Conflicts in Indonesia*. Jakarta: Center for the Study of Religion and Democracy Paramadina Foundation.
- Saenong, Faried F., dkk. 2020. *Fikih Pandemi: Ibadah di Masa Wabah*. Jakarta NUO Publishing.
- Turmudi, Endang. 2004. *Perselingkuhan Kiai dan Kekuasaan*. Yogyakarta: LKiS.
- Wawancara dengan Prof. Hilman Latief, MA., Ph.D. pada 2 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Dr. Sudarnoto Abdul Hakim, MA. pada 28 Juli 2021.
- Nafis, Cholil. 2021. *Webinar Sosialisasi Gerakan Nasional MUI Penanggulangan Covid 19 dan Pemulihan Ekonomi*". [https://www.youtube.com/watch?v=yobI4q\\_0tWQ](https://www.youtube.com/watch?v=yobI4q_0tWQ). Diakses pada 30 Juli 2021.





*Bab 4*

**DISINFORMASI PANDEMI DI MEDIA SOSIAL  
DAN PENANGANANNYA**

*Oleh: Rita Pranawati*

Pandemi Covid-19 mengubah seluruh pola kehidupan manusia di seluruh dunia. Mobilitas manusia terbatas selama pandemi karena menjaga protokol kesehatan. Fokus aktivitas kehidupan manusia yang dulu tersebar di berbagai tempat yaitu kantor, sekolah bagi anak, keluarga, rumah ibadah, ruang sosial, dan perbelanjaan, pada masa pandemi menyempit. Rumah menjadi pusat segala aktivitas, baik untuk bekerja, belajar, beribadah, hingga bersosialisasi. Menyempitnya ruang gerak mengubah medium komunikasi manusia.

Media sosial (medsos) menjadi alternatif media komunikasi yang dianggap paling relevan pada masa pandemi. Sebelum pandemi, istilah era digital, era 4.0, seolah menyatu dalam perkembangan teknologi. Manusia yang sejatinya makhluk sosial berubah total menjadi “makhluk sosial yang berjarak” secara ruang, namun hakikatnya dekat dan dapat memiliki kedekatan secara psikologis karena adanya berbagai media baru. Media sosial bukan saja media komunikasi, melainkan jembatan membangun kedekatan dalam format baru.

Di masa pandemi ini, budaya komunikasi berubah secara drastis dari komunikasi tatap muka (*face to face communication*) ke

komunikasi digital atau komunikasi melalui komputer (*computer mediated communication* (CMC)). Sebelum adanya platform media sosial, untuk mengadakan rapat atau seminar orang harus bertemu secara fisik dan persiapannya pun memakan waktu. Hari ini, sebagai alternatif, teknologi komunikasi digital, seperti Webex, Zoom, Gmeet, telah mempertemukan peserta pertemuan secara daring, mereka dapat berkomunikasi sembari melihat wajah masing-masing. Dahulu peserta konferensi internasional harus menempuh perjalanan lebih dari 24 jam untuk menghadiri konferensi di Amerika Serikat. Namun kini cukup duduk di depan komputer di rumah masing-masing, mereka sudah dapat mengikuti konferensi. Pola interaksi dan komunikasi virtual semakin menjadi fenomena umum di berbagai sektor kehidupan; mulai dari berdagang *online*, belanja *online*, bekerja *online*, hingga tamasya virtual.

Media sosial memiliki dampak yang berbeda dengan komunikasi yang dilakukan secara *face to face*. Media sosial merupakan perangkat lunak yang memiliki kemampuan berlipat untuk berbagi pesan (Shirky, 2008), memungkinkan sekelompok individu atau komunitas berkumpul, berkomunikasi, dan berbagi pesan, di mana kontennya ditentukan oleh pengguna bukan oleh editor (Boyd dalam Nasrullah, 2020). Media sosial juga dapat memfasilitasi terbangunnya ikatan sosial dan kerjasama (Van Dijk, 2013). Dari definisi tersebut dapat dilihat bahwa komunikasi melalui media sosial sangat berbeda dengan komunikasi umumnya karena yang pertama dapat berdampak masif, diterima oleh jumlah orang yang lebih banyak, disamping yang memfilter informasi adalah pengguna media sosial itu sendiri.

Respons terhadap pandemi Covid-19 sejak kemunculan hingga sekarang terus menerus tidak ajeg, tetapi dinamis. Berbagai perubahan terus terjadi baik dalam aspek pencegahan, penanganan kasus, maupun penanganan dampak. Berbagai kebijakan

penanganan berikut istilah-istilah yang digunakan untuk penyebutannya juga menyesuaikan dengan tingkat penyebaran virus dan perkembangan virus yang terus bermutasi. Tingkat kesembuhan dan mortalitas pasien Covid-19 juga terus berproses sesuai dengan meningkatnya keilmuan dalam pengobatan dan vaksinasi, *trend* global, dan praktik berdasarkan pengalaman.

Dalam menjalankan kebijakan penanganan Covid-19, pemerintah beradaptasi dengan kebijakan WHO, penemuan teknologi, situasi perkembangan Covid di Indonesia, kebutuhan masyarakat dalam konteks ekonomi, kebutuhan anak sekolah, dan berbagai situasi sosial lainnya. Ketika terjadi perubahan dalam penanganan hal itu bagian dari proses adaptasi terhadap situasi ketidakpastian pandemi. Adaptasi tersebut ada yang membuahkan hasil tetapi ada juga yang menimbulkan situasi krisis dimana gelombang penyebaran virus bergerak naik sebagaimana dialami oleh India (Aditya, 2021), Italia, dan negara-negara lainnya. Indonesia juga mengalami hal yang sama awal tahun 2021 (Anadolu Agency, 2021) ditandai dengan menyebarnya Varian Delta yang dikenal lebih ganas dari varian lainnya (Rahajeng & Yudha, 2021). Sementara situasi polarisasi masyarakat pada berbagai peristiwa politik khususnya dua pemilu terakhir juga dapat berpengaruh terhadap penerimaan terhadap kebijakan pemerintah.

Perubahan yang terjadi selama pandemi adalah hal yang pasti, namun penerimaan terhadap informasi perubahan tersebut seringkali menjadi sumber ketidakpastian. Pemerintah sebagai eksekutif terus memperbaharui kebijakan sebagai upaya penanganan yang optimal. Masyarakat yang menerima informasi perubahan tidak semuanya menanggapi secara positif. Ada sejumlah faktor yang ikut memengaruhi respons negatif tersebut. Antara lain beredarnya informasi palsu (*fake news*) yang sengaja disebarluaskan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab untuk mengambil

keuntungan dari situasi yang tidak pasti. Akibatnya, efektivitas penanganan pandemi mengalami hambatan baik pada tingkat individu, komunitas, maupun nasional.

Bagaimanapun faktor disinformasi ini memengaruhi literasi warga tentang Covid-19 dan penanganannya. Ia juga memengaruhi ketaatan warga menjalankan protokol kesehatan serta kesediaannya berpartisipasi dalam mencegah penyebaran virus. Tulisan ini akan membahas bagaimana disinformasi pandemi di media sosial. Lebih lanjut tulisan ini akan mengulas bagaimana perilaku pengguna media sosial sebagai sumber informasi pandemi, disinformasi apa yang berkembang selama pandemi, dan faktor apa saja yang berpengaruh, dan bagaimana penanganannya.

#### **A. Covid dan Perubahan**

Semua negara berjuang untuk mengatasi Covid-19 dengan segala kondisi sosial-budaya dan demografis di negaranya. Kekhasan kondisi negara juga akan berdampak pada proses penanganan di masing-masing negara. Indonesia dengan keragaman penduduk, budaya, agama, wilayah, kondisi ekonomi menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan. Tidak mudah bagi pemerintah untuk mengambil kebijakan dengan mempertimbangkan berbagai kondisi tersebut.

Hadirnya berbagai istilah seputar Covid-19 merupakan bentuk adaptasi dari situasi pandemi. Istilah tersebut antara lain *droplet*, *suspect*, *lock down*, *social distancing*, *physical local transmission*, *online*, *offline*, *swab test*, *rapid test*, *hand sanitizer*, *thermo gun*, *herd immunity*, *sector essential*, *working from home* (WFH) dan *working from office* (WFO) (Rahman, 2020). Selain itu juga ada istilah baru, yaitu webinar yang merupakan akronim dari web seminar dan beberapa singkatan dalam

bahasa Indonesia, misalnya Orang Dalam Pantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP), Orang Dalam Risiko (ODR), Orang Tanpa Gejala (OTG), hingga APD (Alat Pelindung Diri). Istilah tersebut hadir menjadi bagian dari adaptasi perubahan-perubahan dari penanganan pandemi. Istilah-istilah tersebut masih banyak yang berbahasa Inggris, dan sebagian telah dipadankan dan diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia. Istilah-istilah tersebut tidak semuanya dipahami dengan mudah oleh masyarakat Indonesia (Rahman, 2020). Adaptasi Covid-19 pun tercermin pada lahirnya kosa kata, penerjemahan, hingga penggunaan istilah dan perubahan kosa kata bahasa sebagaimana disebut diatas.

Kebijakan negara juga terlihat sangat beradaptasi pada situasi kondisi. Perimbangan analisa antara kebutuhan kesehatan dan kondisi ekonomi masyarakat menjadi hal yang tidak mudah bagi pemerintah. Faktanya, Covid-19 memberikan dampak sosial ekonomi yang sangat luar biasa, tidak hanya bagi Indonesia, tetapi juga seluruh dunia (Masudi & Winanti, 2020). Awal pandemi yaitu April 2020, dikenal istilah PSBB atau Pembatasan Sosial Berskala Besar dimana masyarakat tidak dapat bepergian di luar rumah untuk ibadah, sekolah, berkantor, kecuali mereka yang bekerja di sektor esensial dan kritikal. Selanjutnya kita juga mengenal istilah PSBB Total, New Normal pada bulan Mei 2020 (Ahmad Zuhad, 2021), PSBB transisi (Juni 2020), PPKM (Januari 2021), PPKM Mikro (Februari 2021), Penebalan PPKM Mikro (22 Juni-5 Juli 2021), PPKM Darurat (Juli 2021), PPKM Level 1-4 (Juli akhir 2021). Begitu pula dulu kita mengenal zona-zona merah, kuning, oranye dan hijau, kini diganti dengan PPKM level. Perubahan kebijakan tersebut juga memberikan gambaran bahwasannya *trial and error* dalam penetapan kebijakan terus dilakukan.

Kondisi psikologis masyarakat juga turun naik dalam menyikapi pandemi. Ketakutan, kekhawatiran, kecemasan terpapar Covid-19 dan dampaknya berhadapan dengan kebutuhan hidup dan kebutuhan bersosialisasi. Situasi pemutusan hubungan kerja dan berkurangnya pendapatan menambah kompleksitas naik turunnya psikologis masyarakat. Keterpaparan Covid-19, kehilangan kerabat, kolega, dan keluarga juga menyebabkan kondisi psikologis yang berdampak. Selain itu, keterbatasan masyarakat menjalankan ibadah di rumah ibadah juga memberikan dampak psikologis yang berbeda.

Sikap, perilaku, dan respons masyarakat pada situasi pandemi Covid-19 itu sendiri sangat dipengaruhi oleh berbagai hal. Selain karena kondisi psikologis masyarakat, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga akan berdampak pada pemahaman dan perilaku masyarakat. Perencanaan penanganan dan koordinasi negara akan menentukan kesiapan respon pada situasi darurat (Winanti & Putri, 2020). Perubahan berbagai kebijakan terkait penanganan pandemi menghasilkan 9 produk hukum berupa 4 Keputusan Presiden, 2 Peraturan Presiden, 1 Instruksi Presiden, dan 1 Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Perubahan tersebut menunjukkan proses yang terus terjadi akibat situasi pandemi (Widaningrung & Masudi, 2020). Polarisasi yang terjadi selama proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah juga berdampak pada pengetahuan, sikap, dan merespon pandemi Covid-19. Selain itu, sumber informasi menjadi kunci bagaimana masyarakat berpengaruh.

## **B. Media Sosial di Masa Pandemi**

Media sosial telah menjadi sumber informasi yang sangat penting pada masa pandemi. Sebelum pandemi media sosial

telah menjadi bagian penting bagi kehidupan manusia dan semakin menguat karena terbatasnya mobilitas sosial. Keterhubungan yang nyata di dunia maya menjadikan masyarakat sangat lekat dengan media sosial. Bahkan media sosial sudah menjadi semacam media yang wajib ada karena kebutuhan komunikasi untuk belajar dari rumah, bekerja, mendapatkan kebutuhan pokok, belanja, dan mendapatkan informasi.

Media sosial juga menjadi sumber informasi yang berlipat perannya selama pandemi. Menurut McLuhan, media sosial yang merupakan produk dari teknologi akan sangat memengaruhi budaya dan struktur sosial (dalam Junaedi & Sukmono, 2020; Nureni et al., 2013). Perubahan perilaku sosial dan masyarakat karena pengaruh media sosial juga dapat ikut menentukan perubahan perilaku dalam menyikapi pandemi ini.

Media sosial memiliki kekhasan yang berbeda dengan yang lainnya. Media sosial ada yang respons tidak langsung misalnya pada Youtube, namun ada pula yang komunikasi dua arah. Sedangkan dalam konteks tipe komunikasi, media sosial juga merupakan praktek bentuk komunikasi antara dua orang, komunikasi kelompok, misalnya dalam sebuah grup *whatsapp*, dan komunikasi nonverbal misalnya melalui *emoticon* (Mulyana, 2019). Selain itu, sebagai media kedua, media sosial memiliki kekhasan: tersebar dari banyak sumber ke banyak khalayak, menutup adanya monopoli terhadap media, sumber informasi tidak terkontrol, dapat memfasilitas khalayak luas, serta memberikan pengalaman pengguna baik secara ruang dan waktu (Nasrullah, 2014). Sebelumnya, media fokus dari satu sumber, terbuka untuk dimonopoli, ada potensi fragmentasi khalayak sebagai massa, dan dianggap hadir untuk memengaruhi kesadaran publik.

Pada satu aspek, media sosial memberikan informasi positif dan menjadi wahana edukasi di era pandemi. Berbagai *flyer*, poster, dan meme informasi tentang pandemi dibuat agar mudah dipahami. Hal ini juga merupakan upaya memberikan pemahaman kepada masyarakat agar terus memiliki kesadaran taat pada protokol kesehatan. Selain itu testimoni pasien yang sembuh juga menjadi penyemangat bagi kesembuhan yang lain (Sampurno et al., 2020). Selain itu, di kalangan mahasiswa yang terliterasi dengan baik dalam menggunakan media sosial, mereka memanfaatkan media sosial untuk mencari informasi tentang Covid-19 (Junaedi & Sukmono, 2020). Di luar untuk edukasi, berbagai manfaat media sosial juga untuk meningkatkan bisnis usaha kecil, transportasi, komunikasi politik, hingga berbagai pengetahuan dasar dan ketrampilan.

Pemanfaatan media sosial sangat penting mengingat pengguna media sosial di Indonesia sangat banyak. Saat ini ada 170 juta pengguna aktif di media sosial atau sekitar 61,8% dari total populasi dengan pengguna laki-laki lebih banyak dan rentang usia 18-44 tahun yang paling banyak (Hootsuite & “We Are Social,” 2021). Sedangkan data APJII menyebutkan sebanyak 196,71 juta jiwa atau sekitar 73,7% terkoneksi dengan internet (APJII, 2020). Adagium bahwa *internet of things* sebagai platform media yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari nyata adanya (Yury dalam Drianus, 2018).

Penggunaan media sosial oleh masyarakat Indonesia sangat tinggi dan hal ini terbagi ke dalam berbagai platform. Secara umum masyarakat Indonesia terkoneksi dengan internet sebanyak 8 jam 52 menit dengan waktu menghabiskan internet sebanyak 3 jam 14 menit. Temuan Hootsuit (sebuah platform manajemen tentang media sosial dan agensi marketing sosial) “We Are Social”, menunjukkan bahwa 65,1% masyarakat



Indonesia menjadikan media sosial sebagai sumber utama mencari informasi. Pada survei yang diselenggarakan Hootsuite dan “We Are Social” pada Januari 2021, media sosial yang paling banyak diakses adalah Youtube (93,8%), *WhatsApp* (87,7%), Instagram (86,6%), Facebook (85,5%), dan twitter (63,6%). Sedangkan tiktok di akses oleh 38,7%. *WhatsApp* menjadi media sosial yang paling banyak diakses dan video melalui Youtube. Sebelum pandemi, menurut APJII, (2020) media sosial yang paling banyak dikunjungi adalah *whatsapp* (91,5%), Facebook (65,8%), Youtube 61%, Instagram 42,3%, dan Twitter (10%). Penelitian APJII, Hootsuite dan “*We Are Social*” hampir senada, yaitu *WhatsApp* dan Youtube menjadi sumber informasi yang penting. Penelitian CSRC UIN Jakarta (2020) juga menemukan kepercayaan masyarakat kepada informasi di media sosial 36%.

Penggunaan media sosial khususnya *WhatsApp* mengubah budaya komunikasi. Rutinitas mengirimkan pesan melalui *WhatsApp* telah menjadikan komunikasi tersebut sebagai sebuah budaya teks. Kegiatan *texting* yang sebelumnya sudah membudaya semakin menguat di masa pandemi. Sebelumnya, komunikasi langsung dianggap memberikan nilai dan sentuhan psikologis berbeda. Namun, perubahan budaya dari *face to face* menjadi *computer mediated communication* khususnya bagi *digital native*, telah membangun suatu kedekatan emosi. Tidak hanya berfungsi menyampaikan informasi, media digital memiliki unsur kecepatan, hiburan, kustomisasi dan kebebasan (Fauzi, 2017). Selain mengubah kultur budaya, media sosial juga berdampak pada penyebaran informasi baik yang valid maupun tidak valid. Selain itu, jumlah penerima pesan juga bisa dalam jumlah yang sangat besar. Melalui *whatsapp* pesan berantai dapat terus dikirimkan ke berbagai grup dengan beragam kualitas

informasi. Unsur kebebasan dalam berkomunikasi di media sosial tentu berbeda dengan media berita. Selain itu, kenyamanan pengguna dengan menyesuaikan selera pengguna, misal *profil picture, background, settingan* notifikasi, nada, menjadikan media nyaman bagi pengguna.

### C. Media Sosial, Hoaks dan Disinformasi

Media sosial menjadi wahana edukasi pada masa pandemi namun juga berpotensi menyebarkan hoaks. Sebelum pandemi saja media sosial sudah menjadi saluran berita hoaks sebanyak 87,5% (Mastel, 2019). Meskipun ada penurunan penerimaan berita hoaks yaitu sebanyak 34,6% pada tahun 2019, namun bentuk hoaks semakin bervariasi dan samar. Dokter Reisa sebagai jubah Covid-19 mengungkapkan selama pandemi terdapat lebih dari 50 ribu hoaks seputar pandemi dan pada masa awal pandemi saja sudah ada 5.000 hoaks (Hendro, 2021). Menkominfo melaporkan bahwa sejak 23 Januari hingga 10 Maret 2021 terdapat 1470 isu hoaks terkait dengan pandemi yang tersebar di 2.697 di media sosial dengan rincian platform mulai dari paling banyak yaitu Facebook (1857 kasus), Twitter (438), Youtube (45), dan Instagram (20) (Aditya, 2021). Selain itu, Youtube juga telah menutup 1 juta video sepanjang pandemi karena mengandung disinformasi tentang Covid-19 (Jingga Irawan, 2021).

Berita hoaks menghambat penanganan pandemi sekaligus menunjukkan tindakan nir empati. Tenaga kesehatan sudah berjuang keras dengan bertaruh nyawa, namun masih ada masyarakat yang justru dengan sengaja menebar hoaks. Hoaks dalam berbagai bentuknya: informasi yang tidak tepat (misinformasi), disinformasi, fitnah, dan kabar bohong sedikit banyak akan memengaruhi sikap masyarakat terhadap Covid-19. Selama pandemi, hoaks dikelompokkan menjadi 3 (*tiga*)

tipe: disinformasi, misinformasi, dan malinformasi (Jati Sasongko, 2021). Disinformasi merupakan informasi yang salah namun sengaja disebar, misalnya info bahwa vaksin yang disuntikkan kepada pak Jokowi bukanlah vaksin, melainkan vitamin. Misinformasi yaitu informasi yang salah tetapi orang yang menyebarkan tidak menyadari kesalahannya, tipe ini seringkali terjadi di grup *whatsapp*, misalnya, info bahwa vaksin menyebabkan kelumpuhan. Sedangkan malinformasi yaitu informasi benar tetapi diberi efek provokasi di dalamnya misalnya info tentang adanya seorang dokter yang ragu divaksin. Sedangkan menurut Satgas Covid-19, terdapat 7 jenis mis dan disinformasi yaitu (Covid.go.id, 2021):

1. Satire atau parodi, tidak ada niat untuk merugikan namun berpotensi mengelabui
2. Konten yang menyesatkan, penggunaan informasi yang sesat untuk membingkai sebuah isu atau individu
3. Konten tiruan, konten yang meniru sumber asli
4. Konten palsu, konten baru yang mengandi 100% salah, didesain untuk menipu dan merugikan
5. Koreksi yang salah, ketika muatan judul, gambar, atau keterangan tidak mendukung konten
6. Konten yang salah, yaitu ketika sebuah konten yang asli dipadankan dengan informasi yang salah
7. Konten yang dimanipulasi yaitu ketika informasi atau gambar yang asli dimanipulasi untuk menipu.

Selain jenis-jenis yang tersebut di atas, ada pula yang menjadikan judul berita menarik perhatian pembaca dan memiliki *clickbait* yang tinggi sehingga terus diakses oleh pembaca (Zaenudin, 2018). Padahal berita tersebut

memanipulasi judul dan mengejar *clickbait*. Keragaman pemberitaan pun memunculkan pula istilah infodemik dari WHO sebagai respons situasi pandemi baik yang akurat maupun tidak. Infodemik yaitu informasi yang berlebihan, tidak dapat diruntut kebenarannya, dan berkembang selama pandemi atau emergensi kesehatan (Masudi & Poppy S Winanti, 2021). Pada bagian di bawah ini, pembahasan akan fokus menguraikan bagaimana disinformasi beredar, bagaimana penanganannya, serta dampaknya terhadap penanganan pandemi Covid-19.

#### **D. Pola dan Kecenderungan Menyikapi Informasi Covid-19**

Keterbatasan mobilitas selama pandemi menyebabkan masyarakat menyandarkan sikap dan respons terhadap Covid-19 melalui informasi yang tersebar baik di media massa, televisi maupun media sosial. Media sosial menjadi media baru yang sangat penting sebagai sumber informasi. Namun demikian informasi yang beredar bagai dua sisi, kadang-kadang informasi tersebut membangun kesadaran untuk berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan Covid-19. Sedangkan informasi yang lain merupakan informasi yang tidak tepat dapat memperburuk sikap dan perilaku masyarakat terhadap Covid-19.

Informasi tentang Covid-19 merupakan fenomena baru yang sangat dinamis. Sifat Covid-19 yang baru membuat semua masyarakat ingin tahu karena bercampur dengan rasa khawatir jika tertular maupun kesedihan kehilangan kerabat dan kolega. Kebaruan Covid-19 menjadikan masyarakat tidak mudah untuk mencerna berbagai informasi yang beragam dari berbagai sumber. Sumber yang paling sering dirujuk adalah dari media sosial yang masyarakat dapat langsung menerima, tanpa filter, dan ingin berbagi kepada orang lain. Namun seringkali niat masyarakat berbagi informasi belum diimbangi dengan upaya

pengecekan fakta pemberitaan.

Kekhawatiran terhadap perkembangan Covid-19 dan kebingungan dalam merespons, menjadikan media sosial sumber yang banyak menjadi pilihan. Bagaimanapun media sosial sangat dekat dan lekat dengan kehidupan sehari-hari. Dibandingkan ke sumber resmi, sebanyak 56,87% masyarakat banyak merujuk kepada media sosial (Ruhana & Burhani, 2020). Sedangkan dalam survei CSRC (2020), sebanyak 40,5% masyarakat merujuk dan percaya kepada media sosial yang diyakini, yaitu Youtube, Facebook, Instragram, Tweeter, dan *WhatsApp* grup dibandingkan kepada media resmi (televisei, koran nasional) yaitu sebanyak 58,9%. Terkait dengan informasi vaksin, terdapat 72,76% sambil *wait and see* mereka menggunakan media sosial sebagai sumber informasi utama (Puslitbang Keagamaan Kemenag, 2021). Komunikasi dalam media sosial meningkat dalam jumlah yang berlipat namun tidak sepenuhnya dapat dikendalikan.

Pembuatan informasi itu sendiri tidak bebas nilai. Dalam sebuah studi tentang video yang beredar di grup *whatsapp* pada periode 13 April-5 Agustus 2020, terdapat dua jenis kelompok video, pertama yang berisi sebagai kampanye pencegahan dan penanganan yang dilakukan pemerintah (Wirawan et al., 2021). Sedangkan yang kedua berisi hoaks dan menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan kepanikan warga. Dalam studi tersebut tergambar bahwa dua kelompok konten tersebut mengandung unsur pertarungan wacana baik ideologi, politik, ekonomi dalam memengaruhi masyarakat melalui medium media sosial dan memiliki beragam kepentingan dan tujuan.

Beragam kepentingan itulah yang seringkali dianggap sebagai hulu dari penerimaan terhadap berita dan informasi tentang Covid-19. Tingkat kepercayaan pada pemerintah yang

dipimpin oleh Presiden Jokowi sebagai hasil dari Pemilihan Umum tahun 2019 menjadi salah satu faktor yang kuat yang berdampak pada pandemi Covid-19. Pandemi Covid-19 dan pemilihan presiden adalah dua hal yang berbeda, namun di Indonesia memiliki dampak pada ketidakpercayaan terhadap pandemi dan penanganannya. Hal ini pun berdampak pada situasi kehidupan sosial yang sudah mulai mencair, namun masih menyisakan polarisasi tersebut.

Survei yang dilakukan CSRC terhadap masyarakat dalam kaitannya dengan Covid-19 menunjukkan masih adanya sisa-sisa polarisasi tersebut. Dalam survei CSRC (2020) ditemukan bahwa dari 42% yang mengatakan bahwa Covid-19 merupakan konspirasi, hal ini lebih banyak terjadi pada pemilih Prabowo-Sandi yaitu 48,4% dibandingkan pada pemilih Jokowi-Ma'ruf 37,9%. Begitu pula pada kelompok laki-laki, ketertiban mentaati protokol kesehatan pada pemilih Jokowi 9,4% lebih banyak dari pemilih Prabowo. Dalam hal kepercayaan terhadap institusi negara, pemilih laki-laki milenial yang memilih Prabowo-Sandi 27,7% lebih berpandangan negatif dalam kepercayaan terhadap peran institusi penanganan Covid-19. Terkait dengan kepercayaan kepada orang lain, perempuan milenial pemilih Prabowo-Sandi bersikap negatif sebanyak 64,2% sedangkan pemilih Jokowi-Ma'ruf yang berpandangan negatif sebanyak 43,5%. Data tersebut masih menunjukkan adanya sisa-sisa ketegangan bagi sebagian kecil pemilih Prabowo-Sandi terhadap situasi pemilihan presiden. Sebagaimana fakta hari ini, Prabowo Subianto dan Sandiaga Uno telah masuk dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf. Namun sisa polarisasi berdampak pada penanganan Covid-19.

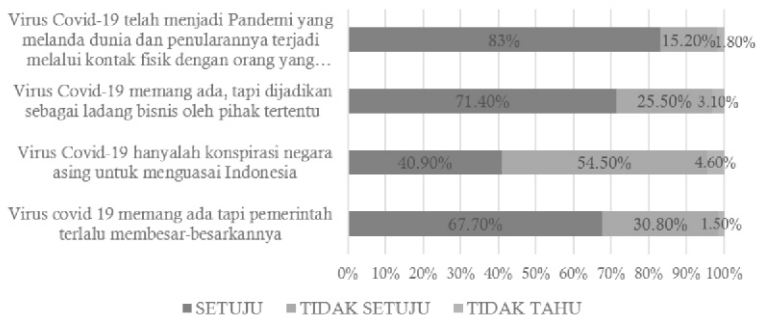
Kepercayaan kepada pemerintah sedikit banyak berdampak terhadap ketaatan pada protokol kesehatan. Selain

itu, kepercayaan pada kemampuan pemerintah menangani Covid-19 juga berpengaruh pada partisipasi masyarakat. Penelitian CSRC (2020) menunjukkan bahwa sebanyak 74,4% memiliki kepercayaan terhadap presiden dapat menangani Covid-19 dengan baik. Survei CSIS (2021) pada Januari 2021 juga menunjukkan bahwa kurang lebih 75%-79% masyarakat memercayai Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah mampu menangani Covid-19. Sedangkan survei SMRC (2020) menyatakan bahwa 75% masyarakat percaya Indonesia keluar dari krisis ekonomi pada masa pandemi Covid-19. Dalam Survei Indikator (2020) meskipun ada penurunan sedikit dari survei Februari 2020, kepuasan kinerja presiden juga masih tinggi mencapai sekitar 66,5% dan kepercayaan kepada presiden masih mencapai 83%. Terkait bantuan sosial, Survei SMRC (2020) Juni awal pandemi masih dinilai 51% tidak tepat sasaran. Sedangkan, survei CSRC menunjukkan sebanyak 65,7% meyakini efektivitas bantuan pemerintah.

Namun demikian, pandangan masyarakat terhadap Covid-19 juga sangat beragam. Pandangan tentang Covid-19 akan menentukan bagaimana sikap dan perilaku terhadap Covid-19. Dari studi CSRC yang diselenggarakan tahun 2020 ditemukan bahwa masih ada 15,2% masyarakat yang tidak percaya bahwa Covid-19 telah menjadi pandemi yang melanda dunia dan penularannya dapat terjadi melalui kontak fisik. Selain itu, sebanyak 71,4% masyarakat percaya bahwa Covid-19 ada tetapi dijadikan sebagai ladang bisnis oleh pihak tertentu. Sebanyak 40,90% masyarakat memercayai bahwa Covid-19 merupakan konspirasi dari negara asing untuk melemahkan Indonesia. Dalam hal ini, isu relasi Indonesia dan Tiongkok yang sering dibesar-besarkan dan menjadi isu yang sering diibaratkan kedekatan pemerintah Indonesia dengan paham komunisme.

Dari pandangan awal tentang Covid-19 pada kelompok masyarakat tersebut maka semakin berat pula pencegahan dan penanganan pandemi Covid-19.

**Grafik 1.**  
Pendapat Masyarakat tentang Covid-19



Ketaatan pada protokol kesehatan juga sangat beragam. Dari studi CSRC misalnya masih ada 6,1% dan dalam studi Kementerian Agama (Ruhana & Burhani, 2020) ada 3,12% masyarakat khususnya generasi milenial yang tidak menerapkan protokol kesehatan saat beraktivitas di luar padahal protokol kesehatan adalah upaya melindungi diri dan orang lain. Selain itu, masih ada pula masyarakat yang mengatakan bahwa Covid19 tidak berbahaya dan tidak menyebabkan kematian (13%)(Ruhana & Burhani, 2020). Pada awal 2021, sebanyak 7,5% di Jakarta dan 13% di Jogja merasa malu jika melanggar protokol kesehatan (CSIS, 2021). Ketika protokol kesehatan diberlakukan di rumah ibadah, hal ini juga menimbulkan proses adaptasi yang tidak mudah. Doktrin keagamaan, kebersamaan atau jamaah, bersosialisasi menjadi hal yang sangat diyakini selama ini. Tidak heran ditemukan dalam Survei Kementerian Agama, sebanyak 24,98%, dan



Survei CSIS (2021), sebanyak 34,3%, masyarakat Jakarta yang tidak setuju dengan pembatasan kegiatan keagamaan. Selain itu, survei CSRC menemukan bahwa masih ada 67% masyarakat yang setuju bahwa virus Covid-19 memang ada tetapi pemerintah terlalu membesar-besarkannya.

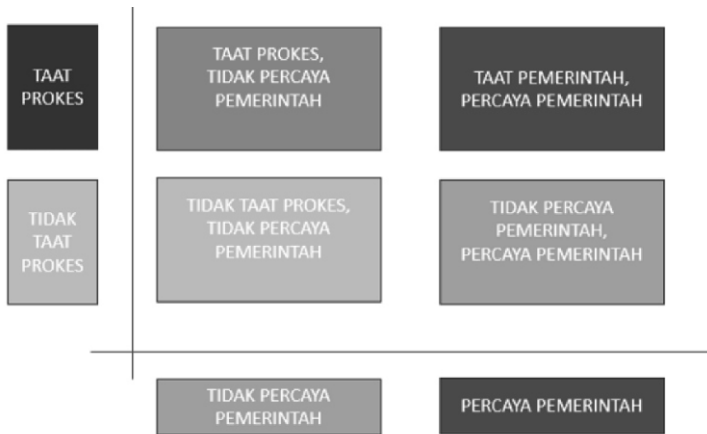
Opini masyarakat bahwa Covid-19 adalah bagian dari konspirasi diyakini berhubungan dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Studi yang dilakukan oleh Bruder dan Kunert (2021) di Jerman tentang Covid-19 menunjukkan bahwa keyakinan pada teori konspirasi tidak berhubungan dengan ketakutan atau kekhawatiran, kepercayaan kepada media, kepercayaan kepada sistem kesehatan, dan perilaku protokol kesehatan. Hanya satu yang berhubungan dengan keyakinan pada teori konspirasi, yaitu kepercayaan kepada pemerintah khususnya terkait dengan perilaku pencegahan menyebarnya Covid-19. Temuan hasil studi di Jerman ini dapat dilihat gejalanya di Indonesia, meskipun dalam hal media sosial memiliki efek yang berbeda antara Jerman dan Indonesia baik dalam tingkat pendidikan, literasi media, maupun ketersediaan fasilitas kesehatan.

Terdapat 4 kelompok jika kita gambarkan situasi ketaatan terhadap protokol kesehatan dan kepercayaan pada pemerintah. *Kelompok pertama* adalah yang tidak percaya kepada pemerintah, namun tidak pula taat protokol kesehatan. Ketidakpercayaan kepada pemerintah ternyata juga diikuti dengan abai terhadap protokol kesehatan. Kelompok ini sudah sangat pesimis baik terhadap pemerintah maupun terhadap Covid-19. *Kelompok kedua*, kelompok yang percaya kepada pemerintah, namun tidak taat protokol kesehatan. Faktor yang berpengaruh antara lain pengetahuan, berita hoaks, dan juga secara kultur tidak mudah berganti pada protokol kesehatan. *Kelompok ketiga*, kelompok

yang tidak percaya kepada pemerintah namun tetap taat protokol kesehatan. Ketidakpercayaan terhadap pemerintah adalah keyakinan sebagian orang, namun fakta sosial menunjukkan bahwa untuk melanjutkan hidup harus tetap taat pada aturan protokol kesehatan, misalnya vaksin dan *double masker*. *Kelompok keempat* adalah mereka yang percaya kepada pemerintah dan taat protokol kesehatan. Kelompok ini memang meyakini keberadaan Covid-19 sekaligus memiliki kepercayaan bahwa pemerintah dapat menangani Covid-19. Namun empat kelompok ini sangat cair untuk berganti dari satu kelompok ke kelompok lain dengan pengaruh berbagai faktor, kebutuhan, pengalaman, hingga informasi.

**Grafik 2.**

Kepercayaan terhadap Pemerintah dan Ketaatan pada Protokol Kesehatan



Unsur ketaatan pada Covid-19 juga terkadang karena pengalaman. Melihat kerabat dan keluarga yang meninggal akibat Covid-19 juga menimbulkan “efek” yang sangat dahsyat bagi kesadaran individu untuk taat pada prokes. Kehilangan

orang dekat menjadikan perasaan seseorang sangat terguncang dan dapat menimbulkan kesadaran walaupun tingkat kesadarannya berbeda. Misalnya contoh kasus sebuah kelompok arisan di sebuah desa di Bekasi mengadakan perjalanan untuk menghadiri hajatan, merekapun terpapar virus, yang menyebabkan 1 orang meninggal dan 47 orang dinyatakan positif (Vitorio, 2021). Begitu pula kelompok pelaku ziarah di Purworejo terpapar, menyebabkan 52 orang positif dan 1 meninggal (Priyo, 2021). Sadar akan bahaya penyebaran virus di depan mata, anggota masyarakat di dua lokasi tersebut menjalankan isolasi. Pengalaman tersebut tentu memberikan dorongan ketaatan pada protokol kesehatan dan pemahaman terhadap eksistensi Covid-19.

Ketaatan pada protokol kesehatan dan anjuran vaksin terkadang juga merupakan kebutuhan. Misalnya, adanya aturan pada 8 Juli 2021 bahwa penumpang KRL harus memakai masker *double*, jika tidak mereka tidak dibolehkan naik KRL (Dea, 2021). Aturan tersebut menyebabkan masyarakat taat. Begitu pula keengganan warga akan vaksin, namun begitu vaksin menjadi syarat perjalanan maupun masuk ke mal, pusat perbelanjaan, dan bioskop maka mereka melakukan vaksin. Pada Agustus 2021 misalnya ada ratusan pengunjung gagal masuk mal karena belum vaksin (Suara.com, 2021). Aturan ini hanya dikecualikan kepada warga yang baru terinfeksi Covid-19 dan belum bisa divaksin, serta warga yang memiliki komorbid dan belum bisa divaksin. Kondisi tersebut mendorong sekaligus “memaksa” masyarakat taat pada aturan protokol kesehatan sekaligus menjalani vaksin yang belum tentu diyakininya.

#### **E. Problematika Disinformasi dan Penegakan Hukum**

Berbagai disinformasi tersebar sepanjang pandemi seiring dengan dinamika perkembangan dan penanganan Covid-19.

Kita semua yang mengakses media sosial kemungkinan besar pernah membaca satu dari sekian hoaks yang beredar selama pandemi. Bahkan mungkin banyak masyarakat mempraktekkan hoaks tersebut karena dianggap sebagai bagian dari mengupayakan berbagai macam ikhtiar demi tidak tertular Covid-19 maupun agar dapat sembuh dari Covid-19.

Jika melihat dari berbagai sumber, rentetan hoaks dapat dikelompokkan ke dalam beberapa kategori, *pertama*, asal muasal virus dan virus Covid-19 itu sendiri; *kedua* penanganan Covid-19; *ketiga*, pengobatan; *keempat*, terkait situasi umum, sosial, dan pemerintah yang terkait dengan penanganan Covid-19 Mahar (Kominfo, 2021 dan Suara.com, 2021). Hoaks *kelompok pertama* diantaranya terkait dengan virus Covid-19 menyebar akibat kebocoran pada sebuah laboratorium di Wuhan. Virus Covid-19 dapat ditularkan dengan gigitan nyamuk padahal yang sebenarnya penularan melalui droplet atau percikan dahak. Hoaks bahwa hanya orang dewasa yang terkena Covid-19, padahal pada gelombang pertama saja terdapat sebanyak 77.254 anak yang terkena Covid-19 (Maria, 2021). Bahkan kematian anak Indonesia tertinggi se Asia Pasifik (Tiara, 2021). Pada saat gelombang kedua Covid-19 Juni-Juli 2021, 1 dari 8 pasien Covid-19 adalah anak (Bbc.com, 2021).

Hoaks lainnya yaitu corona adalah virus paling berbahaya padahal faktanya kematian akibat corona adalah 2,2%. Selain itu, ada hoaks yang beredar bahwa Covid-19 sudah diprediksi sejak tahun 2016. Berita hoaks lainnya yaitu virus Covid-19 dapat menular melalui barang impor padahal virus memiliki waktu hidup yang berbeda pada masing-masing benda. Hewan peliharaan dapat menyebarkan Covid-19, padahal jika bersih dan diberi vaksin maka tidak bisa menyebarkan virus. Serta

hoaks lainnya bahwa termometer dapat mengidentifikasi pasien Covid-19 padahal termometer hanya melakukan *screening* terhadap suhu tubuh.

*Hoaks kelompok kedua* penanganan Covid-19. Di antara berita tersebut antara lain berendam air panas dan uap panas dari pengering tangan dapat membunuh virus dan menggunakan sarung tangan karet mengurangi risiko penularan, padahal resiko penularan terjadi karena menyentuh area wajah dari sarung tangan yang kotor. Harusnya yang dilakukan adalah cuci tangan. Berita hoaks lainnya adalah pasien yang pernah terjangkit Covid-19 akan selamanya terkena virus, padahal pasien Covid-19 yang sembuh juga ada indikator terbebas dari virus. Begitu juga dengan hoaks bahwa berkumur dengan air garam dapat mengobati Covid-19 tidaklah benar. Air garam membantu membersihkan lendir namun tidak otomatis menyembuhkan.

*Hoaks kelompok ketiga* tentang obat dan pencegahan di antaranya adalah bahwa bawang putih dapat mencegah penularan Covid-19. Minum antibiotik dapat membunuh virus, padahal antibiotik untuk membunuh bakteri; untuk membunuh virus diperlukan antivirus. Penyemprotan alkohol atau klorin ke tubuh dapat membunuh virus padahal upaya tersebut dapat membuat kulit iritasi dan bakteri mudah masuk. Ada lagi hoaks bahwa hanya dengan mengenakan hazmat dan masker N95 seseorang dapat terlindungi dari corona, padahal tetap harus menyesuaikan tempat, misalnya, hazmat tidak perlu dipakai di tempat umum. Salah satu hoaks yang banyak diyakini, minum minyak kayu putih baik langsung maupun diteteskan ke dalam air hangat dapat meredakan Covid-19. Minyak kayu putih mengandung mentol sehingga melonggarkan tenggorokan, namun tidak otomatis menyembuhkan Covid-19.

*Hoaks keempat* yang terkait situasi umum, sosial, dan pemerintah terkait dengan penanganan Covid-19 juga banyak terjadi. Di antaranya adalah daerah panas dan dingin tidak terkena Covid-19, orang yang berhalangan vaksinasi tidak dapat naik KRL, tautan subsidi pulsa pelajar dari Kemendikbud, hingga pesan berantai yang berisi agar tidak bepergian ke luar kota maupun berkumpul karena adanya varian baru. Padahal pesan dari dr. Siti Nadia Tarmizi, juru bicara vaksinasi Covid-19 Kementerian Kesehatan, mengatakan bahwa masyarakat tidak boleh lengah dengan keadaan yang sudah membaik namun tetap taat pada protokol kesehatan (Covid.go.id, 2021). Termasuk dalam kategori ini hoaks bahwa Presiden Jokowi diberitakan pulang kampung padahal Presiden yang membuat aturan dilarang mudik (Covid.go.id, 2021).

Beberapa hoaks sangat mengemuka dan menjadi perbincangan. Di antaranya soal vaksin yang memiliki tingkat hoaks yang sangat tinggi. Vaksinasi pada awalnya disebutkan sebagai pemasangan *chip* untuk mengontrol manusia sekaligus penguasaan dari negara pembuat vaksin terhadap penerima vaksin (Covid.go.id, 2021). Bahkan disebutkan bahwa vaksin Astrazeneca, Pfizer dan Moderna terhubung dengan *bluetooth*, dengan pengecualian vaksin Sinovac (Covid.go.id, 2021). Belum lagi beberapa isu terkait Bill Gates yang menolak vaksin Covid-19 untuk anaknya, hingga berita hoaks bahwa WHO menemukan vaksin palsu di Indonesia dan video potensi bahaya vaksin Covid-19. Selain itu, beberapa kasus penyakit parah dianggap karena vaksin di antaranya menimpa artis Tukul yang mengalami pendarahan otak namun dianggap karena vaksin (Covid.go.id, 2021). Ada pula hoaks yang memberitakan seorang dokter di Palembang meninggal karena vaksin Covid-19 (Covid.go.id, 2021), ketua DPRD dari Kabupaten Mimika

(Covid.go.id, 2021), hingga 5 orang sekeluarga meninggal setelah vaksin (Covid.go.id, 2021). Di masyarakat, terjadi banyak misinformasi bahwa vaksin menyebabkan positif Covid-19, berdampak penyakit parah lainnya hingga vaksin menyebabkan orang meninggal. Padahal seringkali masyarakat tidak jujur dengan keadaannya saat vaksin dan seharusnya orang yang akan menerima vaksin jujur dengan kondisinya saat *screening*.

Hoaks terkait dengan vaksin juga terjadi pada saat awal vaksin. Beredar sangat luas sekali bahwa vaksinasi presiden harus diulang karena tidak tegak lurus (Covid.go.id, 2021). Hal ini disampaikan oleh seorang dokter di Cirebon bahwa suntikan harusnya menembus otot. Belum lagi berita bahwa vaksin yang dipakai presiden tidaklah asli karena harus dimasukkan ke dalam jarum suntik (Fitri, 2021). Hingga hoaks bahwa cairan masih utuh pada alat suntik saat jarum diambil dari Presiden Jokowi (Tim Cek Fakta, 2021). Belum lagi adanya berita MUI Sumatera Barat yang menolak vaksin karena seharusnya vaksin bebas dari najis. Namun hal ini dibantah oleh MUI bahwa sudah ada fatwa dari MUI Nomor 14 Tahun 2021 bahwa MUI membolehkan penggunaan vaksin astrazeneca dengan hukum mubah serta 12 fatwa pengendalian Covid-19 (Adi, 2021).

Hoaks tentang vaksin sangat merugikan masyarakat. Studi Kementerian Kesehatan terhadap tenaga kesehatan yang telah mendapatkan vaksin menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 saat ini efektif dalam menghadapi mutasi virus (Muidigital, 2021). Studi ini menjelaskan bahwa “Sebanyak 5% dari tenaga kesehatan yang divaksinasi lengkap dilaporkan terkonfirmasi Covid-19 pada periode April-Juni 2021. Jumlah ini lebih besar dibandingkan dengan tenaga kesehatan yang terkonfirmasi Covid-19 pada periode Januari-Maret 2021 yang jumlahnya

hanya 0.98%. Namun begitu, jumlah tenaga kesehatan yang telah divaksinasi lengkap yang harus dirawat jauh lebih rendah (0,17%) ketimbang mereka yang belum divaksinasi (0,35%). Hal ini menunjukkan bahwa vaksin Covid-19 yang saat ini digunakan efektif terhadap mutasi virus Covid-19 (Rokom, 2021). Selain itu, 2,3% tenaga kesehatan yang membutuhkan ICU yaitu sebanyak 91% adalah mereka yang belum divaksin atau baru mendapat 1 dosis vaksin. Pada pasien umum, risiko kematian menurun hingga 37% jika telah mendapatkan 1 dosis vaksin, sedangkan bagi dua dosis vaksin, risiko kematiannya turun menjadi 73% (Rokom, 2021). Namun tentu vaksin bukan satu-satunya cara mencegah terpapar Covid-19 karena tetap harus taat pada protokol kesehatan. Sehingga disinformasi tentang vaksin yang mendorong orang tidak mau vaksin sangat merugikan bagi kesehatan mereka.

Hoaks lainnya adalah tentang pasien yang masuk rumah sakit karena penyakit yang dideritanya, tapi divonis covid alias dicovidkan. Bukan mereka saja, orang-orang yang tes PCR maupun antigen juga dicovidkan (Dwi, 2021). Bahkan yang lebih ekstrem dari itu, hoaks yang beredar, pasien yang datang ke rumah sakit disuntik mati oleh tenaga kesehatan (Ikbal, 2021). Hoaks seperti ini yang menciptakan kepanikan dan membuat beberapa keluarga korban Covid-19 melakukan pengambilan paksa jenazah. Ada sebagian masyarakat yang kurang memahami mengapa penanganan jenazah Covid-19 harus menggunakan protokol kesehatan. Dalam hal ini pemulasaran, penyolatan jenazah yang Muslim, hingga pemakaman harus menggunakan protokol kesehatan untuk mencegah penularan. Kebijakan terkait pemakaman jenazah Covid-19 pada akhirnya mengalami perubahan; sebelumnya jenazah harus dimakamkan di tempat pemakaman khusus Covid-19, namun



kemudian dibolehkan dilakukan di tempat pemakaman umum dengan tetap menjalankan protokol kesehatan.

Di masa-masa awal pandemi, peristiwa pengambilan jenazah pasien Covid-19 secara paksa banyak terjadi di berbagai daerah. Namun setahun setelah pandemi berlangsung pun kejadian serupa masih terjadi, seperti di Rumah Sakit Umum Siloam Kota Kupang Nusa Tenggara Timur. Pengambilan jenazah secara paksa terjadi antara lain di Payakumbuh, Bekasi, Surabaya, Banyuwangi, Makassar, Bone Bolango, Gorontalo, dan Menado (Kominfo, 2021). Bahkan di Makassar terjadi di empat rumah sakit yaitu RS Deli, RS Stellamaris, RS Bhayangkara, dan RS Labuang Baji (Nafisyul, 2021). Di Brebes selain terjadi pengambilan paksa jenazah juga terjadi aksi perusakan rumah sakit (Nafisyul, 2021). Akibat peristiwa yang melibatkan kerumunan massa tersebut, sejumlah pelaku aksi pun terpapar virus Covid-19. Kejadian tersebut merupakan dampak dari kurang tepatnya informasi yang diterima dan pengetahuan yang terbatas dari masyarakat kita.

Meyakini hoaks juga menjadi bagian dari penyumbang masyarakat tidak mau mendapatkan penanganan yang tepat. Kondisi tersebut juga dapat berujung pada kematian karena terlambatnya penanganan. Seorang keluarga korban Covid-19, Helmi Indra, menceritakan kepada media bahwa ayahnya tetap meyakini bahwa vaksin hukumnya haram walaupun Helmi sendiri sudah menunjukkan fatwa MUI tentang kebolehan vaksin (Dany, 2020). Ayahnya bersikeras menolak divaksin. Selain itu, sang ayah juga sangat mempercayai Podcast dokter Lois yang sempat ditangkap karena menyebarkan hoaks bahwa interaksi obatlah yang menyebabkan orang meninggal dunia bukan karena virus. Karena menelan bulat-bulat pendapat ini, ketika terpapar Covid-19, dia pun menolak keras minum obat

dan akibatnya meninggal. Helmi menyayangkan kondisi ayahnya yang termakan hoaks hingga meninggal karena Covid-19. Lain lagi cerita keluarga lain, M. Nizar, yang ayahnya meninggal yang juga akibat termakan hoaks (Rakhmad, 2021). Ayahnya menolak divaksin karena percaya dengan informasi di grup *whatsapp* yang menyebarkan hoaks bahwa vaksin memiliki efek samping yang berbahaya. Sang ayah pun terpapar Covid-19 pada saat mengantar jenazah tetangga yang meninggal ke Madura tanpa mengetahui bahwa jenazah meninggal karena korban Covid-19. Kisah Nizar dan Helmi menggambarkan bagaimana dampak hoaks di media sosial sangat menghambat penanganan pasien Covid-19. Mereka berdua menghimbau agar masyarakat berhenti menyebarkan hoaks yang membahayakan tidak hanya dirinya, tetapi juga orang lain yang menerima berita hoaks.

Pemerintah dan kepolisian menyatakan bertindak tegas terhadap para penyebar berita hoaks Covid-19 di berbagai daerah. Kabareskrim Polri Komjen Pol Agus Andrianto memerintahkan bawahannya untuk bertindak tegas setiap upaya mengganggu penanganan Covid-19 (CNN, 2021). Kominfo menegaskan bahwa pelaku penyebaran berita bohong dapat dikenai Pasal 45A ayat 1 UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yaitu pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda maksimal 1 milyar (Isnaya, 2021). Pelaku penyebar disinformasi ini terjadi di berbagai daerah diantaranya Lampung (Agus, 2020), Gorontalo (Kupastuntas.co, 2021), Bandara Soekarno Hatta (Kumparan.com, 2020), Kendari (Kumparan.com, 2020), Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan (Sarjono, 2021). Pada April 2020, 75 orang ditangkap karena menyebarkan hoaks Covid-19 (Siti, 2020), dan menahan 17 dari 104 tersangka pada November 2020 (Siti, 2020).

Penegakan hukum juga berlaku terhadap para pengambil jenazah dan pelaku perusakan RSUD. Hukuman yang diterapkan menggunakan Pasal 2112 sampai Pasal 2118 KUHP serta Pasal 93 UU Nomor 16 tahun 2018 tentang karantina kesehatan, Pasal 214 KUHP Juncto Pasal 335 KUHP Juncto Pasal 336 KUHP Juncto Pasal 93 KUHP Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 dengan ancaman hukuman sampai 7 tahun (Sholahuddin, 2020). Di Banyuwangi, seorang aktivis ditahan karena mengambil paksa jenazah yang terkonfirmasi positif Covid-19 (Nafisyul, 2020).

Penegakan hukum bagi penyebar ujaran kebencian terjadi pada Jerinx yang merupakan pemain band *Superman is dead*. Jerinx menyebut bahwa Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah kacung WHO (Eris, 2020), antigen dan PCR memberatkan rakyat, dan Covid-19, katanya, adalah bisnis, konspirasi dan narasi pemerintah untuk menakut-nakuti rakyat (CNN, 2020). Kesalahan Jerinx sebenarnya lebih karena membahayakan nyawa orang dengan menyebarkan informasi yang sesat (CNN, 2020). Jerinx sempat divonis 10 bulan denda 10 juta rupiah dan subsider 1 bulan (Felix, 2020). Akhirnya Jerinx pun mau ikut divaksin dan mengatakan jangan ragu untuk divaksin (CNN, 2020).

Berbagai situasi ketidakpercayaan terhadap Covid-19 juga mewarnai kehidupan penegakan hukum selama pandemi Covid-19. Kasus Rizieq Shihab misalnya adalah penyebaran berita bohong terkait hasil swab di rumah sakit UMMI Bogor dengan hukuman 4 tahun penjara (Marieska, 2021). Selain itu Rizieq Shihab juga membuat kerumuman baik saat menikahkan putrinya di Petamburan (Detik.com, 2021) maupun saat bertemu simpatisannya di Megamendung dalam acara peresmian masjid raya di Markaz Syariah Pesantren Alam

Agrokultural (Kadek, 2020). Selain itu Indonesia juga menghadapi kasus antigen palsu di Medan dan surat hasil tes antigen palsu. Kasus lainnya adalah sumbangan *prank* atau kebohongan dari keluarga Akidi Tio yang berjanji memberikan sumbangan 2 Trilyun (2T) rupiah kepada pemerintah untuk penanganan Covid-19 melalui Polda Sumatra Selatan. Namun sumbangan tersebut ternyata tidak pernah terwujud (Kadek, 2020). Tidak lama setelah hoaks yang menimpa kepolisian tersebut Kapolda Sumatera Selatan pun diganti (Detik.com, 2021).

#### **F. Peran Pemerintah dan Masyarakat dalam Pencegahan Disinformasi Covid-19**

Hoaks bukanlah hal baru dan sudah dikenal sejak tahun 1800, awal mula era revolusi industri di Inggris (Juditha, 2018). Namun ketika era digital masuk, hoaks begitu cepat tersebar dan tidak mudah dikendalikan utamanya dalam media sosial. Peralannya, pengguna dapat mengirim dan menerima pesan tanpa aturan, padahal pesan tersebut dapat berdampak luas bagi kehidupan masyarakat. Kepemilikan konten media sosial mutlak pada kontribusi pengguna atau pemilik (*user generated content*, UGC) untuk berpartisipasi (Lister dkk dalam Juditha, 2018). Selain itu, media sosial juga memberi ruang khalayak atau konsumen untuk menyimpan informasi, memberikan keterangan, membuat penyesuaian, dan mengedarkannya (Jenkins, 2002, dalam Juditha, 2018).

Pemerintah menyadari berbahayanya hoaks karena berpotensi mengganggu keamanan dan persatuan bangsa. Respon pemerintah terhadap penyebaran hoaks di platform digital diawali dengan pendirian Badan Sandi Negara yang kelak berubah menjadi Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) melalui Perpres Nomor 53 Tahun 2017 yang disempurnakan

dengan Perpres Nomor 133 Tahun 2017 dan terakhir dengan Perpers Nomor 28 Tahun 2021 (Siswoko, 2017). Selain itu, Dewan Pers juga bekerjasama dengan Facebook dan Twitter untuk mendorong media sosial online berkomitmen menjunjung tinggi demokrasi, keadilan, kepentingan publik dan menjaga profesionalitas sebagai komitmen terhadap kode etik jurnalistik (Siswoko, 2017). Selain itu, lahirnya UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, meskipun diwarnai perdebatan atasnya, adalah bagian dari upaya adaptasi pemerintah terhadap hadirnya hoaks. Selain itu, pemerintah juga menciptakan berbagai aplikasi *e-government* sebagai bagian dari reformasi birokrasi, dalam rangka meningkatkan akuntabilitas serta efektivitas dan efisiensi layanan publik (Katharina, 2018).

Berbagai organisasi juga hadir membantu melawan hoaks. Lahirnya gerakan masyarakat [turnbackhoaks.id](https://turnbackhoaks.id) (Audrey, 2021) dan masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) (Kominfo, 2021) adalah bentuk kepedulian masyarakat melawan hoaks. Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan Fatwa MUI Nomor 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media sosial (Mafindo, 2021). Fatwa tersebut menegaskan pentingnya bertanggung jawab dalam menyebarkan informasi dan penyebaran hoaks menimbulkan dampak *mafsadah* di tengah masyarakat. Selain itu Muhammadiyah tahun 2018 juga membahas Fikih Informasi sebagai respons terhadap banyaknya hoaks. Fikih ini diharapkan menjadi pedoman dalam berkomunikasi untuk bertanggung jawab dan cermat dalam berkomunikasi, mempertimbangkan dampak manfaat atau *mudharat*, serta pentingnya verifikasi informasi (Muhammadiyah, 2018).

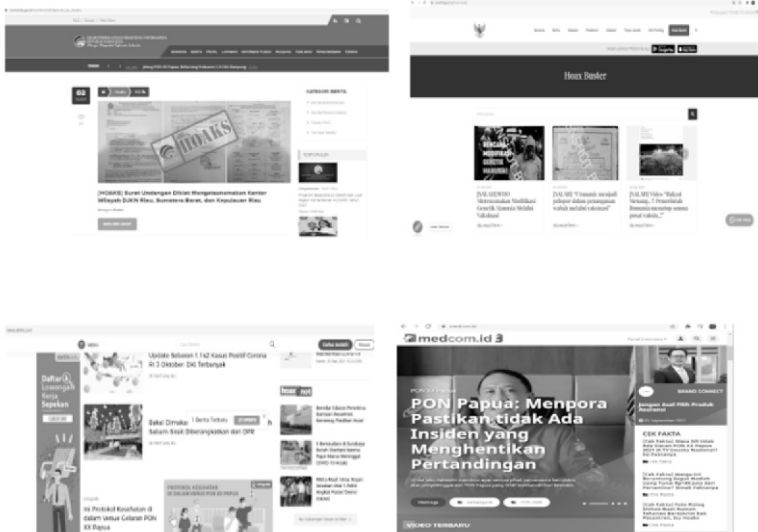
Bahkan Presiden meminta Muhammadiyah membantu pemerintah menangkal hoaks vaksin Covid-19 (MUI, 2021). Pengurus Besar Nahdlatul Ulama melalui Lembaga Bahtsul Masail juga menyatakan haram membuat maupun menyebarkan berita palsu, bohong, menipu atau yang disebut hoaks (Dewi, 2020).

Selama masa pandemi, pemerintah juga tidak henti-hentinya melakukan upaya mencegah tersebarnya hoaks. Situs Kominfo melalui laporan isu hoaks juga terus memberikan informasi terkait hoaks bekerjasama dengan elemen masyarakat. Berbagai laporan hoaks tentang Covid-19 diklarifikasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi. Pada 12 Agustus 2020 Kominfo mencatat 1.028 hoaks beredar terkait Covid-19 (Abdullah, 2016), dan hingga Mei 2021 Kominfo mencatat adanya 1733 hoaks tentang Covid-19 dan vaksin (Binti, 2020). Satgas Covid-19 yang lahir karena pandemi juga secara khusus memiliki bagian *hoax-buster* (relawan untuk melawan penyebaran hoaks) (<https://covid19.go.id/p/hoaks-buster>) dalam melawan hoaks sekaligus meluruskan informasi yang benar tentang Covid-19. Satgas Covid-19 dengan *hoax-busternya* pada 16 Maret 2020 telah berhasil mengkonter hoaks yang beredar di grup Whatsapp bahwa kapal rute Banda Aceh Sabang distop karena virus corona. Keberhasilan lainnya mengkontra hoaks bahaya vaksin Pfizer bagi bayi yang disusui. Kontra itu dilakukan pada 9 Oktober 2021 sebanyak 96 laman. Kehadiran website Satgas Covid-19 menjadi salah satu rujukan penting sehingga masyarakat langsung mendapatkan jawaban informasi yang benar terhadap berita yang beredar. Selain itu, beberapa media juga secara aktif membuat kolom hoaks di antaranya detik.com dan medcom.id. Peran media online sangat penting untuk menjadi rujukan masyarakat dalam

memberitakan informasi yang tepat. Artinya, isu hoaks tidak hanya menjadi perhatian pemerintah semata. Semua pihak tetap berupaya dapat memberikan kontribusi dalam penanganan hoaks yang berdampak fatal dalam penanganan Covid-19.

### Grafik 3.

Kolom Hoaks pada Situs Kominfo, Satgas Covid, dan Detik (Searah Jarum Jam)



Dalam menyikapi hoaks, masyarakat juga mengalami perkembangan dan adaptasi. Menurut Survei Mastel (2019), sebelum Covid-19 masyarakat memiliki kepekaan yang tinggi terhadap informasi dan berita yang menjelek-jelekkan orang lain. Pada 2019, media sosial menjadi sumber utama dalam meluruskan persebaran hoaks dibandingkan klarifikasi di media massa atau sumber yang terpercaya. Pada 2017 kebanyakan orang menyikapi hoaks dengan menghapus atau mendiamkannya. Namun, pada 2019, orang mulai melakukan

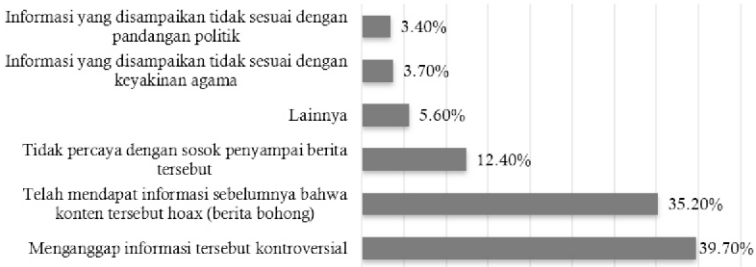
kontra hoaks, menegur pengirim, atau yang paling dominan memeriksa kebenaran fakta. Namun demikian, Survei Mastel juga memberikan gambaran bahwa masih ada masyarakat yang mendiamkan (16,9%) berita sensasional, atau bahkan meneruskannya karena merasa beritanya bermanfaat dan valid, sumber berita dari orang yang kredibel, sementara ia ingin menjadi orang pertama yang menyebarkannya. Namun tak jarang pula alasan menyebarkan berita hoaks tersebut karena iseng saja.

Ketidaktahuan mencari sumber yang benar tentang berita hoaks masih dialami oleh masyarakat. Menurut Mastel (2019) sebanyak 21,8% masyarakat masih menyatakan sulit memeriksa kebenaran berita sensasional. Selain itu, masyarakat menyatakan bahwa kesulitan terkait hoaks karena akses internet lambat (56,2%), tidak tahu caranya (27,4%) dan tidak ada kuota (16,4%). Selain itu masyarakat mengira sudah ada yang memeriksa (55,8%) dan tidak mau repot (37,7%). Dari survei CSRC (2020), ditemukan bahwa 31,9% masyarakat pernah melakukan klarifikasi kebenaran terhadap informasi konten media sosial. Sedangkan dorongan masyarakat melakukan klarifikasi antara lain menganggap informasi tersebut kontroversial (39,7%), telah mendapat informasi bahwa konten tersebut hoaks (35,2%), dan tidak percaya pada penyampai berita (12,4%). Sedangkan lainnya adalah karena perbedaan pandangan politik dan agama. Kesadaran mengklarifikasi fakta ini penting untuk terus ditingkatkan sehingga tidak termakan hoaks.



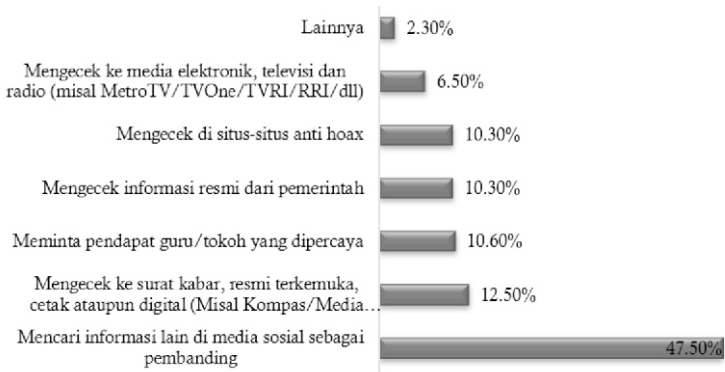
#### Grafik 4.

Sikap masyarakat beragam ketika menerima berita hoaks.



Berbagai cara melakukan klarifikasi informasi dilakukan oleh masyarakat. Survei CSRC (2020) menunjukkan bahwa sebanyak 47,5% responden mengklarifikasi berita dengan cara mencari informasi lain di media sosial sebagai pembanding. Sedangkan lainnya dengan cara mengecek surat kabar resmi terkemuka baik cetak maupun digital (12,5%), minta pendapat guru atau tokoh yang dipercaya (10,6%), mengecek informasi resmi dari pemerintah (10,3%), mengecek situs anti hoaks (10,3%). Sedangkan sisanya mengecek ke media elektronik televisi dan radio (6,5%). Sedangkan data Mastel (2019) menyebutkan mayoritas masyarakat (82,8%) mengandalkan *search engine* dalam memeriksa kebenaran berita hoaks. Dengan demikian, berbagai pemangku kepentingan baik pemerintah, media, tokoh, serta situs anti hoaks, memiliki peran yang besar bagi masyarakat sebagai sumber klarifikasi bagi masyarakat.

**Grafik 5**  
Pengecekan Berita Hoaks



Penyelesaian masalah hoaks harus holistik dan integratif, dan penanganan penyebaran hoaks harus berbasis kelembagaan, teknologi, dan literasi (Juditha, 2018). Kontra narasi hoaks secara kelembagaan tidak bisa hanya dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat saja, namun semua elemen masyarakat termasuk media harus ikut bergerak. Terkait dengan kelembagaan, sebelumnya telah dibahas bahwa Kominfo, Satgas Covid-19, dan BSSN telah melakukan kontra narasi hoaks. Sedangkan kepolisian melakukan penegakan hukum secara masif. Organisasi masyarakat Mafindo, *Turnback Hoaks* dan media serta organisasi keagamaan baik MUI, Muhammadiyah dan Nahdatul Ulama juga turut serta.

Secara teknologi, platform media sosial di Indonesia juga memberikan peran yang luar biasa. Pemerintah melalui Menkominfo meminta media sosial untuk secara pro aktif *takedown* konten hoaks (Pratiwi, 2021). Facebook menjadi platform dengan pengajuan *takedown* tertinggi yaitu mencapai 4.045 dan semuanya ditindaklanjuti (Intan, 2021). Youtube telah menghapus 1 juta video hoaks terkait Covid-19 sejak

Februari 2020 (Intan, 2021), sedangkan terkait video vaksin kurang lebih 130.000 juga telah dihapus (Vidi, 2021). Platform media sosial sebagai bagian dari dunia usaha juga turut ikut membantu menghentikan hoaks.

Literasi digital dan edukasi tentang Covid-19 secara benar menjadi kunci penghentian hoaks sekaligus melakukan edukasi informasi yang benar. Junaedi dan Sukmono (2020) menemukan bahwa mahasiswa yang sudah mendapatkan literasi digital dapat mencari, memfilter sebelum menyebarkan kembali informasi tentang Covid-19. Edukasi melalui media sosial memiliki peran yang sangat penting dalam menyebarkan informasi kesehatan dan mengatasi infodemic dan misinformasi (Tsao et al., 2021). Masyarakat penting mendapatkan informasi tentang cara memfilter informasi secara benar dan menyebarkan informasi secara benar (Edy, 2020). Masyarakat pun harus memahami beberapa tanda hoaks: di antaranya judulnya provokatif, bahasanya memberikan dampak amarah dan permusuhan, minta diviralkan, serta sumber tidak jelas, dan bias (Thea, 2021). Pada 20 Mei 2021, Menkominfo telah meluncurkan program Literasi Digital Nasional “Indonesia Makin Cakap Digital 2021” yang akan dilakukan di 514 kabupaten/kota. Meskipun tidak terkait langsung dengan Covid-19, usaha tersebut tentu memberikan manfaat dalam bermedia sosial dan tidak mudah terjebak hoaks pandemi Covid-19.

Pemerintah juga dapat melakukan promosi kesehatan sebagai informasi yang benar tentang Covid-19, misalnya informasi tentang *physical distancing* melalui media sosial (Hakim, 2021). Pemerintah harus memanfaatkan media baik televisi, aplikasi chat *whatsapp*, media sosial, dan memiliki akses yang lebih besar dalam mesin pencari digital (Lembaga Survei

Indonesia, 2021). Satgas Covid-19 secara nasional juga memberikan peran yang baik dalam melakukan literasi yang benar tentang pencegahan, penanganan, dan pemulihan dari Covid-19. Kehadiran Satgas Covid-19 memberikan kepastian sumber informasi yang valid bagi media dan semua pihak.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu daerah yang menginisiasi peran pemerintah dan perguruan tinggi untuk literasi digital dalam penanganan Covid-19. Program ini diinisiasi sejak hadirnya Keputusan Gubernur DIY Nomor 65/Kep/202 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana *Coronavirus Disease 2019* di DIY (Kustiningsih & Nurhadi, 2020). Pemerintah provinsi DIY meluncurkan website <https://corona.jogjaprovo.go.id> yang diikuti oleh semua kabupaten/kota di Yogyakarta. Universitas-universitas di Yogyakarta baik negeri maupun swasta seperti Universitas Gadjah Mada (UGM), Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dan Universitas Islam Indonesia (UII) juga membuat website untuk memberikan informasi bagi warga kampus maupun masyarakat umum walaupun masih lebih banyak untuk kalangan terdidik.

Bahkan desa Panggungharjo, Sewon, Bantul, menjadi salah satu desa yang memiliki website tentang Covid-19 dan memberikan dampak yang baik bagi meningkatnya literasi warga desa (Kustiningsih & Nurhadi, 2020). Desa ini pun membuat aplikasi khusus yang bermanfaat untuk pelaporan, permohonan informasi, komunikasi interaktif, hingga keluhan dan akan mendapatkan perhatian dan respons baik dari aparat desa maupun warga lainnya.

Upaya-upaya penanganan maupun pencegahan telah dilakukan secara optimal. Pemerintah, masyarakat, tokoh agama, media, organisasi masyarakat berbasis agama, dunia

usaha, perguruan tinggi, maupun umum telah melakukan upaya literasi digital. Literasi digital akan meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang bagaimana memanfaatkan media sosial dengan baik. Usaha ini harus terus dilakukan karena informasi hoaks sendiri terus berkembang dan beragam jenisnya. Oleh karenanya, setiap warga negara harus mendapatkan informasi tentang literasi digital sebagai upaya pencegahan agar tidak termakan infodemik dan disinformasi lainnya.

## G. Penutup

Media sosial menjadi salah satu sumber informasi yang penting selama pandemi. Namun pengetahuan individu dalam menggunakan media sosial menjadi prasyarat agar masyarakat tidak termakan disinformasi pandemi Covid-19. Perubahan yang cepat yang kita alami dalam pandemi Covid-19 perlu disikapi dengan adaptasi yang cepat pula, namun tetap cermat dalam menyaring informasi dan menyebarkannya. Kekhawatiran dan kecemasan merupakan hal yang lumrah selama pandemi, namun harus diatur agar masyarakat tidak terjebak pada informasi yang tidak benar tentang Covid-19.

Masyarakat harus memahami bahwa media sosial seperti dua sisi mata pedang. Hal ini karena sejatinya manusia berada dalam dunia (*being in the world, Da Sein*), namun memiliki ambilavensi karena berada dalam dunia maya (*being in the world-wide-web, Digi-Sein*) (Drianus, 2018). Masyarakat sendiri memiliki kemungkinan larut baik menjadi autentik (*to be*) sebagai warga masyarakat dan inautentik (*not to be*) atau menjadi diri yang lain. Sejatinya teknologi digital lebih dari sekedar teknologi karena kehadirannya telah menjadi bagian yang melekat dengan kehidupan kita, menghidupkan kehidupan kita, dan memperkaya pilihan-pilihan.

Seluruh elemen bangsa harus bahu membahu dan bergandengan tangan dalam mencegah, menangani dan melakukan tindak lanjut Covid-19, termasuk dalam penanganan disinformasi di media sosial. Media sosial bukanlah faktor tunggal penerimaan informasi yang tidak tepat, karena terkadang penerimaan masyarakat tentang informasi pandemi juga memiliki unsur kepercayaan terhadap pemerintah. Oleh karenanya, semua pihak harus menunjukkan kesungguhan dalam penanganan Covid-19. Sedangkan terkait media sosial, literasi digital yang dilakukan semua pemangku kepentingan menjadi upaya pencegahan yang harus dimaksimalkan. Begitu pula, penegakan hukum pelaku hoaks dan kontra narasi hoaks merupakan dua strategi yang tak terpisahkan dalam penanganan disinformasi pandemi di media sosial. Semoga masyarakat Indonesia makin terliterasi dengan baik dan Covid-19 segera berlalu.

## DAFTAR PUSTAKA

- APJII. (2020). *Laporan Survei Internet APJII 2019 – 2020*. Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, 2020, 1–146. <https://apji.or.id/survei>.
- Bruder, M., & Kunert, L. (2021). *The conspiracy hoax? Testing key hypotheses about the correlates of generic beliefs in conspiracy theories during the COVID-19 pandemic*. *International Journal of Psychology*, 2020. <https://doi.org/10.1002/ijop.12769>.
- CSIS. (2021). *Persepsi, Efektivitas, dan Kepatuhan Masyarakat dalam Penerapan Protokol Kesehatan: Periode Survei 13-18 Januari 2021*.
- CSRC UIN Jakarta. (2020). *Solidaritas dan Harmoni di Tengah Pandemi Covid-19*.
- Drianus, O. (2018). *Manusia di Era Kebudayaan Digital: Interpretasi Ontologis Martin Heidegger*. *Mawa'izh: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Sosial Kemanusiaan*, 9(2), 178–199. <https://doi.org/10.32923/maw.v9i2.784>.
- Edy, G. (2020). *Telaah Kritis Kejahatan Penyebaran Hoaks Saat Pandemi COVID-19*. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(2), 304–317.
- Fauzi, R. (2017). *Perubahan budaya komunikasi pada pengguna*. *JIKE*, 1(1).
- Hakim, A. L. (2021). *Promosi Kesehatan Melalui Media Sosial dan Kebijakan*. *2-Trik: Tunas-Tunas Riset Kesehatan*, 11 Nomor 1(Februari), 12–16.
- Hootsuite, & “*We Are Social*.” (2021). *Digital 2021*. *Global Digital Insights*, 103.
- Indikator. (2020). *Temuan Survei Nasional: Persepsi Publik Terhadap*

*Penanganan Covid-19, Kinerja Ekonomi dan Implikasi Politiknya.*

Juditha, C. (2018). *Interaksi Komunikasi Hoax di Media Sosial Serta Antisipasinya*. *Journal Pekommas*, 3(1), 31–34.

Junaedi, F., & Sukmono, F. G. (2020). *University Students Behavior in Searching and Disseminating COVID-19 Online Information*. *Jurnal A S P I K O M* , 5 ( 2 ) , 2 4 5 .  
<https://doi.org/10.24329/aspikom.v5i2.767>

Katharina, R. (2018). *Peran E-Government Dalam Penanggulangan Hoax*. *Info Singkat*, X(20/II/Puslit/Oktober/218).  
[www.inet.detik.com](http://www.inet.detik.com).

Kustiningsih, W., & Nurhadi. (2020). *Penguatan Modal Sosial dalam Mitigasi Covid-19. In Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Gadjah Mada University Press.

Lembaga Survei Indonesia, L. (2021). *Rilis Hasil Survei Nasional: Sikap Publik Terhadap Vaksin dan Program Vaksin Pemerintah*.

Mas'udi, W., & Poppy S Winanti. (2021). *New normal: Perubahan Sosial Ekonomi dan Politik Akibat Covid 19*. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), Gadjah Mada University Press (Vol. 2021, Issue 107). Gadjah. <https://doi.org/10.4067/S0717-69962021000100010>.

Mas'udi, W., & Winanti, P. S. (Eds.). (2020). *Tata Kelola Penanganan Covid-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Gadjah Mada University Press.

Mastel, M. T. I. (2019). *Hasil Survey Wabah Hoax Nasional 2019. Website Masyarakat Telematika Indonesia*, 35.  
<https://mastel.id/hasil-survey-wabah-hoax-nasional-2019/>.

Muhammadiyah, M. (2018). *Fikih Informasi (Fikih al-I'lam)* Bahan Munas Tarjih XXX.



- Mulyana, D. (2019). *Ilmu Komunikasi Suatu Pengantar* (Cetakan Ke). PT Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, R. (2014). *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Kencana.
- Nasrullah, R. (2020). *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi* (Cetakan Ke). PT Remaja Rosdakarya Bandung.
- Nureni, R., Pramiyanti, A., & Putri, I. P. (2013). *Perilaku Remaja Dalam Menggunakan Media Baru: Pemetaan Habit Media Baru Remaja Daerah Sub Urban Kota Bandung (Kabupaten Bandung)*. *Jurnal Sosioteknologi*, 12(30), 461–474. <https://doi.org/10.5614/sostek.itbj.12.30.1>
- Puslitbang Keagamaan Kemenag. (2021). *Respon Umat Beragama atas Rencana Vaksinasi Covid 19: Survei “Pengetahuan, Sikap, dan Tindakan Umat Beragama terkait Covid 19, Vaksin, dan Vaksinasi”* (Issue 8 Januari).
- Rahman, A. (2020). *Keberterimaan Istilah-Istilah Di Masa Pandemi Covid 19*. *BIDAR*, 10(Nomor2 Desember), 68–82.
- Ruhana, A. S., & Burhani, H. (2020). *New Normal Kehidupan Beragama di Masa Pandemi Covid-19* (Issue 6).
- Sampurno, M. B. T., Kusumandyoko, T. C., & Islam, M. A. (2020). *Budaya Media Sosial, Edukasi Masyarakat, dan Pandemi COVID-19*. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-I*, 7(5). <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v7i5.15210>.
- Shirky, C. (2008). *Here Comes Everybody*. Penguin.
- Siswoko, K. H. (2017). *Kebijakan Pemerintah Menangkal Penyebaran Berita Palsu atau ‘Hoax.’* *Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, Dan Seni*, 1(1), 13. <https://doi.org/10.24912/jmishumsen.v1i1.330>

- SMRC. (2020). *Kondisi Ekonomi Masa Covid 19 dan Respons Kebijakan* (Issue 59).
- Tsao, S. F., Chen, H., Tisseverasinghe, T., Yang, Y., Li, L., & Butt, Z. A. (2021). *What social media told us in the time of COVID-19: a scoping review. The Lancet Digital Health*, 3(3), e175–e194. [https://doi.org/10.1016/S2589-7500\(20\)30315-0](https://doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30315-0).
- van Dijk, J. (2013). *The Culture of Connectivity: A Critical History of Social Media*. Oxford University Press.
- Widaningrung, A., & Mas'udi, W. (2020). *Dinamika Respons Pemerintah Nasional: Krisis Kebijakan Penanganan Covid 19. In Tata Kelola Penanganan Covid 19 di Indonesia: Kajian Awal*. Gadjah Mada University Press.
- Winanti, P. S., & Putri, P. B. D. T. E. (2020). *Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani Covid 19. In Tata Kelola Penanganan Covid 19 di Indonesia: Kajian Awal*. Gadjah Mada University Press.
- Wirawan, I. K. A., Dermawan, D. M., & Mudra, I. W. (2021). *Analisis Pertarungan Wacana Video Pendek Covid-19 di Media Sosial. Mudra Jurnal Seni Budaya*, 36(1), 75–80. <https://doi.org/10.31091/mudra.v36i1.1105>
- Zaenudin, A. (2018). *Clickbait, Jebakan Judul Berita yang Menipu Pembaca*. Tirto.Id. <https://tirto.id/clickbait-jebakan-judul-berita-yang-menipu-pembaca-cF7b>

### **Sumber Online:**

- Aditya Jaya Iswara. (10 Mei 2021). *Mandi Massal di Sungai Gangga Jadi "Super Spreader" Tsunami Covid-19 India*. Kompas. <https://www.kompas.com/global/read/2021/05/10/173138870/mandi-massal-di-sungai-gangga-jadi-super-spreader-tsunami-covid-19-india?page=all>

Anadolu Agency. (24 Juni 2021)  
<http://www.aa.com.tr/id/nasional/situasi-covid-19-di-indonesia-saat-ini-dekati-puncak-pandemi-pada-awal-2021/2284202>

Rahajeng KH. (24 Juni 2021). , CNBC Indonesia. *Kasus RI Terus Cetak Rekor Covid 19 Apakah Sudah Puncak?*  
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210624094940-4-255533/kasus-ri-terus-cetak-rekor-covid-19-apaakah-sudah-puncak>

Yudha Maulana.(5 Januari 2021). *Satu Bulan Zona Merah, Depok dan Karawang Siaga 1*. detikNews. [https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5321580/satu-bulan-zona-merah-depok-dan-karawang-siaga-1?\\_ga=2.58370730.1687824505.1632406795-719608889.1618988200](https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5321580/satu-bulan-zona-merah-depok-dan-karawang-siaga-1?_ga=2.58370730.1687824505.1632406795-719608889.1618988200);

Ahmad Zuhad. (22 Juli 2021). *Beragam Istilah Pembatasan Sosial, dari PSBB, New Normal, Hingga PPKM Berlevel*. Kompas.  
<https://www.kompas.tv/article/194796/beragam-istilah-pembatasan-sosial-dari-psbb-new-normal-hingga-ppkm-berlevel?page=2> ;  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210722070140-20-670613/gonta-ganti-istilah-pembatasan-kegiatan-masyarakat>; <http://mh.uma.ac.id/2021/07/istilah-pembatasan-masyarakat-selama-pandemi-covid-19/>;

Hendro D. Situmorang. (27 Juli 2021). Berita Satu. *Reisa: 50.000 Hoax tentang Vaksin Beredar Selama Pandemi*.  
<https://www.beritasatu.com/kesehatan/806255/reisa-50000-hoax-tentang-vaksin-beredar-selama-pandemi>

Khadijah Nur Azizah. (28 Juli 2021). Detik Health. *50 RibU Hoax Seputar Pandemi, dr Reisa: Indonesia Negara Beribu Mitos*.  
<https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-5659520/50->

ribu-hoax-seputar-pandemi-dr-reisa-indonesia-negara-beribu-mitos

Aditya Pradana Putra. (12 Maret 2021). *Ada 1.470 Hoax Covid-19 Hingga Maret, Terbanyak di Facebook*. CNN Indonesia. <https://www.cnnindonesia.com/teknologi/20210312163857-185-616809/ada-1470-hoax-covid-19-hingga-maret-terbanyak-di-facebook>

Jingga Irawan. (26 Agustus 2021). *YouTube Hapus 1 Juta Video Mengandung Informasi Salah tentang Covid-19*. MainMain.ID. <https://www.mainmain.id/r/13188/youtube-hapus-1-juta-video-mengandung-informasi-salah-tentang-covid-19>

Jati Sasongko. (12 Januari 2021). *Waspadai 3 Jenis Hoax Ini di Masa Pandemi Covid-19*. Sonora.ID. <https://www.sonora.id/read/422507312/waspadai-3-jenis-hoax-ini-di-masa-pandemi-covid-19>

Hoax Buster. (22 Januari 2021). *[SALAH] “VAKSINASI PRESIDEN HARUS DIULANG DAN HATI-HATI DENGAN VAKSINASI”*. Covid19.go.id. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-vaksinasi-presiden-harus-diulang-dan-hati-hati-dengan-vaksinasi>

Vitorio Mantaelan. (15 Juni 2021). *Klaster Covid-19 akibat Arisan di Kota Bekasi Makan Korban, Seorang Lansia Meninggal*. Kompas. <https://megapolitan.kompas.com/read/2021/06/15/08353091/klaster-covid-19-akibat-arisan-di-kota-bekasi-makan-korban-seorang-lansia?page=all>

Priyo Setyawan. (24 Juni 2021). *Klaster Ziarah Seyegan Bertambah Jadi 74 Orang Positif Covid-19*. OkeZone. <https://nasional.okezone.com/read/2021/06/24/337/2430423/klaster-ziarah-seyegan-bertambah-jadi-74-orang-positif-covid-19>

Dea Davina. (8 Juli 2021). *Tak Pakai Masker Dobel, Penumpang Tidak Boleh Naik KRL!*. Kompas. <https://www.kompas.tv/article/190804/tak-pakai-masker-dobel-penumpang-tidak-boleh-naik-krl>

Suara.Com. (17 Agustus 2021). *Belum Vaksin, Ratusan Calon Pengunjung Gagal Masuk Mal*. <https://www.suara.com/lifestyle/2021/08/17/222354/belum-vaksin-ratusan-calon-pengunjung-gagal-masuk-mal>

Mahar Prastiwi. (25 Maret 2021). *23 Berita Hoax Seputar Covid-19 dan Penjelasan Pakar Pulmonologi UGM*. Kompas. <https://www.kompas.com/edu/read/2021/03/25/080000171/23-berita-hoax-seputar-covid-19-dan-penjelasan-pakar-pulmonologi-ugm?page=all#page2;%20https://covid19.go.id/p/hoax-buster;>

Kominfo. (12 Desember 2021). [https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan_isu_hoaks)

Suara.Com. (12 Desember 2021). <https://www.suara.com/tag/berita-hoaks-virus-corona>

Maria Fatima Bona. (1 Juli 2021). *IDAI: Kematian Anak Akibat Covid-19, Indonesia Tertinggi se-Asia Pasifik*. Berita Satu. <https://www.beritasatu.com/kesehatan/794459/idai-kematian-anak-akibat-covid19-indonesia-tertinggi-seasia-pasifik>

Tiara Aliya Azzahra. (26 Sep 2021). *IDAI: 37 Ribu Anak Terinfeksi pada Gelombang Pertama Covid-19*. Baca artikel detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5741157/idai-37-ribu-anak-terinfeksi-pada-gelombang-pertama-covid-19>.

Johnson Cornell SC Johnson College of Business. (21 Juni

2021). *Covid-19: Satu dari delapan pasien di Indonesia adalah anak-anak, orang tua dianggap 'membuat anak berisiko'*. BBC News Indonesia. <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-57546436>.

Covid.Go.ID. (30 September 2021). *Awas Hoaks: Imbauan Menkes terkait Larangan Bepergian dan Berkumpul karena Adanya Varian Baru COVID-19*. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/awas-hoaks-imbau-menkes-terkait-larangan-bepergian-dan-berkumpul-karena-adanya-varian-baru-covid-19>

Covid.Go.ID. (14 May 2021). [SALAH] *Video "Presiden Jokowi Pulang Kampung, Dia yg larang, dia yg melanggar."* <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-video-presiden-jokowi-pulang-kampung-dia-yg-larang-dia-yg-melanggar>

Covid.Go.ID. (11 Juni 2021). [SALAH] *Video "Eric Tohir Sangat Terbuka Menjelaskan Tentang Chip yang Ada dalam Vaksin Covid-19"*. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-video-eric-tohir-sangat-terbuka-menjelaskan-tentang-chip-yang-ada-dalam-vaksin-covid-19>

Covid.Go.ID. (14 Aug 2021). *Awas Hoaks Vaksin Astrazeneca, Pfizer, dan Moderna Berafiliasi dengan Bluetooth kecuali Sinovac*. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/awas-hoaks-vaksin-astrazeneca-pfizer-dan-moderna-berafiliasi-dengan-bluetooth-kecuali-sinovac>

Covid.Go.ID. (25 Sep 2021). *Awas Hoaks: Tukul Sakit Pendarahan Otak karena Vaksin*. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/awas-hoaks-tukul-sakit-pendarahan-otak-karena-vaksin>

Covid.Go.ID. (25 Januari 2021). [SALAH] *Karena Disuntik Vaksin, Dokter di Palembang Meninggal*. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-karena-disuntik-vaksin-dokter-di-palembang-meninggal>

- Covid.Go.ID. (24 April 2021). *[SALAH] Ketua DPRD Mimika Meninggal Akibat Vaksin*. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/salah-ketua-dprd-mimika-meninggal-akibat-vaksin>
- Covid.Go.ID. (21 Juli 2021). *Awas Hoaks: 5 Orang Serumah Meninggal Bersama Setelah Divaksin*. <https://covid19.go.id/p/hoax-buster/awas-hoaks-5-orang-serumah-meninggal-bersama-setelah-divaksin>
- Covid.Go.ID. (22 Januari 2021). *[Salah] “Vaksinasi Presiden Harus Diulang Dan Hati-Hati Dengan Vaksinasi”*. <https://covid19.go.id/p/berita/salah-vaksinasi-presiden-harus-diulang-dan-hati-hati-dengan-vaksinasi>
- Fitri Haryanti Harsono. (19 Januari 2021). Liputan 6. *Dokter Cirebon Minta Jokowi Vaksinasi COVID-19 Ulang, IDI: Itu Sudah Benar*. <https://www.liputan6.com/health/read/4460930/dokter-cirebon-minta-jokowi-vaksinasi-covid-19-ulang-idi-itu-sudah-benar>
- Tim Cek Fakta.(14 Januari 2021). *[HOAKS] Vaksin yang Dipakai Jokowi Disebut Tidak Asli karena Harus Menggunakan Alat Suntik*. [K o m p a s . c o m .  
https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/14/122100065/hoaks-vaksin-yang-dipakai-jokowi-disebut-tidak-asli-karena-harus?page=all](https://www.kompas.com/tren/read/2021/01/14/122100065/hoaks-vaksin-yang-dipakai-jokowi-disebut-tidak-asli-karena-harus?page=all)
- Adi Syafitrah.(17 Januari 2021). *[SALAH] “Cairan nya Masih Utuh Udah di Cabut Aaja Mao Bohongin Rakyat Hadehhh”*. [t u r n b a c k h o a x . i d .  
https://turnbackhoaks.id/2021/01/17/salah-cairan-nya-masih-utuh-udah-di-cabut-aaaja-mao-bohongin-rakyat-hadehhh/](https://turnbackhoaks.id/2021/01/17/salah-cairan-nya-masih-utuh-udah-di-cabut-aaaja-mao-bohongin-rakyat-hadehhh/); <https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/wkBWrX4K-cairan-vaksin-tidak-masuk-ke-tubuh-jokowi-ini-faktanya>.

(23 September 2021). *MUI Yakinkan Masyarakat untuk Mau Melakukan Vaksinasi Covid-19*. muidigital. <https://mui.or.id/berita/31682/mui-yakinkan-masyarakat-untuk-mau-melakukan-vaksinasi-covid-19/>

Rokom. (12 Agustus 2021). *Studi Terbaru: Vaksin COVID-19 Efektif Mencegah Perawatan dan Kematian. Sehat Negeriku Sehatlah Bangsa*. <https://sehatnegeriku.kemkes.go.id/baca/rilis-media/20210812/4238277/studi-terbaru-vaksin-covid-19-efektif-mencegah-perawatan-dan-kematian/>

Dwi Hadya Jayani.(08 September 2021). *Kemenkes: Vaksin Efektif Turunkan Risiko Kematian Covid-19*. Data books. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/08/ke-menkes-vaksin-efektif-turunkan-risiko-kematian-covid-19>

Iqbal Muhtarom.(04 Juli 2021).*Rumah Sakit Jawab Soal Hoaks Pasien Dicovidkan yang Banyak Beredar di Grup WA*.Tempo.co.<https://nasional.tempo.co/read/1479645/rumah-sakit-jawab-soal-hoaks-pasien-dicovidkan-yang-banyak-beredar-di-grup-wa/full&view=ok>

(08 Juli 2021). *[HOAKS] Masuk Rumah Sakit Langsung Divonis Covid-19 dan Dibunuh*.Kementerian Kominfo RI.

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/35550/hoaks-masuk-rumah-sakit-langsung-divonis-covid-19-dan-dibunuh/0/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/detail/35550/hoaks-masuk-rumah-sakit-langsung-divonis-covid-19-dan-dibunuh/0/laporan_isu_hoaks)

CNN Indonesia. (27 Agustus 2021). *Minta Maaf, Pengambil Paksa Jenazah Corona Sumbar Dibebaskan*.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200827130403-20-539922/minta-maaf-pengambil-paksa-jenazah-corona-sumbar-dibebaskan>

Eris Utomo. (14 Oktober 2021). *Ambil Paksa Jenazah COVID-19,*



*Aktivist Banyuwangi Ditahan Polisi*. Sindo News.

<https://daerah.sindonews.com/read/195460/704/ambil-paksa-jenazah-covid-19-aktivis-banyuwangi-ditahan-polisi-1602609026>

Nafiy Sul Qodar. (11 Juni 2020). *Jerat Pidana Pengambil Paksa Jenazah Corona*. liputan6. <https://www.liputan6.com/news/read/4275795/jerat-pidana-pengambil-paksa-jenazah-corona>

Danny Adriadhi Utama. (27 Desember 2020). *14 Pelaku Perusakan RSUD Brebes Saat Ambil Paksa Jenazah Covid-19 Diamankan Polisi*. merdeka.com. <https://www.merdeka.com/peristiwa/14-pelaku-perusakan-rsud-brebes-saat-ambil-paksa-jenazah-covid-19-diamankan-polisi.html>

Rakhmad Hidayatulloh Permana. (17 Juli 2021). *'Ayah Saya Meninggal Usai Percaya Hoax dr Lois'*. detiknews. <https://news.detik.com/berita/d-5646942/ayah-saya-meninggal-usai-percaya-hoax-dr-lois>.

Isnaya Helmi. (20 Juli 2021). *Kabareskrim Bakal Tindak Tegas Penyebar Hoax Penanganan Covid-19*. Kompas.tv. <https://www.kompas.tv/article/194323/kabareskrim-bakal-tindak-tegas-penyebar-hoaks-penanganan-covid-19>

Agus Wibowo. (18 April 2020). *Kominfo: Penyebar Hoaks COVID-19 Diancam Sanksi Kurungan dan Denda 1 Miliar*. Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. [https://kominfo.go.id/content/detail/25923/kominfo-penyebar-hoaks-covid-19-diancam-sanksi-kurungan-dan-denda-1-miliar/0/virus\\_corona](https://kominfo.go.id/content/detail/25923/kominfo-penyebar-hoaks-covid-19-diancam-sanksi-kurungan-dan-denda-1-miliar/0/virus_corona)

Kupastuntas.co. <https://kupastuntas.co/2020/03/25/hati-hati-sebar-berita-sudah-4-orang-penyebar-hoaks-corona-ditangkap>

polda-lampung

Konten Media Partner.(27 April 2020). *Sebar Hoaks COVID-19, Seorang Pengguna Facebook di Gorontalo Ditangkap Polisi.*

Banthayo.id.<https://kumparan.com/banthayoid/sebar-hoaks-covid-19-seorang-pengguna-facebook-di-gorontalo-ditangkap-polisi-1tIzhxXrWhf>

Sarjono.(27 Juni 2021). *Polisi tangkap pria penyebar hoaks COVID-19 di Kendari.*Antaranews.com.<https://www.antaranews.com/berita/2234178/polisi-tangkap-pria-penyebar-hoaks-covid-19-di-kendari>

Siti Ruqoyah, Eduward Ambarita. (04 April 2020). *75 Orang Ditangkap Gara-gara Sebar Hoax Corona.* viva.co.id

[https://www.viva.co.id/berita/nasional/1270784-75-orang-ditangkap-gara-gara-sebar-hoaks-corona?page=all&utm\\_medium=all-page](https://www.viva.co.id/berita/nasional/1270784-75-orang-ditangkap-gara-gara-sebar-hoaks-corona?page=all&utm_medium=all-page)

Sholahuddin Al Ayyubi. (24 November 2020). *Bareskrim Tahan 17 dari 104 Tersangka Penyebar Hoaks Covid-19.*

Bisnis.com.<https://kabar24.bisnis.com/read/20201124/16/1322024/bareskrim-tahan-17-dari-104-tersangka-penyebar-hoaks-covid-19>

Nafiysul Qodar.(11 Juni 2020). *Jerat Pidana Pengambil Paksa Jenazah Corona*. liputan6.<https://www.liputan6.com/news/read/4275795/jerat-pidana-pengambil-paksa-jenazah-corona>;

Sigiranus Marutho Bere.(22 Juli 2021). *Kapolda NTT: Tangkap dan Proses Hukum Pengambil Paksa Jenazah Covid-19.*

Kompas.com.<https://regional.kompas.com/read/2021/07/22/160705878/kapolda-ntt-tangkap-dan-proses-hukum->

p e n g a m b i l - p a k s a - j e n a z a h - c o v i d - 1 9 ? p a g e = a l l ; h t t p s : / / n e w s . d e t i k . c o m / b e r i t a / d - 5 0 7 9 4 8 5 / b u n t u t - p a n j a n g - p e n g a m b i l a n - p a k s a - j e n a z a h - p a s i e n - c o r o n a - j e r a t - p u l u h a n - t e r s a n g k a .

Eris Utomo.(14 Oktober 2020).*Ambil Paksa Jenazah COVID-19, Aktivis Banyuwangi Ditahan Polisi.*

Sindonews.com.<https://daerah.sindonews.com/read/195460/704/ambil-paksa-jenazah-covid-19-aktivis-banyuwangi-ditahan-polisi-1602609026>

CNN (12 Agustus 2020). *Kronologi Kasus 'IDI Kacung WHO' Berujung Jerinx Tersangka.* CNN Indonesia.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200812165843-12-535021/kronologi-kasus-idi-kacung-who-berujung-jerinx-tersangka>

Felix Nathaniel.(24 Agustus 2020).*Salah Jerinx Bukan Mencemarkan Nama Baik, tapi Membahayakan Nyawa.* tirto.id .<https://tirto.id/salah-jerinx-bukan-mencemarkan-nama-baik-tapi-membahayakan-nyawa-fYlr>

Antara, Marieska Harya Virdhani.(15 Agustus 2021). *Akhirnya Disuntik Vaksin, Jerinx SID: Tidak Usah Takut!.* JawaPos.com.

<https://www.jawapos.com/nasional/hukum-kriminal/15/08/2021/akhirnya-disuntik-vaksin-jerinx-sid-tidak-usah-takut/>

Tim detikcom.(24 Juni 2021). *Habib Rizieq Divonis 4 Tahun Penjara di Kasus Swab RS Ummi.* Detiknews.<https://news.detik.com/berita/d-5618159/habib-rizieq-divonis-4-tahun-penjara-di-kasus-swab-rs-ummi>

Kadek Melda Luxiana.(26 Desember 2020). *Bareskrim: Habib Rizieq Tersangka Tunggai Kasus Kerumunan Megamendung.* Detiknews.

<https://news.detik.com/berita/d-5309960/bareskrim-habib-rizieq-tersangka-tunggal-kasus-kerumunan-megamendung>

Tim detikcom.(04 Agustus 2021).*Iming-iming Donasi Rp 2 T Akidi Tio Ternyata Tak Ada di Rekening*. Detiknews.<https://news.detik.com/berita/d-5668602/iming-iming-donasi-rp-2-t-akidi-tio-ternyata-tak-ada-di-rekening>

Audrey Santoso.(25 Agustus 2021).*Kapolda Sumsel yang Heboh soal Donasi Akidi Tio Diganti!*. Detiknews .<https://news.detik.com/berita/d-5696379/kapolda-sumsel-yang-heboh-soal-donasi-akidi-tio-diganti>

Keminfo. <https://turnbackhoaks.id/>

Mafindo. <https://www.mafindo.or.id/>

Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia.(3 Mei 2017).*Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor : 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial*.

M u i . o r . i d . <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/Fatwa-No.24-Tahun-2017-Tentang-Hukum-dan-Pedoman-Bermuamalah-Melalui-Media-Sosial.pdf>

Dewi Nurita.(18 November 2020). *Jokowi Minta Muhammadiyah Bantu Pemerintah Tangkal Hoaks Vaksin Covid-19*. Tempo.co.

<https://nasional.tempo.co/read/1406505/jokowi-minta-muhammadiyah-bantu-pemerintah-tangkal-hoaks-vaksin-covid-19>

Abdullah Alawi. (1 Desember 2016). *LBM PBNU Haramkan Membuat dan Menyebarkan Berita Hoax*. NU Online.

<https://www.nu.or.id/post/read/73411/lbm-pbnu-haramkan-membuat-dan-menyebarkan-berita-hoaks>

Binti Mufarida (12 Agustus 2020). Kominfo Catat 1.028 Hoaks Tersebar Terkait Covid-19. okenews.

<https://nasional.okezone.com/read/2020/08/12/337/2261100/kominfo-catat-1-028-hoaks-tersebar-terkait-covid-19>

Pratiwi Agustini. (3 May 2021). *Kominfo Catat 1.733 Hoaks Covid-19 dan Vaksin*. Ditjen Aptika. <https://aptika.kominfo.go.id/2021/05/kominfo-catat-1-733-hoaks-covid-19-dan-vaksin/>

Intan Rakhmayanti Dewi. (18 September 2021). *Pengajuan Takedown Hoax Covid-19 Tertinggi Ditempati Facebook*.

Oketechno. <https://techno.okezone.com/read/2021/09/18/57/2473302/pengajuan-takedown-hoaks-covid-19-tertinggi-ditempati-facebook>

Adyaksa Vidi. (30 Agustus 2021). *Youtube Hapus 1 Juta Video Hoaks Seputar Covid-19 Sejak Februari 2020*. Liputan6.com.

<https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4645036/youtube-hapus-1-juta-video-hoaks-seputar-covid-19-sejak-februari-2020>

Thea Fathanah Arbar. (30 September 2021). *You Tube Hapus 130.000 Video Anti-Vaksin dan Hoaks Covid*. CNBC Indonesia.

<https://www.cnbcindonesia.com/news/20210930175757-4-280508/youtube-hapus-130000-video-anti-vaksin-dan-hoaks-covid>

Kominfo. (15 November 2021).

[https://www.kominfo.go.id/content/detail/15941/ini-cara-mudah-kenali-hoaks-di-media-sosial/0/berita\\_satker;](https://www.kominfo.go.id/content/detail/15941/ini-cara-mudah-kenali-hoaks-di-media-sosial/0/berita_satker)

Humaira Aliya. (6 Desember 2021). *Bisa Berdampak Buruk pada Kariermu, Ketahui Seluk-beluk Hoax*. Glints. <https://glints.com/id/lowongan/apa-itu-hoax-adalah/#.YeTLeP5Bw2x>



## *Bab 5*

### **KESIMPULAN DAN PENUTUP**

*Oleh: Irfan Abubakar dan Idris Hemay*

Sejak kemunculannya pada awal 2020, Pandemi Covid-19 telah membawa dampak multidimensi bagi masyarakat Indonesia. Kompleksnya persoalan yang diakibatkan pandemi Covid-19 telah menyadarkan banyak pihak bahwa penanganan pandemi tidak akan berhasil tanpa dukungan solidaritas sosial di tengah masyarakat, baik dalam bentuk kepercayaan horizontal maupun kepercayaan vertikal. Sementara kepercayaan horizontal mengacu kepada hubungan saling membantu antara individu dalam masyarakat, kepercayaan vertikal merujuk kepada kemauan dan kepatuhan masyarakat untuk menjalankan kebijakan penanganan pandemi oleh pemerintah.

Hasil survei dan pengamatan oleh peneliti CSRC UIN Jakarta selama pertengahan 2020 hingga pertengahan 2021 menunjukkan bahwa solidaritas sosial masyarakat Indonesia masih cukup kuat, dan pada tingkat tertentu telah ikut berkontribusi dalam upaya penanganan pandemi oleh pemerintah. Masih kokohnya nilai keagamaan dan komunal, adanya modal dukungan politik elektoral, serta upaya kolaboratif dalam pengendalian hoaks dan disinformasi menjadi faktor-faktor penting yang berkontribusi kepada terpeliharanya solidaritas sosial selama pandemi Covid-19.

Pada tingkat masyarakat, solidaritas sosial dibuktikan dengan aktivitas kedermawanan sosial yang melibatkan individu warga di

tingkat komunitas lokal dan lembaga-lembaga keagamaan dan organisasi-organisasi filantropi di tingkat nasional. Pada tingkat kewargaan, kedermawanan sosial berlangsung tanpa sekat-sekat identitas, dimana warga memberi bantuan kepada warga lain tanpa melihat agama, suku atau pilihan politik. Fakta ini menunjukkan bukan saja solidaritas sosial yang terpelihara selama pandemi, melainkan juga harmoni keagamaan. Namun perlu dicatat bahwa kondisi umum ini tidak serta merta menafikan kenyataan intoleransi dan kekerasan atas nama agama di tengah masyarakat masih tetap laten.

Sementara itu, kepercayaan kepada pemerintah dalam penanganan pandemi juga cukup tinggi. Beberapa hasil survei menunjukkan hal itu. Salah satunya yang ditunjukkan oleh survei CSRC UIN Jakarta (2020) yang menilai kepercayaan publik kepada pemerintah pusat dan daerah dalam penanganan pandemi. Survei ini menemukan tingkat kepercayaan masyarakat kepada lembaga-lembaga pemerintah rata-rata di atas 70%. Survei juga menemukan bahwa masyarakat umumnya taat menjalankan proses: memakai masker, menjaga jarak fisik, dan mencuci tangan. Ketaatan juga terjadi dalam konteks kegiatan keagamaan. Hampir 90% warga yang mengaku tetap beribadah di rumah-rumah ibadah selama pandemi menyatakan tetap disiplin menjalankan proses.

Nilai-nilai komunal yang bersumber dari ajaran agama dan kebudayaan masih memainkan peran yang dominan dalam mendorong sikap kedermawanan masyarakat Indonesia. Seperti survei-survei kedermawanan sebelumnya, survei yang diadakan selama masa pandemi tahun 2020 juga menunjukkan masih determinannya faktor keagamaan. Revolusi komunikasi yang terjadi super cepat dewasa ini tidak lantas mengurangi semangat komunal masyarakat dalam menyatakan solidaritas sosialnya. Di tengah krisis pandemi Covid-19, yang harus diakui telah melemahkan



kemampuan ekonomi masyarakat, semangat kedermawanan yang didorong oleh motivasi keagamaan tidak surut. Bahkan ketika pandemi membatasi mobilitas fisik sekalipun, aktivitas kedermawanan tidak lantas terganggu. Kegiatan saling membantu di antara warga tetap berjalan seperti biasa namun dengan penyesuaian-penyesuaian. Misalnya, warga membantu tetangga yang terpapar virus tanpa mengharuskan mereka berjumpa secara fisik. Pada tingkat kelembagaan sosial, divisi-divisi khusus yang dibentuk oleh Muhammadiyah dan NU, misalnya, telah berhasil mengelola sejumlah besar dana bantuan dan menyalurkannya kepada segmen-segmen masyarakat yang paling membutuhkan.

Kuatnya nilai-nilai komunal yang mendasari solidaritas sosial juga ditunjukkan oleh fakta bahwa masyarakat lebih menaruh kepercayaan kepada institusi pemerintahan yang dekat dengan lingkungan mereka. Semakin dekat institusi dengan warga, maka semakin tinggi tingkat kepercayaan terhadap institusi tersebut. Di tengah komunikasi digital yang semakin menggejala dewasa ini komunikasi *face to face* masih berpengaruh dan belum sepenuhnya tergantikan oleh komunikasi virtual.

Selain faktor nilai komunal dan keagamaan, dukungan politik elektoral juga ikut berpengaruh dalam perwujudan solidaritas sosial selama pandemi. Survei CSRC UIN Jakarta 2020 menunjukkan ada korelasi antara dukungan politik selama Pilpres 2019 dengan kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas pemerintah dalam penanggulangan Covid-19. Ditemukan bahwa hampir seluruh warga mengetahui bahwa pemerintah menyalurkan bantuan tunai dan non-tunai kepada masyarakat, dan dari jumlah tersebut mayoritas (66%) menilai bahwa bantuan tersebut efektif. Survei ini menunjukkan bahwa masyarakat yang memilih Pasangan Jokowi-Ma'ruf pada Pilpres 2019 cenderung lebih percaya dengan efektifitas bantuan pemerintah daripada masyarakat yang memilih Pasangan

Prabowo-Sandi. Korelasi ini tidak hanya ditemukan dengan kepercayaan kepada pemerintah, tapi juga dengan sikap warga terhadap prokes dan kebijakan pembatasan selama pandemi. Temuan ini sendiri mengkonfirmasi beberapa hasil penelitian sebelumnya, seperti riset Muhtadi dan Soderborg (2020).

Pengendalian hoaks dan disinformasi seputar Covid-19 dan penanganannya pada tingkat tertentu telah ikut berkontribusi dalam mencegah terjadinya *distrust* sosial dan politik selama pandemi. Sejatinya kepercayaan politik dan sosial adalah modal dasar sebuah bangsa dalam memenangkan pertarungan melawan musuh bersama, Covid-19, yang telah menjadi pandemi global. Harus diakui bahwa hoaks dan disinformasi yang tersebar melalui jaringan medsos telah begitu mengkhawatirkan sehingga ditakutkan akan menyebabkan defisit kepercayaan kepada pemerintah dan menggerogoti pilar-pilar kohesi sosial. Namun, berbagai upaya kolaboratif antara pemerintah, media, masyarakat sipil, serta ormas keagamaan, telah mampu mengurangi kalau bukan menetralsir dampak negatif hoaks dan disinformasi tersebut. Dalam konteks teknologi komunikasi, maraknya hoaks dan disinformasi merupakan akibat bawaan dari sistem komunikasi digital itu sendiri. Isu ini tidak hanya bisa diatasi secara moral belaka, tapi utamanya perlu didekati melalui mekanisme sistem komunikasi itu sendiri. Karena itu, para penyedia aplikasi medsos, seperti WhatsApp, Facebook, Twitter, Youtube, dan sebagainya, harus terus dilibatkan dalam rangka pencegahan hoaks dan disinformasi sebelum pemerintah dan masyarakat memainkan bagian mereka. Di sisi lain upaya mengatasi hoaks dan disinformasi tidak akan berhasil tanpa peningkatan kemampuan anak bangsa dalam mengadaptasi perkembangan teknologi digital secara berkesinambungan.

Studi dalam buku ini bagaimanapun telah membantu perluasan pemahaman kita mengenai hubungan solidaritas sosial dan

penanganan bencana pandemi Covid-19. Terutama karena bencana pandemi Covid-19 bukan hanya bersifat global dan berdampak luas, melainkan penanganannya pun menuntut berbagai adaptasi sosial yang sama sekali baru bagi bangsa Indonesia modern. Misalnya, adaptasi sosial yang mengambil bentuk jaga jarak sosial dan pembatasan mobilitas masyarakat, suatu kebijakan yang jelas berdampak pada banyak sektor kehidupan, utamanya sektor ekonomi dan pendidikan, juga agama dan kebudayaan. Konsep solidaritas yang dipahami selama ini bertumpu pada pertemuan tatap muka. Kepercayaan sosial dan politik diyakini hanya akan tertempa dalam konteks interaksi sosial yang melibatkan intensitas komunikasi dan kerjasama tatap muka. Namun, studi solidaritas sosial selama pandemi menginformasikan bahwa kepercayaan sosial dan politik tetap dapat dijaga meskipun minim pertemuan secara fisik. Hal itu dikarenakan adanya kemampuan masyarakat beradaptasi dengan keadaan dan kesempatan serta peluang yang tersedia. Selain itu, studi ini menginformasikan bahwa nilai-nilai agama dan kekeluargaan cukup dapat diandalkan dalam mencegah *distrust* dan disharmoni akibat kehidupan sosial yang terpaksa berjarak. Terakhir, kemampuan adaptasi dengan perkembangan teknologi digital adalah kunci untuk mengatasi problem sosial berupa hoaks dan disinformasi yang tanpa solusi tepat dapat menggerogoti bangunan solidaritas sosial itu sendiri.[]



## PROFIL PENULIS DAN EDITOR

**Idris Hemay**, Direktur Center for the Study of Religion and Culture (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dan Dosen FISIP UIN Jakarta. Idris berpengalaman dan tertarik melakukan penelitian dibidang sosial politik keagamaan, perilaku politik, politik identitas, radikalisme, demokrasi dan HAM, serta resolusi konflik dan pembangunan perdamaian. Idris lahir di Pamekasan Madura 3 April 1982. Menyelesaikan pendidikan di SDN Kertagena Tengah Kadur Pamekasan, MTs Khairul Falah Bungbaruh Kadur Pamekasan, MA. 2 PP. Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep, S1 Politik Islam di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S2 di Pascasarjana Ilmu Politik Universitas Nasional Program Studi Magister Ilmu Politik dan S3 Ilmu Politik UNPAD. Pada tahun 2015-2017, Idris pernah menjadi koordinator program “*Pesantren for Peace (PFP): a Project Supporting the Role of Indonesian Islamic Schools to Promote Human Rights and Peaceful Conflict Resolution*”. Program ini kerjasama antara CSRC UIN Jakarta dan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) Jerman dengan dukungan Uni Eropa. Disamping CSRC UIN Jakarta, Idris juga aktif sebagai Direktur riset di INDEX INDONESIA sebuah lembaga survei opini publik khususnya survei pilkada, pileg dan pilpres.

Pria yang sejak mahasiswa aktif di HMI Cabang Ciputat sudah mempublikasikan hasil penelitiannya dalam bentuk buku dan jurnal: “*Membumikan Pancasila untuk Bina Damai dan Resolusi Konflik Sosial*”, Badan Pengkajian MPR RI, 2018; Pesan Damai Pesantren Modul Kontra Narasi Ekstremis, CSRC UIN Jakarta dan Konrad

Adenauer-Stiftung (KAS), 2018; “*Literasi Keagamaan Takmir Masjid, Imam dan Khatib*”, CSRC, PPIM, CONVEY dan UNDP, 2018; “*Kaum Muda Muslim Milenial: Konservatisme, Hibridasi Identitas, dan Tantangan Radikalisme*”, CSRC, PPIM, CONVEY dan UNDP, 2017; “*Menilai Politik Elektoral dengan Tropong Prinsip Musyawarah Mufakat*”, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konsitusi, 2018; “*Aktualisasi Nilai-Nilai Demokrasi Pancasila dalam Masyarakat Indonesia*”, Jurnal Majelis Media Aspirasi Konsitusi, 2017;”*Cerita Sukses Pendidikan Perdamaian di Ambon*” CSRC UIN Jakarta-The Asia Foundation, 2015; Modul “*Pencegahan Terorisme di Daerah*”, BNPT 2013; “*Benih-benih Islam Radikal di Masjid Studi Kasus Jakarta dan Solo*”, CSRC UIN Jakarta, 2010; dan “*Pengaruh Politik Identitas Kesukuan dan Citra Figur Kandidat Gubernur terhadap Perilaku Pemilih Menjelang Pilkada Provinsi Bengkulu Tahun 2015*”, UNAS, 2016. Idris dapat dihubungi di [idris.hemay@gmail.com](mailto:idris.hemay@gmail.com).

**Irfan Abubakar**, Peneliti Senior & Dewan Penasehat CSRC UIN Jakarta 2019-2023. Sebelumnya, selama 2010-2018 menjabat Direktur CSRC UIN Jakarta. Dosen Fakultas Adab dan Humaniora UIN Jakarta ini seorang akademisi dengan minat keilmuan yang luas dalam kajian humaniora dan ilmu-ilmu sosial. Menamatkan S1 Bahasa dan Sastra Arab, IAIN Jakarta (1995), Irfan melanjutkan kuliah di Pasca Sarjana IAIN Jakarta dan meraih magister di bidang Studi-studi Keislaman di universitas yang sama (1999). Pada tahun 2000 mengikuti joint research tentang Islam dan Fenomenologi di Faculty of Arts, McGill University, Montreal, Canada.

Setelah bergabung ke CSRC tahun 2003, Irfan diutus belajar tentang resolusi konflik di AMAN’s School of Peace Studies and Conflict Resolution di Bangkok, Thailand (2005). Minatnya pada isu-isu konflik mengantarkan dia mengikuti Advance Course dalam bidang Security Studies di APCSS, Honolulu, Hawaii (2015). Jebolan Pesantren Gontor ini telah menulis dan menyunting banyak buku

dan modul pelatihan seputar ragam tema, mulai dari Filantropi Islam, Islam dan Perdamaian, Resolusi Konflik, Islam dan HAM, hingga Islam dan Demokrasi. Dia juga meneliti dan menulis beberapa artikel di media seputar isu Hate Speech. Berkat karyanya tersebut tahun 2011 Irfan dinobatkan oleh Majalah Campus Indonesia (Agustus, Vol. 5) sebagai satu di antara 20 akademisi top Indonesia (untuk bidang humaniora) di bawah usia 45 tahun. Sebagai ahli ujaran kebencian, beberapa tahun terakhir Irfan Abubakar secara reguler diminta menjadi narasumber di berbagai seminar dan pelatihan yang diikuti oleh para perwira POLRI.

**Faisal Nurdin Idris**, Faisal Nurdin Idris adalah dosen tetap ilmu politik dan hubungan internasional di FISIP UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di mana saat ini ia ditunjuk sebagai Ketua Program Studi Ilmu Hubungan Internasional. Faisal meraih gelar Doktor di bidang Ilmu Politik dan Studi Internasional dari University of Queensland, Australia, tahun 2020 dan gelar Master di bidang Ilmu Politik dari University of Lille 2, Prancis, pada tahun 2008. Minat penelitiannya meliputi implementasi kebijakan publik, pengaruh domestik dari kebijakan luar negeri, dan isu transnasional yaitu perdagangan orang, penyelundupan migran di Indonesia dan migrasi di Asia Tenggara. Pada tahun 2010, Faisal melaksanakan riset sebagai *Visiting Fellow* di Leiden University di Belanda. Sebelum melanjutkan studi doktor, ia adalah *Fulbright US-ASEAN Visiting Scholar* di University of Wisconsin-Madison di Amerika Serikat pada tahun 2013 dan menyelesaikan magang penelitian di *European Institute for Asian Studies* (EIAS) di Brussels, Belgia, pada tahun 2008.

**Rita Pranawati**, menamatkan masternya pada *Interdisciplinary Islamic Studies (IIS)*, Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2006) dan Master Bidang Sosiologi (2013) di Monash University Australia dengan beasiswa *Australian Leadership Award* (ALA) sekaligus penerima *Allison Sudrajat Award*.

Rita mendalami Islam, demokrasi, HAM, pembangunan perdamaian, serta isu perempuan sejak bergabung dengan *Center for the Study of Religion and Culture* (CSRC) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2006. Ia terlibat sebagai penulis maupun trainer untuk training Agama dan HAM dari level pemula hingga *advance* yang dilakukan untuk pemimpin muda Muslim di kalangan pesantren di 22 kota di Indonesia (2009-2013). Alumni *Moslem Exchange Program* (MEP) Indonesia Australia ini juga terlibat aktif menjadi fasilitator pada program *Pesantren for Peace* untuk pesantren se-Jawa dari tahun 2014-2016. Ia pun menjadi pelatih bagi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk isu HAM, perempuan dan anak. Selain banyak terlibat dalam berbagai training, Rita banyak terlibat dalam berbagai penelitian CSRC dari isu HAM, Islam, demokrasi, pembangunan perdamaian, hingga isu sosial pandemi.

Rita menguatkan keterlibatannya pada isu anak dan keluarga saat ia bergabung di *Nasyiatul Aisyiyah* dan *Children Center Muhammadiyah* pada saat tsunami Aceh. Ia juga menjadi Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia periode 2014-2017 sekaligus Komisioner Bidang Keluarga dan Pengasuhan Alternatif dan pada periode 2017-2022 menjabat Wakil Ketua KPAI. Ia menggagas berbagai penelitian di KPAI diantaranya terkait isu pengasuhan berkualitas, Taman Pengasuhan Anak, perkawinan anak, Anak Berhadapan dengan Hukum, dan penelitian perlindungan dan pemenuhan hak anak selama masa pandemi. Rita juga terlihat dalam tim penulis modul dan tim fasilitator Bimbingan Perkawinan dan tim moderasi beragama Kementerian Agama. Saat ini Rita menjadi Wakil Ketua Majelis Pelayanan Sosial Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Koordinator Divisi Sosialisasi Perundang-undangan Majelis Hukum dan HAM Pimpinan Pusat 'Aisyiyah. Ia juga merupakan Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Prof. Dr. HAMKA (UHAMKA). Rita banyak menulis



isu anak di berbagai media massa cetak maupun online. Ia dapat dihubungi melalui [rita.pranawati@gmail.com](mailto:rita.pranawati@gmail.com).

**Muchtadlirin**, pernah nyantri di Madrasah Aliyah Khusus (MAPK) Solo dan menyelesaikan S1-nya dari Fakultas Ushuluddin UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Ia juga aktif mengajar di berbagai perguruan tinggi di DKI Jakarta dan sekitarnya, salah satunya di Institut Pembina Rohani Jakarta (IPRIJA) Jakarta Timur. Disamping itu, ia juga menjadi trainer dan fasilitator beberapa pelatihan dan workshop.

Muchtadlirin saat ini juga aktif sebagai Peneliti & Koordinator Divisi Pelatihan dan Pengembangan Jaringan CSRC UIN Jakarta. Kontribusinya dalam menulis tertuang dalam beberapa buku, antara lain: Pendidikan Agama Islam untuk Mahasiswa (2004), Cerita Sukses Pendidikan Multikultural di Indonesia (2010), Islam di Ruang Publik (2011), dan Agama dan HAM (2014). Ia juga pernah terlibat dalam pembuatan film “Filantropi dalam Masyarakat Islam” dan “Gerbong Penuh Warna”.



## TENTANG CSRC UIN JAKARTA

**C**enter for the Study of Religion and Culture/CSRC (Pusat Kajian Agama dan Budaya) adalah lembaga kajian dan riset di bidang agama dan sosial-budaya, didirikan berdasarkan SK Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta pada tanggal 28 April tahun 2006. Pusat ini merupakan pengembangan dari bidang budaya pada Pusat Bahasa dan Budaya (PBB UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1999-2006), mengingat semakin meningkatnya tuntutan untuk mengembangkan kajian dan penelitian agama (terutama Islam) dalam relasi-relasi sosial-budaya dan politik. Tujuannya adalah untuk mengetahui dan memahami apa saja peran penting yang dapat disumbangkan agama guna mewujudkan tatanan masyarakat yang adil dan sejahtera, kuat, demokratis, dan damai.

Pentingnya pengembangan ini dapat dicermati dari semakin meningkatnya peran dan pengaruh agama di ruang publik. Dari hari ke hari, agama tidak saja menjadi perbincangan berbagai lapisan masyarakat, di tingkat nasional maupun internasional, tetapi juga pengaruhnya semakin menguat di ruang publik, di tengah derasnya arus modernisasi dan sekulerisasi.

Salah satu bukti menguatnya agama di ruang publik adalah tumbuhnya identitas, simbol, dan pranata-pranata sosial yang bercirikan keagamaan. Ekspresi Islam, harus diakui, mendapat tempat cukup kuat dalam ruang publik di tanah air. Namun demikian, Islam bukanlah satu-satunya entitas di dalam ruang tersebut; terdapat juga entitas-entitas lain yang ikut meramaikan

wajah ruang publik kita. Sebagai ajaran, sumber etik, dan inspirator bagi pembentukan pranata-pranata sosial, Islam acap tampil dalam ekspresinya yang beragam, sebab ia dipraktikkan berdasarkan multi-interpretasi dari komunitas-komunitas Muslim yang memiliki latar-belakang yang berbeda. Alhasil, dari sumber yang beragam itu, lahirlah banyak tafsiran dan aliran Islam; karena itu pula ajaran dan nilai-nilai agama yang luhur ini seringkali diamalkan dalam warna dan nuansa yang khas. Adakalanya ia tampil dalam berbagai potret eksklusivisme, namun tidak jarang juga hadir sebagai sumber etika sosial, inspirator bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, mediator bagi integrasi sosial, serta motivator bagi pemberdayaan sosial-ekonomi masyarakat madani. Islam juga mempengaruhi pembentukan pranata-pranata sosial-politik, ekonomi, dan pendidikan yang sedikit banyak punya andil positif bagi pembangunan nasional. Dalam konteks ini, kehadiran Islam di ruang publik tidak perlu dirisaukan. Sebaliknya etika dan etos agama seperti itu perlu diapresiasi oleh masyarakat dan dukungan semua pihak, terutama pemerintah.

Kehadiran CSRC bertujuan untuk merevitalisasi peran agama dalam konteks seperti itu. Agama harus diaktualkan dalam wujud etika dan etos sekaligus, guna mewarnai pembentukan sistem yang baik dan akuntabel. Ke depan, transformasi agama secara berhati-hati perlu dilakukan guna menjawab berbagai tantangan yang dihadapi umat, yang dari hari ke hari tampak semakin kompleks, di tengah derasnya gelombang perubahan sosial dan globalisasi. Mengingat arus perubahan berlangsung lebih cepat dari kemampuan umat untuk meng-upgrade kapasitasnya, maka perlu strategi yang tepat untuk menghadapinya.

Sesuai tugas dan perannya, CSRC mencoba memberi kontribusi di sektor riset, informasi, dan pelatihan serta memfasilitasi berbagai inisiatif yang dapat mendorong penguatan masyarakat sipil melalui

pengembangan kebijakan (*policy development*) di bidang sosial-keagamaan dan kebudayaan. Kami berharap, ke depan, institusi-institusi Islam berkembang menjadi pusat produktivitas umat (*production center*), dan bukan malah menjadi beban sosial (*social liability*). Dengan demikian diharapkan umat Islam dapat meningkatkan perannya dalam kehidupan sosial-budaya dan ekonomi secara positif dan konstruktif, [www.csrc.or.id](http://www.csrc.or.id) | [csrc@uinjkt.ac.id](mailto:csrc@uinjkt.ac.id). []



## TENTANG KAS INDONESIA TIMOR-LESTE

**Y**ayasan Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) merupakan yayasan politik berasal dari Jerman, yang memiliki kedekatan dengan Partai Christian Democratic Union (CDU). Nama Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) diambil dari nama tokoh terkenal Jerman, yakni Konrad Adenauer, beliau adalah kanselir pertama Republik Federal Jerman.

Fokus utama program KAS adalah manusia dengan ketinggian martabatnya yang tak tergantikan. Dalam pandangan KAS, manusia menjadi titik tolak keadilan sosial, demokrasi yang bebas dan tatalaksana pembangunan yang berkesinambungan. Bermitra dengan pihak-pihak yang melaksanakan tanggungjawab sosialnya di berbagai negara. KAS mengembangkan jaringan yang aktif dalam bidang politik, yang membentuk globalisasi dengan keadilan sosial, berkesinambungan secara ekologis serta efisien secara ekonomi.

Setidaknya saat ini KAS telah memiliki 80 kantor perwakilan di seluruh dunia, dengan menggarap berbagai proyek di lebih dari 120 negara. Program KAS di Indonesia adalah kinerja dari perwakilan KAS untuk Indonesia dan Timor-Leste yang berkedudukan di Jakarta.

Jan Senkyr, adalah Direktur KAS untuk perwakilan Indonesia dan Timor-Leste saat ini, untuk informasi lebih jauh tentang KAS, dapat diakses melalui situs berikut: [www.kas.de/indonesien](http://www.kas.de/indonesien).









Sejak kemunculannya pada awal tahun 2020, Pandemi Covid-19 telah membawa dampak multi dimensi bagi masyarakat Indonesia. Kompleksnya persoalan yang diakibatkan pandemi Covid-19 telah menyadarkan banyak pihak bahwa penanganan pandemi tidak akan berhasil tanpa dukungan solidaritas sosial di tengah masyarakat. Studi CSRC UIN Jakarta (2020-2021) menemukan bahwa solidaritas sosial masyarakat Indonesia masih cukup kuat, dan pada tingkat tertentu telah ikut berkontribusi dalam menunjang upaya penanganan pandemi. Buku ini membuka cakrawala

pemahaman kita mengenai makna solidaritas sosial dalam konteks penanganan pandemi Covid-19 yang sejatinya menuntut berbagai adaptasi sosial yang sama sekali baru bagi bangsa Indonesia. Sebelumnya kita belajar bahwa solidaritas sosial hanya bisa terlaksana dengan baik manakala masyarakat menguatkan silaturahmi secara fisik dan tatap muka. Kini, kita memperoleh pemahaman baru, solidaritas sosial ternyata dapat tetap terjaga meskipun dalam situasi minim perjumpaan secara fisik. Hal itu dikarenakan adanya kekompakan masyarakat dan pemerintah untuk beradaptasi dengan keadaan, kesempatan dan peluang yang tersedia. Bersamaan dengan itu, tradisi kedermawanan sosial yang didorong oleh motivasi keagamaan terbukti ampuh menempa modal sosial sehingga masyarakat dapat bertahan di tengah terpaan krisis maha berat selama pandemi Covid-19.

**CSRC**  
UIN SYARIF HIDAYATULLAH  
JAKARTA

**KONRAD  
ADENAUER  
STIFTUNG**

